

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Teori dan Praktik

Tim Penulis:

Rizky Ridwan | Latifah Wulandari Binti Asbaruna
Tri Cahyo Nugroho | Susilaningtyas Budiana Kurniawati
Rifki Abdul Malik | Siti Hartinah | Siti Nur Reskiyawati Said
Ahmad Nashiruddin Mushoddiq Rahman | Hendriyati Haryani
Agus Hendrawan | Warseno | Nurina Saffanah
Muhammad Husni | Ade Elza Surachman | Warka Syachbrani
Syahir Fadli | Ricky Setiawan | Zulfadli Yusuf | Magda Siahaan
Rafie Akbar Sumarno | Ay Maryani | Azwani Aulia | Lisna Lisnawati

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Teori dan Praktik

Rizky Ridwan
Latifah Wulandari Binti Asbaruna
Tri Cahyo Nugroho
Susilaningtyas Budiana Kurniawati
Rifki Abdul Malik
Siti Hartinah
Siti Nur Reskiyawati Said
Ahmad Nashiruddin Mushoddiq Rahman
Hendriyati Haryani
Agus Hendrawan
Warseno
Nurina Saffanah
Muhammad Husni
Ade Elza Surachman
Warka Syachbrani
Syahir Fadli
Ricky Setiawan
Zulfadli Yusuf
Magda Siahaan
Rafie Akbar Sumarno
Ay Maryani
Azwani Aulia
Lisna Lisnawati

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Teori dan Praktik

Tim Penulis:

Rizky Ridwan
Latifah Wulandari Binti Asbaruna
Tri Cahyo Nugroho
Susilaningtyas Budiana Kurniawati
Rifki Abdul Malik
Siti Hartinah
Siti Nur Reskiyawati Said
Ahmad Nashiruddin Mushoddiq Rahman
Hendriyati Haryani
Agus Hendrawan
Warseno
Nurina Saffanah
Muhammad Husni
Ade Elza Surachman
Warka Syachbrani
Syahir Fadli
Ricky Setiawan
Zulfadli Yusuf
Magda Siahaan
Rafie Akbar Sumarno
Ay Maryani
Azwani Aulia
Lisna Lisnawati

Editor : Rizka Mukhlisiah, S.E., M.Si.
Tata Letak : Asep Nugraha, S.Hum.
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : xii, 361
ISBN : 978-634-7021-94-6
Terbit Pada : November 2025
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2025 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Careng, Kab. Serang-Banten

Email : sadapenerbit@gmail.com

Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com

Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku **Akuntansi Sektor Publik: Teori dan Praktik** ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai respons terhadap semakin kompleksnya tuntutan akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di berbagai entitas publik. Di era modern ini, peran sektor publik mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga lembaga non-profit yang didanai publik menjadi semakin vital dalam mengelola sumber daya negara demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penguasaan prinsip dan teknik akuntansi sektor publik bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan fundamental bagi para praktisi, akademisi, dan calon pemimpin masa depan.

Buku ini dirancang secara komprehensif untuk menjembatani kesenjangan antara landasan teoritis yang kuat dengan implementasi praktis di lapangan. Kami memaparkan konsep-konsep dasar akuntansi pemerintahan, standar akuntansi yang berlaku (seperti PSAP atau standar internasional yang relevan), serta membahas secara mendalam siklus akuntansi mulai dari penganggaran, pencatatan transaksi, hingga penyusunan laporan keuangan yang informatif.

Kami menyadari bahwa bidang akuntansi sektor publik terus berkembang seiring dengan reformasi birokrasi dan adopsi teknologi. Oleh karena itu, kami berharap buku ini dapat menjadi referensi utama dan panduan praktis bagi mahasiswa akuntansi, bendahara dan staf di unit-unit pemerintahan, auditor, serta siapa pun yang berkepentingan dalam memastikan pengelolaan uang negara berjalan secara efisien, efektif, dan akuntabel.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB 1 ESENSI DAN RUANG LINGKUP SEKTOR PUBLIK.....	1
Pendahuluan	2
Esensi Akuntansi Sektor Publik.....	2
Ruang Publik Sebagai Objek dan Konteks Pengelolaan Publik... 3	
Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik.....	4
Entitas Sektor Publik	4
Fungsi Pemerintahan Layanan Publik	9
Penutup	11
Daftar Pustaka	12
Profil Penulis.....	14
BAB 2 TEORI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.....	15
Pengantar Akuntansi Sektor Publik.....	16
Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dan Sektor Swasta	16
Prinsip Dasar Akuntansi Sektor Publik	18
Standar Akuntansi Pemerintah	21
Konsep-Konsep Utama Dalam Akuntansi Sektor Publik	24
Tantangan Dalam Akuntansi Sektor Publik.....	26
Kesimpulan.....	27
Daftar Pustaka	29
Profil Penulis.....	31
BAB 3 KERANGKA KONSEP AKUNTANSI PEMERINTAHAN.....	32
Tujuan Umum dan Khusus Akuntansi Pemerintahan	33
Ruang Lingkup Akuntansi Pemerintahan	34
Jenis Laporan Dalam Akuntansi Pemerintahan	35
Pengguna Informasi Akuntansi Pemerintahan	36
Kebutuhan Informasi Akuntansi Pemerintahan.....	38
Jenis dan Struktur Entitas Pelaporan.....	40
Peranan Pelaporan Keuangan Sektor Publik	42
Komponen Laporan Keuangan Pemerintah	45

Kesimpulan.....	48
Daftar Pustaka.....	50
Profil Penulis.....	52
BAB 4 REGULASI DAN STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK	53
Perkembangan Akuntansi Sektor Publik.....	54
Akuntansi Sektor Publik di Indonesia.....	56
Regulasi Akuntansi Sektor Publik	59
Standar Akuntansi Sektor Publik.....	60
Daftar Pustaka.....	64
Profil Penulis.....	65
BAB 5 LINGKUNGAN DAN AKUNTABILITAS SEKTOR PUBLIK	66
Pendahuluan	67
Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik.....	68
Akuntabilitas Sektor Publik.....	69
Menciptakan Lingkungan Akuntabilitas	71
Kesimpulan.....	74
Daftar Pustaka.....	75
Profil Penulis.....	76
BAB 6 PERENCANAAN KEUANGAN PUBLIK: APBN DAN APBD	77
Pendahuluan	78
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).....	78
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)	87
Perbedaan APBN dan APBD.....	91
Daftar Pustaka.....	92
Profil Penulis.....	93
BAB 7 AKUNTANSI ANGGARAN	94
Pengertian Akuntansi Anggaran	95
Fungsi dan Tujuan Akuntansi Anggaran.....	95
Tujuan Akuntansi Anggaran	96
Komponen Akuntansi Anggaran	97
Jenis-Jenis Anggaran Dalam Sektor Publik	100
Peran Akuntansi Anggaran Dalam Pengambilan Keputusan..	103
Tantangan dan Masalah Dalam Akuntansi Anggaran.....	104
Daftar Pustaka.....	106
Profil Penulis.....	107

BAB 8 AKUNTANSI UNTUK PENDAPATAN	108
Pendahuluan	109
Jenis-Jenis Pendapatan di Sektor Publik.....	111
Dasar Hukum dan Standar Akuntansi Pendapatan di Sektor Publik.....	113
Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan.....	114
Tantangan dan Isu Dalam Akuntansi Pendapatan Sektor Publik.....	117
Studi Kasus dan Contoh Praktis	118
Daftar Pustaka.....	120
Profil Penulis.....	123
BAB 9 AKUNTANSI UNTUK BELANJA	124
Konsep Dasar Belanja Dalam Akuntansi Sektor Publik.....	125
Pengakuan, Pengukuran Dan Pencatatan Belanja	129
Penyajian dan Analisis Belanja Dalam Laporan Keuangan	135
Daftar Pustaka.....	140
Profil Penulis.....	141
BAB 10 AKUNTANSI UNTUK ASET	142
Pendahuluan	143
Pengertian dan Konsep Dasar Aset dalam Sektor Publik.....	143
Klasifikasi Aset Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).....	144
Pengakuan Aset.....	145
Pengukuran Aset	146
Penyusutan Aset Tetap	147
Revaluasi dan Penurunan Nilai Aset	148
Penghentian dan Pelepasan Aset.....	149
Akuntansi Aset Tak Berwujud	149
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).....	150
Pengendalian dan Inventarisasi Aset Pemerintah	151
Penyajian dan Pengungkapan Aset Dalam Laporan Keuangan.....	151
Contoh Jurnal Akuntansi Aset.....	152
Daftar Pustaka.....	154
Profil Penulis.....	155

BAB 11 AKUNTANSI UNTUK KEWAJIBAN.....	156
Definisi Akuntansi Kewajiban.....	157
Akuntansi Kewajiban Sektor Publik.....	157
Definisi dan Karakteristik Kewajiban Sektor Publik.....	159
Sistem Akuntansi Kewajiban Pada SatKer PemDa.....	162
Daftar Pustaka.....	166
Profil Penulis.....	167
BAB 12 AKUNTANSI UNTUK ENTITAS DANA.....	168
Pengertian dan Klasifikasi Ekuitas Dana.....	169
Ruang Lingkup Akuntansi Ekuitas Dana.....	171
Pentingnya Akuntansi Ekuitas Dana.....	174
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).....	176
Prosedur Akuntansi Ekuitas Dana, Tahapan Siklus Akuntansi, dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD).....	178
Penjurnalan dan Pencatatan Transaksi Akuntansi Ekuitas Dana.....	181
Format Neraca Sesuai SAP.....	186
Format Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).....	187
Format Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).....	189
Daftar Pustaka.....	191
Profil Penulis.....	194
BAB 13 SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN.....	195
Pendahuluan.....	196
Konsep Dasar Sistem Akuntansi Sektor Publik (SASP).....	198
Penerapan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.....	199
Peran Regulasi Dalam Penerapan.....	203
Tantangan Implementasi di Era <i>Digital</i>	204
Kesimpulan.....	206
Daftar Pustaka.....	208
Profil Penulis.....	209
BAB 14 LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH	210
Pendahuluan.....	211
Kerangka Hukum dan Standar.....	212
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.....	213
Komponen Laporan Keuangan Pemerintah.....	214

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	215
Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Pusat	217
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	218
Perbedaan Laporan Keuangan Pusat dan Daerah.....	218
Analisis dan Tantangan	219
Daftar Pustaka.....	220
Profil Penulis.....	221
BAB 15 ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH.....	222
Pendahuluan	223
Tujuan dan Komponen Laporan Keuangan Pemerintah	223
Jenis-Jenis Rasio Keuangan Pemerintah	225
Daftar Pustaka.....	231
Profil Penulis.....	234
BAB 16 AUDITING SEKTOR PUBLIK.....	235
Pendahuluan	236
Konsep Dasar <i>Auditing</i> Sektor Publik	236
Jenis dan Ruang Lingkup Audit Sektor Publik.....	238
Proses Audit Sektor Publik.....	240
Praktik Audit Sektor Publik di Indonesia	242
Tantangan dan Isu Kontemporer Dalam <i>Auditing</i> Sektor Publik.....	245
Kesimpulan.....	247
Daftar Pustaka.....	249
Profil Penulis.....	250
BAB 17 AKUNTANSI UNTUK ENTITAS NIRLABA	251
Pendahuluan	252
Karakteristik dan Ekosistem Entitas Nirlaba Di Indonesia.....	252
Struktur Pendanaan dan Keberlanjutan Finansial	254
Kerangka Konseptual Psak 335.....	255
Contoh Bentuk Laporan.....	256
Hubungan Dengan Akuntansi Sektor Publik dan <i>Governance</i>	259
Penerapan Isak 335 Pada Lembaga Sosial.....	260
Penutup.....	261
Daftar Pustaka.....	262
Profil Penulis.....	263

BAB 18 AKUNTANSI BASIS KAS VS AKUNTANSI AKRUAL.....	264
Pendahuluan.....	265
Akuntansi Basis Kas.....	265
Akuntansi Basis Akrua.....	267
Perbedaan Akuntansi Basis Kas dan Akuntansi Basis Akrua.....	270
Pencatatan Akuntansi Basis Kas dan Akuntansi Basis Akrua.....	273
Daftar Pustaka.....	274
Profil Penulis.....	275
BAB 19 AKUNTANSI ANGGARAN BERBASIS KINERJA	276
Pendahuluan.....	277
Konsep Dasar Anggaran Berbasis Kinerja (AABK).....	278
Prinsip dan Karakteristik Utama AABK.....	280
Komponen dan Struktur AABK.....	282
Mekanisme Penyusunan dan Pelaksanaan AABK.....	283
Akuntansi Dalam Sistem AABK.....	285
Daftar Pustaka.....	288
Profil Penulis.....	289
BAB 20 BIAYA DAN <i>COSTING</i> DALAM LAYANAN PUBLIK	290
Pengantar Biaya dan <i>Costing</i> Dalam Layanan Publik.....	291
Karakteristik Biaya Dalam Layanan Publik.....	292
Metode Penghitungan Biaya Dalam Layanan Publik.....	293
Pengendalian dan Pengelolaan Biaya.....	294
Analisis Biaya-Efektivitas dan Biaya-Manfaat.....	295
Implementasi Sistem <i>Costing</i> di Instansi Pemerintah.....	297
Peran Biaya Dalam Pengambilan Keputusan dan Akuntabilitas Publik.....	298
Studi Kasus dan Praktik Terbaik.....	299
Daftar Pustaka.....	301
Profil Penulis.....	302
BAB 21 KEMITRAAN PEMERINTAH-SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP)/PPP.....	303
Definisi dan tujuan.....	304
Tipe-tipe Kontrak PPP.....	305
Siklus Hidup Proyek PPP (<i>Project Lifecycle</i>).....	306

Peran Akuntansi dalam PPP	306
Mekanisme Pembiayaan dalam PPP	309
Pengendalian dan Audit Pada PPP	311
Studi Kasus PPP di Indonesia	313
Tantangan dan Prospek PPP.....	314
Daftar Pustaka.....	315
Profil Penulis.....	316
BAB 22 AKUNTANSI UNTUK ASET BERSEJARAH DAN WARISAN BUDAYA.....	317
Pendahuluan	318
Konsep dan Karakteristik Aset Bersejarah.....	318
Isu Akuntansi Aset Bersejarah.....	326
Studi Kasus dan Praktik.....	328
Kesimpulan.....	329
Daftar Pustaka.....	330
Profil Penulis.....	332
BAB 23 ISU <i>SUSTAINABILITY</i> DAN PELAPORAN BERKELANJUTAN	333
Peran Sektor Publik Dalam Pencapaian SDGs dan Pelaporan Keberlanjutan: Tantangan dan Pendekatan Terpadu	334
Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Risiko Iklim, Nilai Publik, dan Pencegahan Korupsi Dalam Pelaporan Sektor Publik.....	335
Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Manajemen Risiko, Nilai Publik, dan Pencegahan Korupsi dalam Kebijakan Sektor Publik	336
Prinsip Tata Kelola yang Baik dalam Pelaporan Publik: Akuntabilitas, Transparansi, Integritas, dan Pengawasan Efektif.....	337
Pemangku Kepentingan, Penilaian Materialitas, dan <i>Public Interest Test</i> Dalam Pelaporan Sektor Publik	339
Pendekatan <i>Triple Bottom Line + Governance</i> (TBL+G) Dalam Pengukuran Kinerja Sektor Publik.....	340
Integrasi Pendekatan Keberlanjutan dalam Penganggaran dan Pengadaan Sektor Publik: PBB, <i>Green Budgeting</i> , dan Pengadaan Berkelanjutan	342

Integrasi Pendekatan Keberlanjutan Dalam Penganggaran dan Pengadaan Sektor Publik: PBB, <i>Green Budgeting</i> , dan Pengadaan Berkelanjutan	343
Daftar Pustaka.....	345
Profil Penulis.....	349
BAB 24 AKUNTANSI KEBERLANJUTAN DAN HIJAU UNTUK SEKTOR PUBLIK.....	350
Isu & Kerangka Konseptual.....	351
Transformasi dan Konvergensi Menuju Akuntansi Keberlanjutan dan Hijau Sektor Publik.....	354
Kebijakan Akuntansi Keberlanjutan/Hijau Sektor Publik.....	355
Akun-Akun Hijau Sektor Publik	356
Daftar Pustaka.....	360
Profil Penulis.....	361




BAB 1

ESENSI DAN RUANG

LINGKUP SEKTOR

PUBLIK

Rizky Ridwan, S.E., M.Ak.
Universitas Cipasung Tasikmalaya



Pendahuluan

Akuntansi sektor publik hadir sebagai instrumen tata kelola dalam entitas yang mengelola sumber daya publik untuk kesejahteraan masyarakat. Berbeda dari akuntansi privat yang berorientasi laba, akuntansi sektor publik berfokus pada akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan publik yang berkeadilan.

Dalam konteks administrasi negara modern, akuntansi sektor publik tidak lagi dipahami sekadar sebagai kegiatan teknis pencatatan, tetapi sebagai tulang punggung mekanisme demokrasi fiskal yang memastikan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan menjaga legitimasi institusi negara. Sektor publik memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan ruang publik secara efektif, di mana ruang publik menjadi wadah interaksi sosial, identitas budaya, serta penopang kualitas hidup masyarakat (Nurjaman & Hendrakusumah, 2023; Saputra *et al.*, 2019).

Aktivitas di ruang publik yang bersifat sosial maupun komersial mencerminkan keberagaman kebutuhan masyarakat (Faedlulloh *et al.*, 2017; Hastorahmanto *et al.*, 2022). Kompleksitas ini menuntut adanya sistem akuntansi yang tidak hanya menata angka, tetapi juga mampu mendukung fungsi perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya publik secara berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan akuntansi sektor publik bukanlah domain teknis semata, melainkan perangkat institusional yang mengintegrasikan asas legalitas, etika pelayanan publik, partisipasi sosial, serta pengelolaan keuangan negara secara profesional sebagai syarat terbentuknya pemerintahan yang kredibel.

Esensi Akuntansi Sektor Publik

Esensi akuntansi sektor publik tidak hanya pada pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga sebagai alat legitimasi dan pengendalian pelayanan publik. Akuntansi sektor publik merupakan sarana untuk mengomunikasikan bagaimana dana publik dialokasikan, dimanfaatkan, serta menghasilkan dampak terhadap kesejahteraan kolektif.

Manajemen pengetahuan dan inovasi dalam sektor publik turut menjadi komponen penting untuk meningkatkan kualitas layanan

nasional, listrik jalan, air bersih, sekolah negeri, rumah sakit pemerintah, taman kota, transportasi publik, pengelolaan sampah, ruang terbuka publik. Tujuan utamanya: menjamin setiap warga termasuk yang tidak mampu membayar tetap mendapatkan layanan dasar untuk hidup layak.

2. Fungsi Distribusi (*Distribution Function*)

Fungsi ini fokus pada pengurangan ketimpangan ekonomi dan jaminan keadilan sosial. Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk kelompok rentan agar akses terhadap layanan tidak ditentukan oleh kemampuan ekonomi. Instrumen yang digunakan: subsidi (BBM/beras/listrik), bansos tunai, jaminan sosial kesehatan (BPJS PBI), kartu sembako, program keluarga harapan (PKH), jaminan kehilangan pekerjaan, dana desa untuk desa tertinggal. Fokus utama: mencegah terjadinya “eksklusi layanan” kondisi ketika kelompok miskin tidak bisa mengakses pendidikan, kesehatan, pangan, atau ruang hidup yang layak karena faktor ekonomi.

3. Fungsi Stabilisasi (*Stabilization Function*)

Fungsi ini dijalankan terutama oleh pemerintah pusat untuk menjaga kestabilan ekonomi makro agar pelayanan publik tidak terganggu oleh fluktuasi ekonomi. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal (APBN, insentif pajak, defisit/ surplus terukur) dan, bersama bank sentral, menjaga stabilitas moneter (inflasi, nilai tukar, likuiditas perbankan). Relevansi dengan layanan publik: ketika ekonomi stabil, pemerintah tetap bisa membayar gaji guru/dokter, menyalurkan bantuan sosial, membangun infrastruktur, dan mencegah lonjakan harga yang mengurangi akses layanan dasar.

4. Fungsi Regulasi & Fasilitasi

Pada fungsi ini pemerintah bertindak sebagai penjaga mutu layanan dan aturan main bagi seluruh pelaku. Tidak semua layanan harus pemerintah yang menjalankan; namun pemerintah wajib memastikan layanan itu aman, adil, terstandar, dan dapat diakses. Bentuk regulasi: standar keselamatan transportasi, izin rumah sakit, SPM (Standar Pelayanan Minimum), tata ruang kota, syarat sanitasi makanan, AMDAL, sertifikasi pendidikan. Fasilitasi:

penyediaan data publik, perizinan berbasis risiko, pelatihan teknis, ekosistem digital (*e-catalog/e-government*), insentif bagi pihak swasta/komunitas untuk melayani publik. Intinya: bukan hanya mengatur, tetapi juga membantu agar layanan bisa berjalan dengan benar.

5. Fungsi Representasi & Partisipasi

Fungsi ini menegaskan bahwa layanan publik bukan keputusan teknokrat sepihak, melainkan harus mencerminkan suara dan kebutuhan warga yang dilayani. Pemerintah membuka kanal partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan: Musrenbang, forum konsultasi publik, FGD kebijakan, e-aspirasi, survei kepuasan layanan, citizen charter, pengawasan berbasis masyarakat. Dampak fungsi ini: kebijakan lebih legitimate, konflik sosial menurun, dan hasil layanan lebih tepat sasaran karena disusun bersama warga bukan hanya dari atas ke bawah.

Penutup

Bab ini menegaskan bahwa akuntansi sektor publik memiliki esensi sebagai instrumen tata kelola untuk menjamin kesejahteraan sosial melalui transparansi, akuntabilitas, dan keandalan informasi. Fokus pada pengelolaan ruang publik menunjukkan relevansi akuntansi sektor publik dalam merespons dinamika kebutuhan masyarakat dan tekanan perubahan zaman.

Akuntansi sektor publik juga menopang kepercayaan publik terhadap negara melalui mekanisme pertanggungjawaban dan legitimasi fiskal yang terstruktur. Bab-bab selanjutnya akan mengelaborasi aspek teknik, regulasi, kerangka standar, serta praktik penerapan akuntansi sektor publik secara lebih rinci dalam konteks nasional maupun internasional, termasuk studi kasus implementasi pada berbagai level pemerintahan dan organisasi non-profit.

Daftar Pustaka

- Andhika, L. R. (2020). Kajian Literatur: Studi Pemetaan Sistematis Indikator Inovasi Sektor Publik. *Jurnal Litbang Sukowati Media Penelitian Dan Pengembangan*, 3(2), 19. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v3i2.150>.
- Aryanti, D., & Prasojo, E. (2021). Manajemen Pengetahuan Pada Sektor Publik: Sebuah Tinjauan Literatur Sistematis 2010-2021. *Jurnal Academia Praja*, 4(2), 333-357. <https://doi.org/10.36859/jap.v4i2.445>.
- Biduri, S. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. <https://doi.org/10.21070/2018/978-602-5914-20-1>.
- Costari, N., & Belinda, P. A. (2021). Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan. *Jamanta Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 1(1), 58-77. https://doi.org/10.36563/jamanta_unita.v1i1.421.
- Faedlulloh, D., Prasetyanti, R., & Indrawati, I. (2017). Menggagas Ruang Publik Berbasis Demokrasi Deliberatif: Studi Dinamika Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Di Jakarta Utara. *Spirit Publik Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 43. <https://doi.org/10.20961/sp.v12i2.16240>.
- Hastorahmanto, P. S., Trisjanti, L. I., Putra, H. A., Setiawan, F. H., Febriyanti, N., Andika, A., Marcelino, F., Andeng, A., Setiawan, R. C., & Widodo, E. (2022). Ruang Komunal Sebagai Ruang Publik Sebagai Wadah Aktifitas Warga Kampung Asempayung Surabaya. *Asawika Media Sosialisasi Abdimas Widya Karya*, 7(02), 1-8. <https://doi.org/10.37832/asawika.v7i02.88>.
- Nurjaman, L., & Hendrakusumah, E. (2023). Identifikasi Tingkat Kenyamanan Ruang Terbuka Publik Pusat Kota Sukabumi. *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 139-150. <https://doi.org/10.29313/jrpwk.v3i2.2751>.
- Prasandya, Km. D. E., Satria, M. W., & Nurwarsih, N. W. (2023). Desain Ruang Publik Masa Depan: Studi Ruang Publik Indoor Dan Outdoor

- Di Bali. *Jurnal Pengembangan Kota*, 11(1), 71–81. <https://doi.org/10.14710/jpk.11.1.71-81>.
- Primasari, N. H., & Anggraeni, D. (2021). Peningkatan Kompetensi Siswa Melalui Pelatihan Akuntansi Sektor Publik Bagi Siswa SMK Triguna 1956 Jakarta. *Global Abdimas Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 12–17. <https://doi.org/10.51577/globalabdimas.v1i1.60>.
- Saputra, M. A., Andriyani, L., & Mudiantoro, B. (2019). Kajian Pengembangan Kawasan Kali Besar, Kotatua Sebagai Ruang Publik. *Seminar Nasional Pembangunan Wilayah Dan Kota Berkelanjutan*, 1(1). <https://doi.org/10.25105/pwkb.v1i1.5258>.
- Suryani, B. D., Astuti, D. P., & Tohjiwa, A. D. (2023). Evaluasi Terhadap Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik Tepi Situ Mangga Bolong, Jagakarsa, Jakarta Selatan. *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, 12(2), 100–108. <https://doi.org/10.32315/jlbi.v12i2.87>.

PROFIL PENULIS




Rizky Ridwan, S.E., M.Ak.

Penulis lahir di Tasikmalaya, 16 Juli 1994, telah mencapai prestasi gemilang dan kini menjadi dosen tetap di Program Studi Akuntansi, Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik dan Sistem Informasi Akuntansi di Universitas Cipasung Tasikmalaya. Gelar S1 diperoleh dari Universitas Siliwangi dan S2 dari Universitas Widyatama, menunjukkan jejak intelektualnya yang kokoh.

Dengan keahlian di akuntansi sektor publik, penulis aktif dalam pengajaran, riset, dan publikasi ilmiah. Dedikasinya tercermin dalam motivasinya yang tinggi, memberikan ilmu dan pengalaman kepada mahasiswa dan rekan sejawat. Penulis juga telah berhasil mendapatkan beberapa dana hibah penelitian dan pengabdian dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), yang memungkinkan penulis untuk memperluas penelitian dan meningkatkan dampak pengabdian kepada masyarakat. Keberhasilan ini menunjukkan kemampuan penulis dalam bersaing di tingkat nasional dan dedikasi untuk terus berkontribusi dalam dunia akademik. Keberhasilannya adalah hasil dari semangat tak kenal menyerah dan komitmen pada pendidikan, membawa dampak positif dalam komunitas akademis, membentuk generasi penerus yang berkualitas. Dengan pengetahuannya yang mendalam, penulis tidak hanya mengajar, tetapi juga mendorong pertumbuhan intelektual dalam komunitas akademisnya, menjadikannya pilar inspiratif dalam dunia pendidikan tinggi.

Email Penulis: rizkyridwan@uncip.ac.id.



BAB 2

TEORI AKUNTANSI

SEKTOR PUBLIK

Dr. Latifah Wulandari Binti Asbaruna, S.E., M.M., CPRM.
Universitas Ma'soem



Pengantar Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pengelolaan dan pelaporan keuangan dalam organisasi publik seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan publik, dan lembaga lainnya yang tidak berorientasi pada keuntungan.

Fungsi utama akuntansi sektor publik adalah untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, akuntansi sektor publik bukan hanya berfungsi sebagai alat pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya publik.

Pentingnya akuntansi sektor publik ini semakin meningkat seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan penggunaan anggaran publik yang bijaksana. Akuntansi sektor publik bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat mengenai alokasi dan penggunaan sumber daya publik, serta mendukung pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang.

Keberhasilan sistem akuntansi sektor publik sangat bergantung pada penerapan prinsip-prinsip dasar yang berlaku, seperti prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kewajaran. Sebagai contoh, dalam pengelolaan dana bantuan sosial oleh pemerintah, akuntansi sektor publik memastikan dana tersebut tercatat dengan benar dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Ketika laporan keuangan disusun dengan baik, masyarakat dan lembaga pengawas dapat mengevaluasi apakah dana telah digunakan sesuai dengan peruntukannya atau terjadi penyimpangan.

Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dan Sektor Swasta

Akuntansi sektor publik dan sektor swasta memang sama-sama berlandaskan prinsip-prinsip akuntansi dasar yang serupa, namun keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan dari segi tujuan, fokus, dan metode pelaporan yang digunakan. Perbedaan ini muncul karena karakteristik dan peran masing-masing sektor yang berbeda dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.

Tantangan Dalam Akuntansi Sektor Publik

Walaupun Indonesia telah memiliki peraturan dan standar yang jelas seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta adopsi *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS), akuntansi sektor publik tetap menghadapi berbagai tantangan yang signifikan dalam pelaksanaannya di lapangan. Tantangan-tantangan ini dapat mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan dan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat.

Salah satu tantangan utama adalah masalah transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat sering mengalami kesulitan dalam mengakses informasi keuangan yang lengkap dan mudah dipahami mengenai penggunaan anggaran publik. Hal ini menyebabkan terbatasnya pengawasan oleh publik dan lembaga terkait, yang pada akhirnya bisa membuka celah bagi praktik korupsi, pemborosan, atau penyalahgunaan anggaran.

Misalnya, dalam beberapa kasus pembangunan infrastruktur yang didanai oleh dana APBD, informasi detail mengenai anggaran, kontraktor, dan progres pekerjaan tidak sepenuhnya terbuka untuk publik. Kondisi ini menghambat masyarakat untuk melakukan evaluasi atau memberikan masukan yang konstruktif.

Selain itu, ketidakpastian anggaran menjadi tantangan besar lainnya dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Ketidakpastian ini dapat muncul dari berbagai faktor, seperti fluktuasi pendapatan negara akibat kondisi ekonomi global dan domestik, perubahan kebijakan fiskal yang mendadak, atau bahkan ketidakstabilan politik yang berdampak pada perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Misalnya, saat terjadi krisis ekonomi atau pandemi, penerimaan negara dari pajak menurun drastis sehingga pemerintah harus merevisi kembali anggaran yang sudah disusun sebelumnya. Situasi ini menimbulkan kesulitan dalam menjaga kesinambungan program-program publik dan pencapaian target pembangunan. Selain itu, masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi memadai dalam bidang akuntansi sektor publik.

Banyak pegawai negeri sipil di tingkat daerah belum memiliki pemahaman dan keterampilan yang cukup dalam menerapkan standar akuntansi berbasis akrual yang kompleks. Hal ini sering

mengakibatkan kualitas pelaporan keuangan yang kurang memadai dan kurangnya integrasi data keuangan antara instansi pusat dan daerah. Tak kalah penting adalah tantangan terkait dengan teknologi dan sistem informasi. Dalam era digital, kebutuhan akan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi dan *real-time* semakin penting.

Namun, banyak instansi pemerintah yang masih menggunakan sistem manual atau sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga proses pelaporan menjadi lambat dan rentan terhadap kesalahan data. Sebagai contoh, sistem distribusi bantuan sosial yang belum terintegrasi secara nasional dapat menyebabkan duplikasi data penerima bantuan, ketidaktepatan sasaran, dan inefisiensi penggunaan anggaran.

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan tersebut membutuhkan perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat. Peningkatan kapasitas SDM, pengembangan sistem informasi yang modern, serta peningkatan transparansi dan partisipasi publik menjadi kunci dalam mengatasi kendala tersebut agar akuntansi sektor publik dapat berjalan dengan optimal dan berkontribusi maksimal terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Kesimpulan

Teori akuntansi sektor publik memegang peranan krusial dalam menjamin pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan efisien. Dalam konteks pengelolaan sumber daya publik, akuntansi sektor publik tidak hanya sekadar mencatat transaksi keuangan, melainkan juga menjadi alat strategis untuk mengawasi penggunaan dana publik, memastikan pertanggungjawaban kepada masyarakat, serta mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data yang valid dan dapat dipercaya.

Prinsip-prinsip dasar seperti akuntabilitas, transparansi, kewajaran, efisiensi, dan efektivitas menjadi landasan utama dalam praktik akuntansi sektor publik. Akuntabilitas menjamin bahwa pemerintah atau lembaga publik bertanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan anggaran yang berasal dari pajak dan sumber daya publik lainnya. Transparansi memastikan bahwa informasi keuangan

dapat diakses oleh masyarakat luas, sehingga tercipta pengawasan yang efektif dan partisipasi publik dalam evaluasi penggunaan anggaran.

Sementara itu, kewajaran mengharuskan laporan keuangan mencerminkan kondisi sebenarnya, memberikan gambaran yang objektif dan tidak menyesatkan. Meski demikian, pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut di lapangan menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang akuntansi sektor publik, resistensi terhadap perubahan sistem pelaporan, serta kendala teknis dalam pengintegrasian data keuangan yang kompleks.

Namun, perkembangan standar akuntansi seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual dan adopsi *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS) memberikan fondasi yang kokoh untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Standar-standar ini tidak hanya menyelaraskan praktik akuntansi sektor publik Indonesia dengan standar internasional, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan publik. Sebagai contoh, penerapan SAP yang mengintegrasikan basis akrual memungkinkan pemerintah untuk lebih baik dalam mengukur kewajiban dan asetnya, sehingga laporan keuangan menjadi lebih informatif dan relevan untuk pengambilan keputusan.

Selain itu, penggunaan indikator kinerja seperti Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) membantu menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan pembangunan. Kesimpulannya, teori akuntansi sektor publik merupakan fondasi yang tidak bisa diabaikan dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip akuntansi sektor publik yang tepat serta dukungan penerapan standar akuntansi yang mutakhir, diharapkan pengelolaan keuangan publik dapat berjalan dengan lebih baik, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Ahmed, K. (2015). *Public Sector Accounting And Financial Management*. Routledge.
- Allen, R., Hemming, R., & Potter, B. (2005). *The International Handbook of Public Financial Management*. Palgrave Macmillan.
- Bovens, M., Goodin, R. E., & Schillemans, T. (2021). *The Oxford Handbook of Public Accountability*. Oxford University Press.
- BPK RI. (2024). *Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2023*. <https://www.bpk.go.id>.
- Christiaens, J., Reyniers, B., & Rollé, C. (2021). Accounting Reforms In The Public Sector: A Conceptual Framework. *Public Money & Management*, 41(4), 287–296.
- Halim, A., & Anwar, Y. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Salemba Empat.
- IFAC. (2021). *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) Handbook*. International Federation of Accountants. <https://www.ifac.org>.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2021). *SAP Berbasis Akrua: Edisi Terbaru*. Jakarta: KSAP.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Laporan Evaluasi Penerapan SAP di Pemerintah Daerah Tahun 2023*. <https://www.kemenkeu.go.id>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Petunjuk Teknis Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)*. <https://www.kemenkeu.go.id>.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). *Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai Melalui Sistem Digital*. <https://kemensos.go.id>.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Edisi revisi). UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.

OECD. (2023). *Government At A Glance 2023*. Organisation for Economic Co-operation and Development. <https://www.oecd.org>.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Transparency International. (2022). *Corruption Perceptions Index 2022*. <https://www.transparency.org>.

Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2018). *Financial Accounting* (10th ed.). Wiley.

PROFIL PENULIS



**Dr. Latifah Wulandari Binti Asbaruna,
S.E., M.M., CPRM.**

Penulis lahir pada tanggal 26 Juni 1995 di Kota Jambi. Penulis saat ini menetap di Bandung, Jawa Barat. Penulis merupakan anak pertama dari lima bersaudara. Penulis menamatkan kuliah sarjananya pada program studi manajemen keuangan di Universitas Koperasi Indonesia pada tahun 2017, dan kemudian melanjutkan kuliah program magisternya pada program studi manajemen keuangan, di Universitas Koperasi Indonesia dan lulus pada tahun 2019.

Lalu melanjutkan kuliah program doctor pada program studi manajemen keuangan Universitas Pendidikan Indonesia dan lulus tahun 2025. Saat ini, penulis terdaftar sebagai dosen tetap pada program studi bisnis *digital*, Universitas Ma'soem. Penulis pernah mengajar mata kuliah: Pengantar Manajemen, Pengantar Akuntansi, Manajemen Keuangan, Manajemen Pemasaran, Manajemen SDM, Manajemen Operasional, Kewirausahaan, Ekonomi Mikro, Ekonomi Makro dan Pengantar Ilmu Ekonomi. Penulis memiliki kepakaran di bidang manajemen keuangan. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut.

Email Penulis: latifahwulandariasbaruna@gmail.com.



BAB 3
KERANGKA KONSEP
AKUNTANSI
PEMERINTAHAN

Tri Cahyo Nugroho, S.E., M.Ak.
Universitas Raharja, Tangerang



Tujuan Umum dan Khusus Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan berperan tidak hanya untuk mencatat keuangan, tetapi juga untuk:

1. Mendorong Akuntabilitas

Pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat atas pengelolaan sumber daya publik. Akuntansi pemerintahan membantu memberikan laporan yang dapat menjelaskan bagaimana dana publik digunakan secara transparan dan sesuai aturan yang berlaku.

2. Menyediakan Informasi Keuangan yang Transparan dan Akurat

Laporan keuangan pemerintah yang baik harus mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, sehingga dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan.

3. Mendukung Proses Pengambilan Keputusan di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Politik

Data akuntansi yang disediakan oleh Lembaga pemerintah membantu dalam perencanaan anggaran, menilai kinerja dan mengawasi pemanfaatan anggaran.

4. Menjamin Kesesuaian Dengan Regulasi Hukum

Tujuan dari akuntansi pemerintahan adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan publik berjalan sesuai dengan peraturan dan hukum yang ada, seperti Undang-Undang tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah, serta Standar Akuntansi Pemerintahan..

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, akuntansi pemerintahan memiliki beberapa tujuan khusus, yaitu: memberikan data tentang keadaan keuangan, perubahan dalam keadaan keuangan, serta informasi lain yang diperlukan untuk membuat keputusan, menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kinerja manajerial dalam mengelola sumber daya publik secara ekonomis, efisien, dan efektif, memberikan data yang membantu pengguna untuk mengevaluasi kepatuhan pemerintah terhadap anggaran dan hukum yang berlaku.

- a. Aset, yaitu sumber daya ekonomi yang dikuasai pemerintah seperti kas, piutang, persediaan, aset tetap (tanah, gedung, peralatan), dan investasi.
- b. Kewajiban, yaitu utang atau kewajiban lain yang harus dibayar oleh pemerintah.
- c. Ekuitas, yaitu kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Neraca disusun dengan basis akrual, sehingga menggambarkan posisi keuangan pemerintah secara lebih komprehensif (Bastian, 2015).

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menunjukkan pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional selama satu periode. Tujuannya adalah memberikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional pemerintah yang mempengaruhi ekuitas, baik transaksi kas maupun nonkas. Isi utama LO:

- a. Pendapatan-LO (pendapatan pajak, retribusi, hibah, dan lainnya);
- b. Beban (belanja pegawai, barang, jasa, subsidi, hibah, dan transfer);
- c. Surplus/defisit dari kegiatan operasional.

Laporan ini menjadi dasar untuk menilai efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan pemerintah (Mahmudi, 2019).

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi tentang aliran kas masuk dan kas keluar dalam suatu periode akuntansi. Laporan ini menggambarkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kas dan menggunakannya untuk mendanai aktivitasnya. LAK terdiri dari tiga aktivitas utama:

- a. Aktivitas operasi: arus kas dari kegiatan utama pemerintah.
- b. Aktivitas investasi: arus kas dari perolehan dan pelepasan aset non-keuangan.
- c. Aktivitas pendanaan: arus kas dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

Laporan ini berguna untuk menilai likuiditas dan solvabilitas pemerintah dalam jangka pendek (Nordiawan & Hertianti, 2016).

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan ini menggambarkan perubahan ekuitas pemerintah selama satu periode pelaporan. Ekuitas pemerintah dapat berubah karena adanya surplus/defisit dari laporan operasional, koreksi kesalahan, atau kebijakan akuntansi baru. Komponen utama LPE:

- a. Ekuitas awal,
- b. Surplus atau defisit-LO,
- c. Koreksi kesalahan periode sebelumnya,
- d. Ekuitas akhir.

Laporan ini membantu pengguna memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kekayaan bersih pemerintah (Bastian, 2015).

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK merupakan bagian integral dari laporan keuangan yang menjelaskan dan melengkapi informasi kuantitatif yang disajikan dalam laporan utama. Isi CaLK meliputi:

- a. Penjelasan kebijakan akuntansi yang digunakan;
- b. Rincian tambahan dari pos-pos yang tercantum dalam laporan keuangan;
- c. Informasi tambahan seperti komitmen, kontinjensi, atau kejadian penting setelah tanggal neraca.

CaLK berfungsi untuk meningkatkan pemahaman, keandalan, dan transparansi laporan keuangan pemerintah (Mardiasmo, 2018). Ketujuh komponen laporan keuangan pemerintah tidak berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan satu sama lain. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan pelaksanaan anggaran berbasis kas, sedangkan Laporan Operasional dan Neraca disusun berbasis akrual untuk menunjukkan kinerja dan posisi keuangan secara lebih menyeluruh. CaLK berfungsi sebagai penjelasan atas seluruh laporan tersebut, sehingga membentuk satu kesatuan laporan keuangan yang utuh dan informatif.

Kesimpulan

Akuntansi pemerintahan memiliki peran sentral dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan tujuan utamanya yang berfokus pada pelayanan publik dan pertanggungjawaban kepada rakyat, sistem akuntansi ini menjadi landasan penting bagi penyusunan kebijakan keuangan, pengawasan, serta evaluasi kinerja pemerintah.

Ruang lingkup akuntansi pemerintahan mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan pencatatan, pelaporan, dan pengawasan transaksi keuangan di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah. Akuntansi pemerintahan tidak hanya berfokus pada pengelolaan anggaran, tetapi juga pada pencatatan aset, kewajiban, serta kegiatan pembiayaan.

Dengan ruang lingkup yang luas dan kompleks, sistem akuntansi pemerintahan menjadi instrumen vital dalam mewujudkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Informasi akuntansi pemerintahan berperan penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Melalui penyajian laporan keuangan yang akurat, relevan, dan transparan, pemerintah dapat memenuhi tuntutan akuntabilitas publik serta menyediakan dasar bagi pengambilan keputusan yang efektif. Pengguna informasi ini tidak hanya berasal dari lingkungan internal, tetapi juga mencakup pihak eksternal seperti legislatif, lembaga pemeriksa, masyarakat, dan lembaga internasional.

Oleh karena itu, sistem akuntansi pemerintahan harus mampu menghasilkan informasi. Entitas pelaporan merupakan unsur penting dalam sistem akuntansi sektor publik karena berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan pemerintah. Melalui entitas pelaporan, pemerintah dapat mewujudkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang baik (*good governance*).

Kehadiran entitas pelaporan memastikan bahwa seluruh kegiatan dan transaksi keuangan pemerintah tercatat, dilaporkan, dan dapat diaudit secara menyeluruh oleh pihak yang berwenang.

Pelaporan keuangan sektor publik memiliki peranan yang sangat strategis dalam sistem tata kelola pemerintahan. Melalui pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel, pemerintah dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara kepada publik serta mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.

Komponen laporan keuangan pemerintah merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam menggambarkan kinerja, posisi, dan tanggung jawab keuangan pemerintah kepada publik. Laporan-laporan tersebut disusun berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan relevansi informasi, sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dengan adanya laporan keuangan yang lengkap, pemerintah dapat menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola yang baik (*good governance*) serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.

Daftar Pustaka

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS)*. Jakarta: BPK RI.
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 (LKPP)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2015). *Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua*. Jakarta: KSAP.
- Mahmudi. (2019). *Akuntansi Pemerintahan: Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik: Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5.
- Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49.
- Sutaryo & Halim, A. (2016). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara.

Wildan, T. (2021). *Sistem Akuntansi Pemerintahan: Teori dan Aplikasi*.
Bandung: Alfabeta.

PROFIL PENULIS




Tri Cahyo Nugroho, S.E., M.Ak.

Penulis lahir di Surakarta, Jawa Tengah 05 Desember 1976. Dari pasangan Bapak Sri Joko Pujiyanto, B.Sc. (Alm.) dan Ibu Sri Yamti dan Istri Lynda Farida, S.E. Telah dikaruniai putra Fawwaz Fadhel Nugroho dan Agra Yama Nugroho serta putri Syaza Khairana Nugroho. Ketertarikan penulis pada bidang akuntansi dimulai semenjak SMA sehingga mengambil jurusan IPS di SMA yang penulis tempuh.

Pendidikan yang pernah ditempuh SMA 01 Sukoharjo lulus tahun 1995, Diploma III Akuntansi FEB Universitas Gadjah Mada Yogyakarta lulus tahun 1999 S1 Universitas Muhammadiyah Tangerang lulus tahun 2014 serta menyelesaikan studi S2 Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Esa Unggul Jakarta, lulus tahun 2017. Penulis menjadi dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Raharja Tangerang prodi Akuntansi sejak tahun 2019 hingga sekarang, juga pernah menjadi praktisi pada perusahaan swasta manufaktur di Tangerang selama dua dekade, pernah berkarir di departemen *Planning roduction and Inventory Control, Logistic* dan *Costing*. Penulis juga menghasilkan karya ilmiah berupa jurnal- jurnal ilmiah nasional terindeks SINTA.

Email Penulis:


tricahyo.nugroho@raharja.info/nugroholf76@gmail.com.



BAB 4

REGULASI DAN STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Dr. Susilaningtyas Budiana Kurniawati, S.E., M.Si.
Universitas Tunas Pembangunan Surakarta



Perkembangan Akuntansi Sektor Publik

Sejarah menunjukkan bahwa cikal bakal akuntansi sektor publik yaitu akuntansi kuno yang pada waktu itu belum terstruktur seperti saat ini. Akuntansi kuno secara khusus ditujukan untuk mengelola keuangan kerajaan atau pemerintahan yang tidak berorientasi pada profit seperti akuntansi swasta modern, sehingga tujuannya sangat relevan dengan fungsi sektor publik.

Akuntansi kuno dapat ditemukan pada berbagai peradaban jaman dahulu antara lain pada masa mesopotamia dan sumeria sekitar 3.000 tahun sebelum masehi. Pada waktu itu mulai muncul sistem pencatatan transaksi mengenai jumlah panen hasil pertanian dan hasil ternak. Pencatatan tersebut dilakukan untuk menghitung pajak, utang dan hasil perdagangan.

Selanjutnya pada masa mesir kuno menerapkan pencatatan dengan menggunakan papyrus dan hieroglif untuk menghitung pajak dan transaksi keuangan. Pada waktu itu akuntansi digunakan Firaun sebagai alat kontrol mengawasi kekayaan dan sumber daya kerajaan. Pada masa Yunani kuno pencatatan akuntansi lebih terorganisir untuk mengelola aset publik dan mengumpulkan pajak.

Pada waktu itu sudah ada buku besar primitif untuk mencatat kas, aset dan berbagai pengeluaran yang menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran pencatatan akuntansi sekedar inventarisir menjadi bentuk yang lebih luas berupa akuntansi pertanggungjawaban. Pada masa Romawi Kuno akuntansi sudah dikembangkan sebagai sistem yang lebih kompleks. Hukum Romawi mewajibkan pembayar pajak untuk membuat laporan posisi keuangan. Saat itu sudah mulai mengenal semacam buku kas bulanan yang mencatat penerimaan dan pengeluaran. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi tidak semata-mata melacak kekayaan melainkan juga untuk menjalankan hukum yang berlaku dan fungsi administratif.

Secara umum tujuan akuntansi kuno bertujuan untuk akuntabilitas kepada penguasa, pengendalian anggaran dan pencatatan transaksi publik. Selanjutnya walaupun akuntansi kuno memiliki tujuan yang serupa dengan akuntansi sektor publik modern, namun dapat dibedakan dalam hal basis pencatatan yang mana

Tabel 4.1: Perbedaan Organisasi Nirlaba dan Sektor Publik

NO	ASPEK	ORGANISASI NIRLABA	SEKTOR PUBLIK (PEMERINTAH)
1	Kategori Entitas	Organisasi Nirlaba (Yayasan, LSM, Perkumpulan, Partai Politik, Organisasi keagamaan, Sekolah entitas nirlaba, Organisasi profesi)	Entitas Pemerintah (Kementerian, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara)
2	Standar Akuntansi	Menggunakan ISAK 35 bagian dari SAK (Standar Akuntansi Keuangan)	Menggunakan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan)
3	Dasar Hukum	UU No. 16/2001, UU No. 16/2017 dan regulasi lain terkait organisasi nirlaba	UU No. 17/2003, UU No. 1/2004, UU No. 15/2004
4	Lembaga Pengatur	Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menyusun standar. Pengaturan legal dilakukan oleh berbagai kementerian	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang berada dibawah Kementerian Keuangan
5	Tujuan Akuntansi	Menyajikan informasi keuangan yang transparan kepada donatur, anggota, dan publik	Menyajikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana publik (pajak) kepada rakyat dan lembaga legislatif

Sumber: Deby, 2025; Pranata, 2024; Salamah, 2024; Sari, 2024.

Upaya perbaikan dan penyesuaian standar akuntansi sektor publik dilakukan untuk memastikan standar yang dihasilkan relevan, dapat diterapkan dan akuntabel. Tahapan yang dilakukan oleh KSAP dalam menyusun standar akuntansi pemerintahan (SAP) dilakukan dalam beberapa tahapan untuk memastikan SAP disusun berdasarkan kajian ilmiah, masukan dari berbagai pihak, dan selaras dengan praktik secara internasional. Tahap awal diawali dengan identifikasi isu standar yang dimulai ketika ada kebutuhan untuk menyusun atau

merevisi standar akuntansi yang sudah ada apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan.

KSAP kemudian membentuk tim khusus berupa kelompok kerja (Pokja) yang terdiri dari para ahli akuntansi dari berbagai instansi. Kelompok kerja dimaksud kemudian menyusun draft standar berdasarkan hasil riset termasuk studi perbandingan dengan standar internasional. Setelah itu KSAP meninjau dan membahas semua masukan yang diterima dari publik untuk menyempurnakan draft standar yang telah dibuat. Selanjutnya KSAP melakukan pembahasan dan finalisasi dengan meninjau dan membahas semua masukan yang diterima dari publik. Kemudian *draft* final disetujui oleh anggota KSAP untuk disahkan dan diterbitkan secara resmi.

Standar yang telah diterbitkan menjadi pedoman yang wajib digunakan oleh seluruh entitas pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan (Marliani, 2025; Pranata, 2024; Salamah, 2024). Pengawasan implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di tingkat Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sebagai unit pengawas internal yang berada di setiap kementerian dan lembaga negara. Inspektorat Jenderal bertugas melakukan pengawasan internal untuk memastikan pengelolaan keuangan di bawah kementerian/lembaga sesuai dengan SAP dan peraturan yang berlaku. Peran Inspektorat Jenderal di tingkat daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

Selain itu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai lembaga pengawas internal pemerintah di bawah presiden berperan sebagai pembina dan auditor internal yang memberikan asistensi teknis dan pendampingan untuk memastikan sistem akuntansi dan pengendalian internal berjalan dengan baik. BPKP memiliki perwakilan di daerah yang berperan sebagai pembina dan auditor internal di tingkat daerah.

Selanjutnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pengawas eksternal tertinggi di Indonesia memiliki kewenangan konstitusional untuk mengaudit laporan keuangan pemerintah pusat termasuk seluruh kementerian, lembaga, dan BUMN. Meskipun berstatus sebagai lembaga negara, BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi yang bertugas mengaudit laporan keuangan pemerintah daerah

(provinsi, kabupaten, dan kota). Audit BPK dilakukan berdasarkan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang temuannya dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan.

Selain itu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI juga memiliki fungsi pengawasan politik terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan oleh presiden. Di tingkat daerah fungsi pengawasan serupa dengan yang dilakukan DPR RI dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang melakukan pengawasan politik terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan oleh kepala daerah. Meskipun DPR RI dan DPRD tidak melakukan audit teknis, namun memiliki fungsi pengawasan sangat penting dalam sistem *check and balance* (Pranata, 2024; Salamah, 2024).

Daftar Pustaka

- Deby, Rinjani, D. F., Haryadi, S., Yusmaniarti. (2025). Perkembangan Teori Akuntansi: Tantangan dan Peluang di Era Digital. *Jurnal Akuntansi Keuangan Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*. Vol. 2. No. 3. <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i3.1627>.
- Huwaidah, H., Huwaidah, S., Alviyanto, F., Aji, Gunawan. (2024). Sejarah Akuntansi Dan Perkembangan Akuntansi Di Era Revolusi Industri 4.0. Kampus Akademik Publishing. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*. Vol. 2 No. 6. DOI: <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1550>.
- Marliani, L., Henriyani, E., Djadjuli, R. D. (2025). Paradigma Administrasi Publik Dalam Teori dan Praktek. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*. Vol. 12. No. 2. <https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/download/20864/pdf>.
- Pranata, Y. (2024). Perkembangan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Implementasi Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*. Vol. 1. No. 3. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i3.473>.
- Salamah, R., Fikriyah, U., Mahardhika, K., Hidayati, N. R., Aji, G. (2024). Sejarah Perkembangan Akuntansi di Indonesia. *Gemilang: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*. Vol. 4. No. 3. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v4i3.1467>.
- Sari, N. P. (2024). Evaluasi Kebijakan Adopsi IPSAS di Indonesia: Sebuah Kajian Empiris. *Jurnal Manajemen dan Usahawan Indonesia*. Vol. 47. No. 1. <https://doi.org/10.7454/jmui.v47i1.1085>.

PROFIL PENULIS




Dr. Susilaningtyas Budiana Kurniawati, S.E., M.Si.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu ekonomi akuntansi dimulai sejak penulis memutuskan untuk memilih kuliah jurusan akuntansi hingga berhasil menyelesaikan pendidikan sampai tingkat S3 di Program Doktorat Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan predikat lulusan terbaik (*cumlaude*).

Pada saat menempuh jenjang pendidikan di perguruan tinggi, penulis sempat bekerja sebagai *staff accounting & finance* di CV. Prima Food Surakarta dilanjutkan bekerja sebagai auditor di Kantor Akuntansi Publik untuk menerapkan ilmu akuntansi yang telah dipelajari. Sampai akhirnya setelah penulis lulus pendidikan doktoral kemudian memutuskan untuk menjadi dosen di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Penulis memiliki kepakaran dibidang akuntansi sektor publik dan UMKM. Saat ini penulis aktif dalam melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai bidang kepakaran dengan pendanaan dari internal perguruan tinggi dan dari Basis Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (BIMA) Kemdiktisaintek. Penulis juga aktif menulis buku sebagai bentuk kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta untuk meningkatkan derajat pendidikan di masyarakat khususnya di bidang ilmu akuntansi publik dan UMKM.

Email Penulis: susilaningtyas.kurniawati@lecture.utp.ac.id.



BAB 5

LINGKUNGAN DAN

AKUNTABILITAS

SEKTOR PUBLIK

Rifki Abdul Malik, S.E., Ak., M.Ak.
Universitas Galuh

.



Pendahuluan

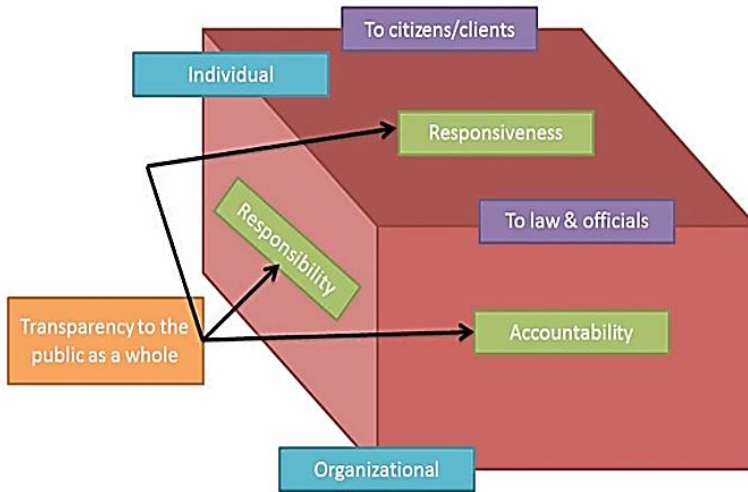
Globalisasi dan industrialisasi telah memengaruhi banyak aspek kehidupan dalam beberapa dekade terakhir, menimbulkan tantangan lingkungan dan ekonomi. Dampak positif dari aktivitas ekonomi meliputi peningkatan pendapatan nasional, penciptaan lapangan kerja baru, dan kemajuan teknologi.

Di sisi lain, dampaknya terhadap lingkungan seringkali menimbulkan kekhawatiran serius. Konsekuensi yang seringkali diabaikan antara lain isu-isu seperti polusi udara, degradasi ekosistem, limbah industri, dan kenaikan suhu global. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa inisiatif pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi selaras. Perusahaan memiliki tanggung jawab besar untuk mengurangi dampak lingkungan dari operasi mereka karena mereka merupakan pemain penting dalam dinamika ekonomi.

Metode Akuntansi Hijau merupakan solusi yang relevan dan kreatif dalam hal ini. Tujuan akuntansi hijau adalah memasukkan pertimbangan lingkungan ke dalam sistem akuntansi organisasi. Metode ini memungkinkan pencatatan sistematis dan pelaporan publik atas berbagai biaya lingkungan, termasuk pengelolaan limbah, inisiatif konservasi sumber daya, dan mitigasi emisi karbon (Michie, 1994).

Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap bisnis merupakan keuntungan utama penerapan akuntansi hijau. Perusahaan yang mencantumkan isu lingkungan dalam laporan keuangannya tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat merek mereka di pasar yang semakin kompetitif. Bisnis yang mengutamakan keberlanjutan semakin mendapatkan dukungan dari investor dan pelanggan.

Oleh karena itu, akuntansi hijau merupakan alat strategis untuk menambah nilai bagi bisnis. Mengingat masalah serius terkait kerusakan lingkungan, terdapat urgensi yang semakin meningkat di Indonesia untuk mengadopsi Akuntansi Hijau. Mengingat kekayaan sumber daya alam negara ini, pengelolaan sumber daya yang bijaksana sangatlah penting. Salah satu cara praktis untuk mendorong bisnis menerapkan Akuntansi Hijau adalah dengan menerapkan program pemerintah seperti PROPER.



Gambar 5.1: Dari Akuntabilitas Menuju Transparansi

Sumber: Diadaptasi dari Gortner, Nichols dan Ball, 2007:195.

Transparansi, akuntabilitas, pengendalian, tanggung jawab, dan daya tanggap merupakan beberapa aspek akuntabilitas. Definisi pertama transparansi adalah kemudahan memperoleh informasi mengenai operasional dan kinerja suatu organisasi. Kedua, akuntabilitas menggambarkan prosedur yang menjamin individu dan/atau organisasi bertanggung jawab atas tindakan dan upaya mereka, memberikan sanksi atas pelanggaran dan memberikan penghargaan atas keunggulan.

Faktor ketiga adalah pengendalian, yang menggambarkan kondisi dimana organisasi memenuhi tujuan utamanya dengan tepat. Faktor keempat adalah tanggung jawab, yang menunjukkan kepatuhan organisasi terhadap persyaratan hukum yang relevan. Faktor kelima adalah daya tanggap, yang merupakan minat dan upaya organisasi untuk memenuhi harapan penting para pemangku kepentingan, yang terwujud dalam keinginan dan tuntutan yang dinyatakan dengan jelas. Pertanyaan utama tentang faktor penentu ini ditunjukkan dalam tabel di bawah.

Tabel 5.1: Pertanyaan Kunci Determinan Dimensi Akuntabilitas

No.	Dimensi Akuntabilitas	Pertanyaan Kunci Determinan
1	Transparansi	Apakah organisasi mengungkapkan fakta-fakta tentang kinerjanya?
2	Pertanggung jawab	Apakah organisasi menghadapi konsekuensi atas kinerjanya?
3	Pengendalian	Apakah organisasi melakukan apa yang diharapkan?
4	Tanggung jawab	Apakah organisasi mengikuti aturan yang berlaku?
5	Responsivitas	Apakah organisasi memenuhi harapan substantif yang disampaikan dalam bentuk kebutuhan dan permintaan?

Sumber: Aman, Al-Shbail, dan Mohammed, 2013:17.

Kesimpulan

Pengkajian berbagai aspek akuntabilitas, seperti transparansi, akuntabilitas, pengendalian, tanggung jawab, dan responsivitas, mengarah pada kesimpulan bahwa organisasi sektor publik umumnya gagal menunjukkan tingkat akuntabilitas yang optimal.

Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan organisasi sektor publik untuk sepenuhnya menjustifikasi penggunaan sumber daya publik dalam menjalankan operasi, kebijakan, program, dan proyek rutin mereka. Tidak ada organisasi sektor publik di negara demokrasi seperti Indonesia yang mampu mengabaikan akuntabilitas.

Di masa depan, organisasi publik dapat mengelola berbagai kegiatan, termasuk masukan, proses, keluaran, dan hasil, serta bagaimana lingkungan bereaksi terhadap hasil-hasil ini, dengan menggunakan dimensi akuntabilitas sebagai dasar. Dengan memahami aspek-aspek akuntabilitas, organisasi publik akan mampu mempertanggungjawabkan diri kepada publik dan meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Ball, C., Gortner, H., & Nichols, K. (2007). *Organization Theory: A Public And Nonprofit Perspective*.
- Lægneid, P., Christensen, T., Røvik, K., & Roness, P. (2007). Organization Theory and the Public Sector: Instrument, Culture and Myth. In *Organization Theory and the Public Sector: Instrument, Culture and Myth*. <https://doi.org/10.4324/9780415449014>.
- Michie, J. (1994). Managing the public sector. *International Review of Applied Economics*, 8, 333-335. <https://doi.org/10.1080/758525164>.
- Osborne, & David T. (1992). Reinventing Government. *League for Innovation in the Community Coll.*
- Osborne, S. P. (2010). *The New Public Governance*. Routledge.
- Ramos, C. (2019). The politics of bureaucracy: A view from Latin America. *The British Journal of Politics and International Relations*, 21, 136914811984449. <https://doi.org/10.1177/1369148119844498>.
- Starling, G. (2007). *Managing The Public Sector*. Cengage Learning. <https://books.google.co.id/books?id=k2MJzgECAAJ>.


PROFIL PENULIS



Rifki Abdul Malik, S.E., Ak., M.Ak.

Penulis lahir di Ciamis Jawa Barat tanggal 10 juli 1994. Penulis adalah dosen tetap di Universitas Galuh, Fakultas Ekonomi pada Program Studi Akuntansi. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Gunadarma pada jurusan Akuntansi, S1 Program profesi Akuntansi di Universitas Widyatama, dan S2 Magister Akuntansi di Universitas Widyatama. Penulis sudah menulis *chapter books* seperti Desain Riset Akuntansi Berbasis Inovasi, Buku referensi Akuntansi Pajak: Strategi Perencanaan dan Pelaporan Pajak dalam Bisnis, serta *chapter books* Akuntansi Pemerintahan dan Perpajakan.

Email Penulis: rifkiabdulmalik@unigal.ac.id.



BAB 6

PERENCANAAN KEUANGAN PUBLIK: APBN DAN APBD

Siti Hartinah, S.E., M.Ak.
Universitas Muhammadiyah Jakarta



Pendahuluan

Secara umum, Perencanaan Keuangan Negara dapat didefinisikan sebagai proses sistematis dan terintegrasi dalam menentukan kebijakan, mengidentifikasi sumber daya, dan mengalokasikan dana untuk membiayai seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan dalam periode waktu tertentu, demi mencapai tujuan negara.

Anggaran ini merupakan cerminan dari kebijakan publik dan prioritas pembangunan. Pemerintah dapat menetapkan APBN dan APBD untuk menetapkan dana negara akan dikelola untuk mendukung keperluan dan program pelayanan kepada masyarakat, yang terdiri dari seberapa besar pendapatan yang diperoleh dan pengeluaran yang diperlukan.

Perencanaan keuangan negara merupakan inti dari manajemen fiskal suatu negara, yang diwujudkan melalui dua instrumen utama: Pada Tingkat Negara atau Pusat yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tingkat pusat dan pada Tingkat daerah itu sendiri yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

1. Definisi APBN

APBN merupakan jenis perencanaan keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Masa berlaku tahun anggaran adalah satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

2. Fungsi APBN

APBN berfungsi sebagai detail data keuangan negara yang mencakup program kerja yang terdiri dari pendapatan dan pengeluaran pemerintah dalam suatu tahun periode anggaran, bukan hanya angka saja tapi program kerja yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun fungsi APBN sebagai berikut:

a. Fungsi Otorisasi

Fungsi otorisasi sebagai dasar bagi pemerintah dalam menjalankan program pendapatan dan belanja negara yang

terjadi pada tahun tersebut. Pengeluaran tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan. Perencanaan keuangan negara memberikan legitimasi dan otorisasi atas segala aktivitas penerimaan dan pengeluaran.

- 1) Dasar Hukum Pengeluaran (Fungsi Otorisasi): merupakan dasar hukum tertinggi bagi pemerintah untuk membelanjakan uang negara yang disahkan dalam Undang-undang. Tanpa perencanaan ini, setiap pengeluaran akan ilegal dan tidak memiliki akuntabilitas.
 - 2) Kepatuhan: Perencanaan memastikan bahwa hak negara untuk memungut pajak dan kewajiban untuk membiayai layanan publik dijalankan sesuai konstitusi dan peraturan yang berlaku.
- b. Fungsi Perencanaan
- Fungsi perencanaan sebagai pedoman anggaran APBN dalam menentukan kegiatan program kerja pendapatan dan belanja yang terjadi pada tahun bersangkutan. Anggaran diharapkan dapat membantu mengalokasikan sumber daya secara efisien.
- c. Fungsi Pengawasan
- Fungsi pengawasan menganggap Anggaran negara dijadikan sebagai pedoman anggaran dalam menentukan dan mengukur kegiatan program kerja pemerintah negara sudah sesuai atau tidak dengan kebijakan yang telah ditentukan dalam UU tentang APBN.
- d. Fungsi Alokasi
- Fungsi alokasi menyatakan bahwa Anggaran negara dapat ditujukan untuk meminimalisir terjadi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Perencanaan memaksa pemerintah untuk menetapkan prioritas, memastikan sumber daya yang terbatas dialokasikan ke sektor yang paling membutuhkan.
- 1) Keterkaitan Pembangunan: perencanaan keuangan menjamin adanya keterkaitan antara RPJM merupakan rencana Pembangunan jangka menengah dengan anggaran yang ditetapkan setiap tahunnya. Dana akan diarahkan secara tegas pada sektor-sektor prioritas seperti:

- b. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (Saat ini UU No. 23 Tahun 2014). Undang-undang ini memberikan kewenangan otonomi kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk kewenangan dalam mengelola keuangannya (perencanaan APBD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: Ini adalah aturan teknis paling penting untuk penyusunan dan penetapan APBD. PP ini mengatur seluruh proses mulai dari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) hingga penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.


3. Struktur APBD

Struktur APBD juga terdiri dari tiga komponen utama:

- a. Anggaran Pendapatan Daerah (Penerimaan):
 - 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD): Sumber pendapatan yang dikumpulkan sendiri oleh daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah).
 - 2) Dana Perimbangan (Transfer dari Pemerintah Pusat): Dana yang bersumber dari APBN, meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah: Hibah, Dana Darurat, dan lain-lain.
- b. Anggaran Belanja Daerah (Pengeluaran):
 - 1) Belanja Operasi: belanja untuk kegiatan sehari-hari (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial).
 - 2) Belanja Modal: pengeluaran untuk perolehan aset tetap (tanah, peralatan, gedung, jalan, irigasi).
 - 3) Belanja Tak Terduga: belanja yang tidak dianggarkan sebelumnya, seperti penanggulangan bencana.

- 4) Transfer: pemberian uang/barang kepada pihak lain (misalnya Dana Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan).
- c. Pembiayaan Daerah:
- 1) Penerimaan Pembiayaan: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Penerimaan Pinjaman Daerah.
 - 2) Pengeluaran Pembiayaan: Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Pokok Utang.

Berikut ini adalah bentuk postur APBD salah satu provinsi yaitu Provinsi Banten sebagai berikut:



DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
PROVINSI BANTEN

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	3.514.711.691
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	1.005.585.224
1. DBH Pajak	1.003.761.662
a. Pajak Penghasilan	993.693.982
b. Pajak Bumi dan Bangunan	6.933.057
c. Cukai Hasil Tembakau	3.134.623
2. DBH Sumber Daya Alam	916.688
a. Migas	-
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	379.265
c. Kehutanan	166.605
d. Perikanan	-
e. Panas Bumi	370.818
3. DBH Lainnya	906.874
a. Perkebunan Sawit	906.874
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.176.704.913
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	809.119.261
2. DAU ditentukan penggunaannya	367.585.652
a. Penggajian Formasi PPPK	218.133.328
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	94.757.611
d. Bidang Kesehatan	45.189.257
e. Bidang Pekerjaan Umum	9.505.456
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.325.932.261
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	185.529.932
a. Pendidikan	118.520.052
b. Kesehatan	4.702.500
c. Konektivitas	35.853.221
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	18.505.510
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	6.175.000
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	1.773.649
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	1.140.402.329
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	778.812.926
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	331.084.572
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	18.569.584
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	200.000
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perjustakan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	6.694.587
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	4.640.000
D. Dana Desa	-
E. Insentif Fiskal	6.489.293

Gambar 6.2: Bentuk Postur APBD Provinsi Banten
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2025.

4. Siklus APBD

Siklus APBD mirip dengan APBN, namun melibatkan Pemerintah Daerah dan DPRD:

- a. Perencanaan dan Penganggaran (Tahun T-1):
 - 1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
 - 2) Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
 - 3) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD).
- b. Pembahasan dan Penetapan (Tahun T-1):
 - 1) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD dan Nota Keuangan diajukan kepala daerah kepada DPRD.
 - 2) Pembahasan dan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
 - 3) Ranperda APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD (paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran dimulai).
- c. Pelaksanaan (Tahun T):
 - 1) Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjelasan APBD.
 - 2) SKPD melaksanakan program kerja dan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran (DPA-SKPD).
- d. Pengawasan dan Pertanggungjawaban (Tahun T dan T+1):
 - 1) Pengawasan oleh Inspektorat Daerah dan BPK Perwakilan Daerah.
 - 2) Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
 - 3) Penyampaian Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Perhitungan APBD) kepada DPRD, yang disahkan menjadi Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Perbedaan APBN dan APBD

Jika dilihat dari penjelasan sebelumnya mengenai APBN dan APBD dapat disimpulkan bahwa APBN dan APBD memiliki perbedaan yang signifikan. Berikut ini tabel perbedaan APBN dan APBD sebagai berikut:

Tabel 6.2: Perbedaan APBN dan APBD

Aspek	APBN (Pusat)	APBD (Daerah)
Ruang Lingkup	Nasional (Seluruh Indonesia)	Regional (Provinsi, Kabupaten/Kota)
Penanggung Jawab	Pemerintah Pusat (Presiden dibantu Menkeu)	Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dibantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah)
Lembaga Legislatif	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Produk Hukum	Undang-Undang (UU)	Peraturan Daerah (Perda)
Sumber Utama Pendapatan	Pajak Pusat (PPH, PPN, Cukai) dan PNBP	PAD merupakan Pajak dan Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan
Transfer	Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)	Tidak ada transfer ke entitas di atasnya.

Sumber: Diolah Penulis.

Daftar Pustaka

- Atmadja, A. P. S. (2014). *Aktualisasi Hukum Keuangan Publik*. Bandung: Mujahid Press.
- Bahrullah, A., Primastuti, A., Asri, J. D., & Agustina, I. (2022). *Perencanaan Keuangan Publik*. Bandung: Cendekia.
- Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. (2020). *Akuntansi Pemerintahan: Pengantar, Praktik, dan Perkembangannya*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (SAP Berbasis Akrual)* (Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Revisi). Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Andi.
- Noerdiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertiani. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.
- Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- SAP Berbasis Akrual Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.
- UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

PROFIL PENULIS



Siti Hartinah, S.E., M.Ak.

Keterarikan penulis terhadap ilmu Akuntansi dimulai pada tahun 2006 silam. Hal ini yang mendorong penulis dalam memilih untuk masuk ke Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi lulus pada tahun 2010. Meskipun tidak sejalan dengan Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam yang penulis tempuh di SMA Negeri 1 Serang.

Penulis kemudian bekerja di Bank Swasta selama 1 tahun dan berhenti karena ditawari menjadi Asisten Dosen Tahun 2011 di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selain itu, penulis juga diperbantukan menjadi staf Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian, melanjutkan Pendidikan program S2 Universitas Muhammadiyah Jakarta dan berhasil menyelesaikan studi S2 di prodi Magister Akuntansi pada tahun 2018. Pada tahun 2018, Penulis diangkat sebagai Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Jakarta dan bertugas di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Penulis memiliki kepakaran dibidang Akuntansi Keuangan, Perpajakan dan Pemeriksaan Akuntansi. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi kecerdasan bangsa dan negara serta bermanfaat bagi Masyarakat luas.

Email Penulis: siti.hartinah@umj.ac.id.



BAB 7

AKUNTANSI ANGGARAN

Dr. Siti Nur Reskiyawati Said, S.E., M.Si.
Universitas Negeri Makassar



Pengertian Akuntansi Anggaran

Akuntansi anggaran merupakan suatu teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang sangat fundamental dalam pengelolaan keuangan sektor publik, khususnya dalam lingkup pemerintahan pusat. Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023, akuntansi anggaran berfungsi untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, serta pembiayaan pemerintah agar sesuai dengan anggaran yang telah disusun, disahkan, dan dialokasikan secara formal.

Secara esensial, akuntansi anggaran adalah sistem pencatatan dan pelaporan yang digunakan untuk mengawasi dan mengendalikan realisasi anggaran agar tetap sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh otoritas legislatif dan eksekutif. Sistem ini memungkinkan pemerintah untuk melakukan pencatatan secara sistematis terhadap komitmen, pengeluaran, penerimaan, dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan anggaran yang berlaku.

Akuntansi anggaran tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, melainkan juga sebagai instrumen pengendalian yang menjamin penggunaan dana publik dilakukan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, akuntansi anggaran menjadi salah satu pilar utama dalam pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas di sektor publik.

Fungsi dan Tujuan Akuntansi Anggaran

Menurut Mardiasmo (2020), akuntansi anggaran berfungsi sebagai alat utama dalam sistem pengendalian keuangan pemerintah dan organisasi sektor publik. Fungsi utamanya adalah mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan semua transaksi yang berhubungan dengan anggaran.

Dengan sistem ini, organisasi dapat memantau realisasi anggaran secara sistematis, sehingga memudahkan dalam mengendalikan penggunaan dana agar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Selain itu, akuntansi anggaran juga memberikan informasi penting bagi pengambilan keputusan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

1. Legalitas: anggaran harus didasarkan pada peraturan dan otorisasi hukum yang jelas agar pelaksanaannya sah.
2. Transparansi: proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran harus terbuka sehingga publik dan pemangku kepentingan dapat mengakses informasi keuangan.
3. Disiplin Fiskal: pengeluaran harus dijaga agar tidak melebihi kemampuan keuangan agar stabilitas fiskal terjaga.
4. Fleksibilitas: anggaran harus cukup adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan kebutuhan organisasi.

Peran Akuntansi Anggaran Dalam Pengambilan Keputusan

Akuntansi anggaran merupakan alat penting yang digunakan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Informasi yang disediakan oleh akuntansi anggaran membantu manajemen merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan organisasi secara efektif.

1. Perencanaan Strategis dan Operasional

Menurut Horngren *et al.* (2013), anggaran adalah “rencana keuangan yang diungkapkan dalam bentuk kuantitatif yang menghubungkan tujuan organisasi dengan kegiatan operasionalnya” (hlm. 456). Dengan anggaran, manajemen dapat menetapkan sasaran dan merinci aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Pengendalian Kinerja

Garrison, Noreen, dan Brewer (2018) menegaskan bahwa “anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajer membandingkan hasil aktual dengan anggaran yang telah ditetapkan dan mengambil tindakan korektif bila diperlukan” (hlm. 523). Hal ini mempermudah manajemen untuk memantau dan menyesuaikan kinerja organisasi secara tepat waktu.

3. Pengambilan Keputusan Operasional dan Investasi

Hilton dan Platt (2013) menyatakan bahwa “data anggaran memberikan dasar yang andal bagi manajemen dalam mengambil keputusan operasional maupun investasi dengan memprediksi

sumber daya yang diperlukan dan potensi hasilnya” (hlm. 389). Dengan demikian, keputusan bisnis menjadi lebih terinformasi dan terukur.

4. Komunikasi dan Koordinasi Antar Bagian

Horngren *et al.* (2013) juga menggarisbawahi bahwa “proses penyusunan anggaran memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar berbagai bagian organisasi sehingga meningkatkan sinergi dan konsistensi dalam pelaksanaan rencana” (hlm. 460).

Tantangan dan Masalah Dalam Akuntansi Anggaran

1. Kesalahan Umum Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran

Kesalahan dalam penyusunan anggaran sering kali terjadi karena asumsi yang kurang realistis, data yang tidak akurat, atau kurangnya keterlibatan berbagai pihak terkait. Menurut Garrison, Noreen, dan Brewer (2018), “anggaran yang tidak didasarkan pada data yang valid dapat menyebabkan perencanaan yang salah dan pengambilan keputusan yang tidak tepat” (hlm. 510). Selain itu, dalam pelaksanaan, kurangnya pengawasan dan ketidakpatuhan terhadap anggaran dapat menyebabkan penyimpangan yang signifikan dari rencana awal.

2. Hambatan Implementasi Akuntansi Anggaran

Implementasi akuntansi anggaran seringkali menghadapi berbagai hambatan seperti resistensi dari staf, kurangnya pelatihan, dan keterbatasan sistem teknologi informasi. Hilton dan Platt (2013) menjelaskan bahwa “hambatan budaya organisasi dan keterbatasan infrastruktur teknologi merupakan faktor utama yang menghambat efektivitas sistem akuntansi anggaran” (hlm. 420). Hal ini menyebabkan proses penganggaran menjadi kurang efisien dan sulit diintegrasikan dalam pengambilan keputusan sehari-hari.

3. Etika Dalam Penyusunan dan Pelaporan Anggaran

Aspek etika juga menjadi tantangan penting dalam akuntansi anggaran. Praktik manipulasi anggaran seperti padding budget (menambah anggaran secara tidak perlu) dapat menyesatkan

manajemen dan pemangku kepentingan. Horngren et al. (2013) menyatakan bahwa “integritas dan transparansi dalam penyusunan anggaran sangat penting agar anggaran dapat menjadi alat yang kredibel dan dapat dipercaya” (hlm. 475). Oleh karena itu, etika profesional harus dijunjung tinggi untuk menghindari penyalahgunaan informasi anggaran.

4. Studi Kasus dan Contoh Praktis

Salah satu contoh penerapan akuntansi anggaran di sektor publik adalah penggunaan anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) di sebuah pemerintah daerah di Indonesia. Sistem ini mengaitkan alokasi anggaran dengan pencapaian target kinerja yang terukur, sehingga setiap unit kerja wajib melaporkan hasil pencapaian programnya.

Hilton dan Platt (2013) menjelaskan bahwa “anggaran berbasis kinerja meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana publik dengan menekankan hasil dan dampak dari program yang dibiayai” (hlm. 450). Dalam kasus ini, pemerintah daerah berhasil meningkatkan efisiensi pelayanan publik dengan melakukan evaluasi berkala terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja, serta menyesuaikan anggaran berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

5. Tantangan Dalam Studi Kasus

Meskipun sistem anggaran berbasis kinerja memberikan banyak manfaat, penerapannya juga menghadapi beberapa hambatan seperti resistensi birokrasi, kurangnya kapasitas sumber daya manusia, dan keterbatasan sistem informasi. Horngren et al. (2013) menyoroti bahwa “tantangan utama dalam penganggaran sektor publik adalah memastikan bahwa data kinerja yang dilaporkan akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan” (hlm. 472).

Daftar Pustaka

- Bastian, I. G. (2021). *Akuntansi Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Garrison, R. H., Noreen, E. W., & Brewer, P. C. (2018). *Managerial Accounting* (16th ed.). McGraw-Hill Education.
- Hilton, R. W., & Platt, D. E. (2013). *Managerial Accounting: Creating Value in a Dynamic Business Environment* (10th ed.). McGraw-Hill Education.
- Horngren, C. T., Sundem, G. L., Elliott, J. A., & Philbrick, D. R. (2021). *Introduction to Financial Accounting* (12th ed.). Pearson.
- Jones, A., & Pendlebury, M. (2022). *Public Financial Management*. Routledge.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Akuntansi Anggaran*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Mardiasmo. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mulyadi. (2019). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Pattaro, A. (2022). *Principles of Public Budgeting and Financial Management*. New York: Academic Press.
- Schick, A. (2021). *The Performing State: Reflection on an Idea Whose Time Has Come*. Routledge.
- Suwardjono. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Wildavsky, A. (2019). *The Politics of the Budgetary Process*. Routledge.

PROFIL PENULIS



Dr. Siti Nur Reskiyawati Said, S.E., M.Si.

Ketertarikan penulis terhadap bidang akuntansi mulai tumbuh sejak tahun 2011. Berbekal minat tersebut, penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Muslim Indonesia dan meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Akuntansi pada tahun 2015. Untuk memperdalam pengetahuan, penulis menempuh pendidikan Magister di Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang diselesaikan pada tahun 2019.

Selanjutnya, penulis menyelesaikan studi doktoral di Program Studi Ilmu Akuntansi Universitas Hasanuddin pada tahun 2025. Penulis memiliki kepakaran di bidang Akuntansi Sektor Publik. Sebagai upaya mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis aktif melakukan penelitian di bidang tersebut. Beberapa penelitian yang dilakukan memperoleh pendanaan dari Kemenristek Dikti serta institusi internal perguruan tinggi. Selain penelitian, penulis juga aktif berkontribusi dalam pengajaran dan pengabdian masyarakat, dengan harapan dapat memajukan ilmu akuntansi di Indonesia.

Email Penulis: siti.nur.reskiyawati@unm.ac.id.



BAB 8

AKUNTANSI UNTUK

PENDAPATAN

Dr. Siti Nur Reskiyawati Said, S.E., M.Si.
Universitas Negeri Makassar



Pendahuluan

Pendapatan dalam sektor publik merupakan salah satu komponen utama yang mendukung keberlangsungan fungsi dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Tanpa pendapatan yang memadai, pemerintah tidak dapat menjalankan berbagai program pembangunan, pelayanan publik, maupun pemeliharaan infrastruktur secara optimal.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas kebutuhan masyarakat dan dinamika ekonomi global, peran pendapatan sektor publik menjadi semakin strategis. Pemerintah dituntut untuk mampu mengelola sumber-sumber penerimaan negara secara efektif agar dapat memenuhi target pembangunan nasional dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam konteks desentralisasi fiskal yang dianut Indonesia, pendapatan sektor publik juga menjadi indikator kemandirian dan kapasitas fiskal suatu daerah dalam mengelola urusan domestiknya.

Pentingnya pendapatan sektor publik tidak hanya terletak pada jumlahnya, tetapi juga pada bagaimana pendapatan tersebut dikelola. Dalam era reformasi birokrasi dan digitalisasi administrasi publik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan menjadi isu krusial. Masyarakat kini semakin kritis terhadap penggunaan dana publik dan menuntut adanya keterbukaan serta pertanggungjawaban atas setiap rupiah yang diterima dan dibelanjakan oleh negara.

Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai sumber-sumber pendapatan, karakteristik, serta mekanisme pengelolaannya menjadi penting tidak hanya bagi aparatur pemerintah, tetapi juga bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh negara benar-benar digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Menurut International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB, 2020), pendapatan sektor publik adalah penerimaan atau hak untuk menerima sejumlah manfaat ekonomi atau sosial yang

kompeten agar proses pengumpulan, pencatatan, dan pelaporan pendapatan dapat berjalan efektif dan efisien. Dengan pengelolaan yang akuntabel, pemerintah dapat menyusun anggaran yang realistis dan melakukan evaluasi kinerja fiskal secara tepat waktu.

Jenis-Jenis Pendapatan di Sektor Publik

Pendapatan di sektor publik berasal dari berbagai sumber yang menjadi tulang punggung pembiayaan aktivitas pemerintahan. Pemahaman yang baik terhadap jenis-jenis pendapatan ini sangat penting dalam upaya pengelolaan keuangan publik yang efektif dan berkelanjutan.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah secara mandiri tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Menurut Fitriani dan Sudirman (2021), PAD mencakup pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

PAD memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian fiskal daerah dan memperkuat otonomi daerah. Namun, Susanto dan Prasetyo (2023) mencatat bahwa PAD seringkali masih terbatas oleh kapasitas daerah dalam mengelola potensi sumber daya lokal dan sistem pemungutan pajak yang belum optimal, sehingga mengakibatkan ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat.

Namun, Susanto dan Prasetyo (2023) mencatat bahwa PAD di banyak daerah masih terbatas karena kurangnya optimalisasi potensi lokal serta lemahnya sistem pemungutan dan pengawasan. Digitalisasi pelayanan pajak daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi strategi penting dalam memperkuat PAD (Harahap & Setyawan, 2021).

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah pendapatan yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat atau sumber lainnya seperti hibah luar negeri. Menurut Lestari dan Hidayat (2022), pendapatan

2. Pendapatan Berbasis Penerimaan Atau Berbasis Akrua

Penggunaan basis akuntansi berbasis kas atau akrual juga menimbulkan isu penting. Menurut Saputra dan Dewi (2023), meskipun SAP sudah mengadopsi basis akrual, banyak pemerintah daerah masih menggunakan basis kas karena keterbatasan sistem dan sumber daya. Hal ini menyebabkan pendapatan yang seharusnya diakui pada periode berjalan tertunda pencatatannya, mengurangi relevansi dan ketepatan informasi.

3. Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Pengakuan Pendapatan

Kebijakan fiskal yang berubah-ubah, seperti penyesuaian tarif pajak, insentif fiskal, dan peraturan baru, turut mempengaruhi pengakuan dan pengukuran pendapatan. Anggraini dan Kurniawan (2021) menjelaskan bahwa perubahan kebijakan sering menimbulkan kesulitan dalam menentukan kapan dan bagaimana pendapatan harus diakui, terutama pada transaksi kompleks seperti pajak penghasilan dan hibah luar negeri.

Studi Kasus dan Contoh Praktis

Penerapan akuntansi pendapatan di sektor publik dapat lebih dipahami melalui studi kasus dan contoh praktis yang menggambarkan tantangan dan solusi dalam pencatatan serta pelaporan pendapatan pemerintah daerah.

1. Contoh Pencatatan Pendapatan Daerah

Menurut Firmansyah dan Wicaksono (2022), salah satu contoh pencatatan pendapatan daerah dapat dilihat pada pencatatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak daerah. Dalam praktiknya, pemerintah daerah mencatat piutang pajak saat hak atas pajak timbul dan mengakui pendapatan sesuai prinsip akrual, walaupun penerimaan kas belum terjadi. Contoh jurnal yang digunakan memastikan keterlacakan dan akurasi laporan keuangan.

2. Analisis Kasus Audit Pendapatan Pemerintah Daerah

Dalam audit pendapatan pemerintah daerah, Nugroho dan Utami (2023) mengungkapkan beberapa temuan terkait kurangnya dokumentasi pendukung dan kelemahan pengendalian intern yang

menyebabkan ketidaksesuaian antara pendapatan yang dilaporkan dan yang sebenarnya diterima. Studi ini menekankan pentingnya peningkatan transparansi dan pengawasan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.

Daftar Pustaka

- Anggraini, P., & Kurniawan, R. (2021). *Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Akuntansi Pendapatan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(2), 120-134.
- Fitriani, R., & Sudirman, H. (2021). Peran Pendapatan Asli Daerah dalam Penguatan Otonomi Fiskal. *Jurnal Ekonomi Publik*, 10(4), 123-138.
- Firmansyah, R., & Oktavia, L. (2021). Manajemen Risiko Pendapatan Pemerintah Daerah: Pendekatan Sistematis. *Jurnal Manajemen Publik*, 7(2), 99-115.
- Firmansyah, R., & Wicaksono, A. (2022). Praktik Pencatatan Pendapatan Daerah Berbasis Akrua. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 14(2), 110-125.
- Halim, A., & Putra, S. (2022). Analisis Permasalahan Pendapatan Tidak Tercatat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 14(1), 73-89.
- Harahap, M., & Setyawan, D. (2021). Inovasi Digitalisasi dalam Peningkatan PAD Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 33-47.
- Hendrawan, A., & Pratiwi, D. (2022). Pelaporan Pendapatan Pemerintah Daerah Berdasarkan SAP. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 15(3), 201-215.
- Hidayat, M., & Putra, A. (2021). Prinsip Pengakuan Pendapatan Dalam Akuntansi Sektor Publik Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 13(2), 90-105.
- IPSASB. (2020). *International Public Sector Accounting Standards: Revenue from Non-Exchange Transactions (Taxes and Transfers)*. IFAC.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Pengelolaan Pendapatan Daerah*. Jakarta: Kemenkeu.
- Kurniawan, R., & Putri, S. (2022). Peraturan Perundang-Undangan Dan Pengelolaan Pendapatan Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 15(1), 67-83.

- Lestari, M., & Hidayat, T. (2022). Analisis Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah: Dampak dan Pengelolaan. *Jurnal Kebijakan Fiskal*, 8(2), 55-69.
- Nugroho, B., & Arifin, F. (2022). Peran Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Pendapatan Publik. *Jurnal Teknologi Pemerintahan*, 5(1), 15-30.
- Nugroho, A., & Putri, N. (2020). Pengaruh Denda Administrasi Terhadap Pendapatan Daerah dan Implikasinya Pada Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(3), 45-58.
- Nugroho, B., & Utami, S. (2023). *Audit Pendapatan Pemerintah Daerah: Studi Kasus dan Rekomendasi*. *Jurnal Audit dan Akuntabilitas Publik*, 15(1), 45-59.
- Putri, N., & Hadi, S. (2021). *Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Perspektif Good Governance*. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 88-105.
- Rahman, D., & Wulandari, S. (2023). Karakteristik Pendapatan Sektor Publik dan Implikasinya Terhadap Pengelolaan Keuangan. *Jurnal Keuangan Negara*, 16(1), 45-62.
- Rahmat, A., & Sari, N. (2020). Ketergantungan Dana Transfer dan Strategi Peningkatan PAD. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 89-102.
- Santoso, R., & Dewi, F. (2021). Metode Pengukuran Pendapatan Dalam Akuntansi Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 13(1), 112-128.
- Saputra, D., & Dewi, F. (2023). Implementasi Basis AkruaL Dalam Pengakuan Pendapatan Sektor Publik: Studi Pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 16(1), 50-66.
- Sari, M., & Gunawan, T. (2023). Implementasi SAP Dalam Pengakuan dan Pelaporan Pendapatan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 15(2), 98-110.
- Sari, R., & Hadi, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah, dan Belanja Pemerintah Terhadap Pelaksanaan

- Internet Financial Reporting Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*, 1(3), 397-410
- Sari, L., & Kusuma, I. (2022). Perbedaan Pengelolaan Pendapatan Sektor Publik Dan Swasta. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(3), 70-85.
- Susanto, B., & Prasetyo, Y. (2023). Tantangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 14(1), 77-93.
- Wahyudi, T., & Ramadhan, F. (2023). Sistem Pengendalian Intern Pendapatan Sektor Publik Di Era Digital. *Jurnal Teknologi Informasi Pemerintahan*, 6(1), 55-72.
- Wahyuni, E., & Santoso, D. (2021). Pendapatan Lainnya Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Keuangan Daerah*, 9(3), 45-59.
- Wibowo, T., & Nurlaila, S. (2022). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pemindahtanganan Aset Daerah: Studi Kasus Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Manajemen Publik*, 8(1), 88-102.
- Widodo, A., & Harahap, D. (2022). Kapan Pendapatan Sektor Publik Diakui? *Studi Prinsip Akuntansi Akrual*. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 14(3), 135-150.
- Yuliana, S., & Susanto, B. (2022). Digitalisasi Pengendalian Pendapatan Daerah: Studi Kasus dan Analisis. *Jurnal Sistem Informasi Publik*, 4(4), 8

PROFIL PENULIS



Dr. Siti Nur Reskiyawati Said, S.E., M.Si.

Ketertarikan penulis terhadap bidang akuntansi mulai tumbuh sejak tahun 2011. Berbekal minat tersebut, penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Muslim Indonesia dan meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Akuntansi pada tahun 2015. Untuk memperdalam pengetahuan, penulis menempuh pendidikan Magister di Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang diselesaikan pada tahun 2019.

Selanjutnya, penulis menyelesaikan studi doktoral di Program Studi Ilmu Akuntansi Universitas Hasanuddin pada tahun 2025. Penulis memiliki kepakaran di bidang Akuntansi Sektor Publik. Sebagai upaya mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis aktif melakukan penelitian di bidang tersebut. Beberapa penelitian yang dilakukan memperoleh pendanaan dari Kemenristek Dikti serta institusi internal perguruan tinggi. Selain penelitian, penulis juga aktif berkontribusi dalam pengajaran dan pengabdian masyarakat, dengan harapan dapat memajukan ilmu akuntansi di Indonesia.

Email Penulis: siti.nur.reskiyawati@unm.ac.id.



BAB 9

AKUNTANSI UNTUK

BELANJA

Ahmad Nashiruddin Mushoddiq Rahman, S.Pd., M.Ak.
Universitas Negeri Makassar



2. Prinsip Pengakuan Belanja

Belanja diakui berdasarkan prinsip akrual yang berarti pengakuan belanja terjadi pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih terpenuhi, meskipun kas belum dikeluarkan (PSAP 07 Tahun 2010, 2025). Hal ini berarti bahwa pengeluaran belanja dicatat pada saat terjadi kewajiban, bukan ketika dana benar-benar dibayar.

Dalam laporan keuangan pemerintah (Laporan Operasional) basis akrual berarti pendapatan diakui pada saat memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan.

Sementara untuk (Neraca) berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Belanja diatur dalam konteks anggaran pemerintah, baik APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk pemerintah pusat, maupun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk pemerintah daerah.

Belanja ini digunakan untuk pelaksanaan kebijakan dan program yang telah disetujui dalam anggaran, dan pengelolaannya harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan anggaran tersebut akan mempengaruhi posisi anggaran dan harus dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan.

Komponen Laporan Keuangan pokok untuk Pemerintah terdiri dari: Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Operasional (LO), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Rp.1.000.000.000, maka Efisiensi = $(1.200/1.000.000.000) \times 100\% = 0,00012\%$ (Arum *et al.*, 2023). Dalam hal ini, efisiensi program tersebut sangat rendah, yang menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya tidak optimal. Berikut adalah contoh tabel yang menggambarkan analisis efektivitas dan efisiensi belanja pada suatu program pemerintah:

Tabel 9.10: Tabel Efektivitas dan Efisiensi Belanja

Thn	Target Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Efektivitas (%)	Output (unit)	Input (Rp)	Efisiensi (%)
2021	1.000.000.000	950.000.000	95%	1.200	1.000.000.000	0,00012%
2022	1.200.000.000	1.150.000.000	95,83%	1.500	1.200.000.000	0,00012%

Sumber: Diolah Penulis.

Dari tabel 9.10 di atas, dapat dilihat bahwa meskipun efektivitas program cukup tinggi (di atas 90%), efisiensi penggunaan sumber daya masih sangat rendah. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Analisis efektivitas dan efisiensi belanja memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana anggaran yang dialokasikan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dan seberapa optimal penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil tersebut. Penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap kedua aspek ini guna meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran dan memastikan tercapainya tujuan pembangunan secara efektif dan efisien (Junaid *et al.*, 2025).

Daftar Pustaka

- Arum, D., Wati, A., Harjanti, R. S., & Amaliyah, F. (2023). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 8(4), 2023–2024.
- BPK. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Junaid, M. T., Kanan, A. T., & Ridho, M. (2025). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kota Tarakan Analysis of the Effectiveness and Efficiency of the Implementation of the Tarakan City. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 27(1), 124–131. <https://e-journals2.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI/article/view/2660>.
- Mahmudi. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*.
- PSAP 07 Tahun 2010. (2025). Standar Akuntansi Pemerintahan. *Komite Standar Akuntansi Pemerintahan*. <https://www.jurnal.id/id/blog/standar-akuntansi-pemerintahan-dalam-akuntansi-pemerintah-adalah/>.

PROFIL PENULIS



Ahmad Nashiruddin Mushoddiq Rahman, S.Pd., M.Ak.

Lahir di Makassar tahun 1992, penulis memilih kepakaran pada bidang perpajakan dan akuntansi sektor publik. Alumni Universitas Negeri Makassar Program Studi Pendidikan Akuntansi pada tahun 2014 dan melanjutkan pendidikan serta menyelesaikan studi pada tahun 2019 di Program Studi Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia. Berkarir pada Pemerintah Kota Makassar sejak tahun 2012 hingga tahun 2023. Mulai menjadi dosen pada tahun 2023 pada Program Studi Diploma Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Penulis memiliki kepakaran dibidang Perpajakan dan Akuntansi Sektor Publik. Dalam perjalanan menuju dosen profesional, penulis mencoba aktif sebagai peneliti di bidang perpajakan dan akuntansi sektor publik. Selain itu, penulis juga bergabung dalam asosiasi perpajakan PERTAPSI (Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia).

Email Penulis: ahmad.nashiruddin@unm.ac.id.



BAB 10

AKUNTANSI UNTUK

ASET

Hendriyati Haryani, S.E., M.Ak.
Universitas Raharja



Pendahuluan

Sebagaimana yang berlaku dalam akuntansi sektor publik, aset adalah sumber daya moneter yang dimiliki atau dikendalikan pemerintah dan penggunaannya diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manajemen aset yang tepat dan pencatatan yang akurat sangat penting bagi pengelolaan dana negara yang terbuka, jujur, dan efektif.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010, ketika masyarakat dan pemerintah menantikan keuntungan ekonomi dan sosial masa depan dari sumber daya keuangan yang dimiliki atau dikendalikan pemerintah sebagai hasil peristiwa sebelumnya, kita katakan bahwa sumber daya ini adalah aset.

Dalam laporan keuangan pemerintah, aset merupakan bagian dari neraca (*balance sheet*) yang mencerminkan kekayaan negara/daerah. Oleh karena itu, akuntansi untuk aset bertujuan untuk menyediakan informasi yang andal, relevan, dan dapat dibandingkan mengenai nilai, kondisi, dan perubahan yang terjadi atas aset tersebut. Menurut Mardiasmo (2018), akuntansi aset pada sektor publik memiliki fungsi strategis untuk:

1. Menyajikan informasi kekayaan pemerintah.
2. Memberikan dasar perhitungan beban penyusutan dan pengelolaan aset.
3. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan barang milik negara/daerah.
4. Menjadi dasar pengambilan keputusan ekonomi dan kebijakan publik.

Pengertian dan Konsep Dasar Aset dalam Sektor Publik

Secara umum, aset dalam akuntansi sektor publik tidak hanya terbatas pada barang berwujud (seperti tanah, bangunan, kendaraan, peralatan), tetapi juga mencakup aset tidak berwujud (seperti hak paten, perangkat lunak, dan goodwill) yang dimiliki oleh pemerintah.

Menurut Halim dan Kusufi (2014), aset sektor publik memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

Pengendalian dan Inventarisasi Aset Pemerintah

1. Pengendalian Aset

Pengendalian aset bertujuan untuk:

- a. Menjamin keamanan fisik dan legalitas aset.
- b. Memastikan aset digunakan sesuai peruntukan.
- c. Mencegah kehilangan, penyalahgunaan, dan kerusakan.
- d. Menyediakan data yang akurat untuk penyusunan laporan keuangan.

Menurut Permendagri No. 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengendalian aset dilakukan melalui sistem pencatatan dan inventarisasi yang akurat.

2. Inventarisasi Aset

Proses pengumpulan informasi, pendokumentasian, dan pelaporan aset di bawah kendali pemerintah dikenal sebagai inventaris. Kegiatan ini biasanya dilakukan setiap akhir tahun anggaran dan melibatkan Satuan Kerja Pengelola Barang (SKPB). Proses inventarisasi meliputi:

1. Pemeriksaan fisik aset.
2. Rekonsiliasi antara catatan pembukuan dan data lapangan.
3. Penyesuaian apabila ditemukan aset rusak, hilang, atau tidak digunakan lagi.

Penyajian dan Pengungkapan Aset Dalam Laporan Keuangan

Baik Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merinci aset pemerintah, terutama pada neraca.

1. Penyajian di Neraca

Aset disajikan berdasarkan klasifikasi berikut:

- a. Aset Lancar.
- b. Investasi Jangka Panjang.
- c. Aset Tetap.
- d. Aset Tak Berwujud.
- e. Aset Lainnya.

2. Penerimaan Aset Hibah

Pemerintah menerima hibah tanah dari masyarakat senilai Rp.1.000.000.000.

Dr. Aset Tetap – Tanah Rp.1.000.000.000.

Cr. Pendapatan Hibah Aset Tetap Rp.1.000.000.000.

3. Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Gedung kantor selesai dibangun dengan biaya Rp3.000.000.000 dan siap digunakan.

Dr. Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Rp.3.000.000.000.

Cr. Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp.3.000.000.000.

4. Pengakuan Penyusutan

Beban penyusutan kendaraan dinas sebesar Rp.54.000.000. Per tahun.

Dr. Beban Penyusutan Kendaraan Rp.54.000.000.

Cr. Akumulasi Penyusutan Kendaraan Rp,54.000.000.

5. Penghapusan Aset karena Rusak Berat

Sebuah kendaraan dinas rusak berat dengan nilai buku Rp25.000.000 dihapuskan.

Dr. Akumulasi Penyusutan Kendaraan Rp.175.000.000.

Dr. Beban Penghapusan Aset Rp.25.000.000.

Cr. Aset Tetap – Kendaraan Rp.200.000.000.

Daftar Pustaka

- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah: Edisi Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Dalam Negeri. (2021). *Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) – Pernyataan SAP No. 07 dan No. 08.

PROFIL PENULIS



Hendriyati Haryani, S.E., M.Ak.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu akuntansi dimulai pada tahun 2011 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke S1 Jurusan Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia dan berhasil lulus pada tahun 2015. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister Akuntansi di Universitas Indonesia Esa Unggul dan berhasil lulus pada tahun 2017.

Memiliki pengalaman di perbankan syariah selama 6 tahun dari tahun 2013–2019 di BCA syariah sebagai kepala bagian Operasional kemudian, penulis mendedikasikan ilmu akuntansi nya dengan menjadi dosen tetap di kampus Universitas Raharja dengan mata kuliah Akuntansi Syariah, Akuntansi Biaya, Pengantar Akuntansi, Akuntansi Sektor Publik, dll. Penulis memiliki kepakaran dibidang akuntansi syariah. dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: hendriyati.haryani@gmail.com.



BAB 11

AKUNTANSI UNTUK

KEWAJIBAN

Agus Hendrawan, S.E, M.Si.
Universitas Muhammadiyah Jakarta



Definisi Akuntansi Kewajiban

Dalam akuntansi, utang adalah utang yang berasal dari kejadian sebelumnya yang menyebabkan kehilangan uang. Sistem akuntansi kewajiban, di sisi lain, adalah suatu proses yang dimulai saat seseorang membeli atau membeli jasa atau barang dengan kredit dan dibuktikan dengan dokumen yang sah hingga utang yang bersangkutan diselesaikan atau dibayar.

Menurut saat tanggal jatuh tempo, kewajiban bisa diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Ada beberapa sebagai berikut:

1. Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek (Kurang Dari 1 Tahun)

Adalah kewajiban yang akan segera dibayar atau kurang dari 1 tahun setelah tanggal pelaporan. Kewajiban kewajiban tersebut adalah jangka pendek termasuk utang dagang, utang bunga, pinjaman jangka pendek, utang lancar jangka panjang, pendapatan yang akan diterima, utang belanja, dan utang-utang jangka pendek lainnya.

2. Kewajiban-Kewajiban Jangka Panjang

Ini adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari dua belas bulan dari tanggal pelaporan. Berutang kepada pemerintah pusat, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat adalah beberapa contoh utang jangka panjang. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat dianggap sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- a. Jangka waktu awal adalah lebih dari 12 bulan;
- b. Entitas berencana untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan tujuan tersebut didukung dengan adanya perjanjian pendanaan kembali (*refinance*) atau penjadwalan kembali pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan.

Akuntansi Kewajiban Sektor Publik

Akuntansi kewajiban sektor publik merupakan bagian penting dari sistem akuntansi pemerintahan yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan seluruh

tersebut. PPK SKPD membuat jurnal sebagai berikut berdasarkan nota debit:

Tgl	Uraian	Debit	Kredit
DDMMYY	Beban Bunga Utang	Rp. X -	- Rp. X

c. Pinjaman Jangka Pendek

Adalah merupakan pinjaman antar pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya/lembaga keuangan bank/lembaga keuangan non bank/BLUD yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu kurang dari satu tahun atau kurang dari satu periode akuntansi.

Pada saat SKPD menandatangani perjanjian pinjaman jangka pendek antara sesama pemerintah daerah yang lain/perbankan/lembaga keuangan non bank/BLUD dengan menerima nota kredit bank.

d. Pendapatan yang Diterima Dimuka

Adalah merupakan besaran kas yang diterima tetapi belum diserahkan baik sebagian atau seluruhnya oleh pemerintah daerah.

Pada saat SKPD menerima kas atas barang atau jasa tetapi belum diserahkan sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa kepada pihak pengguna barang/jasa. Pada saat tersebut, SKPD menerima tagihan bank atau dokumen lain sejenisnya.

e. Utang Belanja

Akuntansi utang belanja di SKPD terdiri dari pencatatan utang yang terjadi dan pembayarannya. Jika SKPD membeli barang dan jasa yang telah dilaksanakan tetapi belum dibayar, PPK SKPD akan mengakui utang tersebut. Ini terjadi saat pembayaran transaksi belum dilakukan.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mencatat transaksi ini adalah pendekatan aset.

- 1) Transaksi pengakuan utang pada saat barang dibeli atau didapat tetapi hutang belum dilunasi.
- 2) Transaksi pembayaran utang terjadi pada saat pembayaran atau pelunasan dilakukan, dengan asumsi menggunakan mekanisme TU/GU.

Daftar Pustaka

- Bastian, I. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2017). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indrayani, M. (2023). *Modul Akuntansi Sektor Publik*. Parepare: IAIN Parepare Press.
- Jamaluddin Majid. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Gowa: Pusaka Almaila.
- Mahsun, M. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Walikota Salatiga Nomor 89 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Kewajiban.
- Renyowijoyo, M. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Nonlaba*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Stewart, D. & Simmons, M. (2010). *The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide*. Berkeley, AS: New Riders Pres.

PROFIL PENULIS



Agus Hendrawan, S.E, M.Si.

Latar belakang penulis adalah akademisi di bidang Ekonomi dan Bisnis program studi Akuntansi, selain itu Penulis juga adalah praktisi bidang perbankan dan telah berkarir di Perbankan selama lebih dari tiga puluh tahun di Bank Umum Nasional dengan jabatan sebagai *Assistant Vice President* pada sebuah Bank swasta nasional di Indonesia.

Ini sejalan dengan bidang ilmu penulis tekuni. Pendidikan formal penulis adalah lulusan strata 1 (S1) Program Studi Akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun lulus 2011 dan strata 2 (S2) Program Studi Akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun lulus 2014. Sejak tahun 2015 sampai saat ini penulis bekerja sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan jabatan akademis sebagai Lektor.

Email Penulis: agus.hendrawan@umj.ac.id.



BAB 12

AKUNTANSI UNTUK

ENTITAS DANA

Warseno, S.E., M.Ak.
Universitas Raharja



Pengertian dan Klasifikasi Ekuitas Dana

1. Pengertian Ekuitas Dana

Secara umum, ekuitas merupakan kekayaan bersih suatu entitas. Dalam konteks akuntansi pemerintahan, ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Ekuitas dana mencerminkan hak residual pemerintah atas aset yang dimilikinya setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban.

Penting untuk dicatat bahwa konsep ekuitas dana pada pemerintah berbeda dengan ekuitas pada entitas bisnis. Ekuitas pemerintah tidak mencerminkan kepemilikan individu atau laba yang dapat dibagi kepada pemegang saham. Sebaliknya, ekuitas ini sepenuhnya merupakan milik publik dan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

2. Klasifikasi Ekuitas Dana

Ekuitas dana pemerintah, terutama pada pemerintah daerah, diklasifikasikan menjadi tiga kelompok utama, yaitu Ekuitas Dana Lancar (EDL), Ekuitas Dana Investasi (EDI), dan Ekuitas Dana Cadangan (EDC). Pengklasifikasian ini membantu para pemangku kepentingan untuk memahami bagaimana kekayaan pemerintah dialokasikan dan digunakan.

a. Ekuitas Dana Lancar (EDL)

Ekuitas Dana Lancar mencerminkan bagian kekayaan bersih pemerintah yang tersedia untuk membiayai operasional pemerintahan sehari-hari.

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. EDL dibentuk dari akumulasi saldo dari transaksi keuangan yang bersifat lancar, termasuk;

- 1) SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran): SiLPA adalah kas yang masih tersisa dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam satu tahun anggaran.

Saldo SiLPA ini digunakan untuk menyeimbangkan keuangan pemerintah pada tahun berikutnya dan merupakan komponen utama dari Ekuitas Dana Lancar.

- 2) Cadangan Piutang dan Persediaan: Ini adalah saldo yang terbentuk dari pengakuan piutang dan persediaan yang dimiliki oleh pemerintah pada akhir periode akuntansi.

- b. Contoh Jurnal: jika ditemukan kesalahan pencatatan belanja modal yang seharusnya dicatat sebagai aset tetap:
Debit: Aset Tetap
Kredit: Ekuitas (pos Koreksi Kesalahan Mendasar).
- c. Revaluasi Aset: revaluasi aset tetap yang dilakukan oleh pemerintah akan mempengaruhi nilai ekuitas.
 - 1) Tujuan: menyesuaikan nilai aset tetap dengan nilai wajar yang berlaku.
 - 2) Dampak: jika nilai aset naik, ekuitas akan meningkat. Sebaliknya, jika nilai aset turun, ekuitas akan berkurang.
 - 3) Contoh Jurnal: jika hasil revaluasi menunjukkan kenaikan nilai aset tetap:
Debit: Aset Tetap
Kredit: Ekuitas (pos Perubahan Nilai Revaluasi)
- d. Transfer Masuk dan Keluar Antar Entitas: transaksi transfer antar entitas, seperti transfer dana perimbangan atau dana bagi hasil, juga mempengaruhi ekuitas.
- e. Contoh Jurnal: Jika SKPD menerima transfer dana dari BUD, maka pencatatannya akan mempengaruhi akun ekuitas antar-entitas.

Format Neraca Sesuai SAP

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, berikut adalah format Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) serta contoh Bagan Akun Standar (BAS) yang relevan, terutama untuk pemerintah daerah.

Neraca pemerintah menyajikan posisi keuangan entitas pelaporan pada tanggal tertentu. Berbeda dengan neraca perusahaan yang memuat modal dan laba ditahan, Neraca pemerintah menyajikan ekuitas yang merefleksikan kekayaan bersih publik.

Tabel 12.2: Format Neraca Sesuai SAP
NERACA
PEMERINTAH [PROVINSI/KABUPATEN/KOTA]
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
(Dalam Rupiah)

ASET	20X1	20X0
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	XXX	XXX
Piutang Pajak	XXX	XXX
Piutang Retribusi	XXX	XXX
Piutang Lainnya	XXX	XXX
Persediaan	XXX	XXX
JUMLAH ASET LANCAR	XXX	XXX
ASET NONLANCAR		
Investasi Jangka Panjang		
Investasi Permanen	XXX	XXX
Investasi Nonpermanen	XXX	XXX
Aset Tetap		
Tanah	XXX	XXX
Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	XXX	XXX
Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
Akumulasi Penyusutan	(XXX)	(XXX)
Aset Lainnya		
Aset Tak Berwujud	XXX	XXX
JUMLAH ASET NONLANCAR	XXX	XXX
TOTAL ASET	XXX	XXX
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Belanja Pegawai	XXX	XXX
Utang Belanja Barang	XXX	XXX
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Jangka Panjang	XXX	XXX
TOTAL KEWAJIBAN	XXX	XXX
EKUITAS	XXX	XXX
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	XXX	XXX

Sumber: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2019).

Format Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah salah satu komponen utama dalam laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi

mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan Laporan Operasional (LO) dengan Neraca, karena menunjukkan bagaimana hasil operasi selama satu periode mempengaruhi posisi ekuitas pada akhir periode tersebut.

Tujuan utama penyusunan LPE adalah untuk memberikan gambaran yang transparan dan akuntabel kepada publik mengenai perubahan kekayaan bersih pemerintah. Dengan menyajikan laporan ini, pemerintah dapat menjelaskan secara rinci faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perubahan ekuitas, sehingga para pemangku kepentingan dapat menilai efektivitas pengelolaan keuangan publik.

Struktur dan komponen laporan perubahan ekuitas: struktur LPE pemerintah diatur dalam SAP dan memiliki format yang relatif sederhana, tetapi informatif. LPE memuat beberapa komponen utama yang menggambarkan perubahan ekuitas selama periode pelaporan. Penjelasan mengenai POS LPE dapat dipahami lebih detail berikut ini:

1. **Ekuitas Awal:** ini adalah saldo ekuitas pada awal periode pelaporan. Saldo ini harus sama dengan saldo ekuitas akhir pada periode sebelumnya yang disajikan dalam Neraca.
2. **Surplus atau Defisit-LO:** pos ini mencerminkan hasil dari aktivitas operasional pemerintah selama periode pelaporan.
 - a. Surplus-LO: Apabila jumlah pendapatan-LO lebih besar daripada beban-LO. Surplus akan menambah saldo ekuitas.
 - b. Defisit-LO: Apabila jumlah pendapatan-LO lebih kecil daripada beban-LO. Defisit akan mengurangi saldo ekuitas.
3. **Koreksi:** pos koreksi digunakan untuk mencatat penyesuaian yang terjadi akibat kesalahan mendasar dari periode sebelumnya atau dampak dari perubahan kebijakan akuntansi. Contoh koreksi ini termasuk:
 - a. Koreksi kesalahan mendasar: Kesalahan pencatatan pada periode sebelumnya yang baru ditemukan pada periode berjalan.
 - b. Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi: Penyesuaian ekuitas yang terjadi akibat perubahan metode atau kebijakan akuntansi.

4. Ekuitas Akhir: ini adalah saldo ekuitas pada akhir periode pelaporan, yang merupakan hasil perhitungan dari ekuitas awal ditambah atau dikurangi dengan surplus/defisit-LO dan koreksi. Saldo ekuitas akhir ini harus sama dengan saldo ekuitas yang disajikan dalam Neraca pada akhir periode pelaporan.

Format Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Agar lebih mengerti dan mengetahui gambaran laporan perubahan ekuitas, berikut adalah contoh format LPE untuk Pemerintah Daerah.

Tabel 12.3: Format LPE Sesuai SAP
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PEMERINTAH [PROVINSI/KABUPATEN/KOTA]
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1 dan
20X0
(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
Ekuitas Awal	XXX	XXX
Surplus/(Defisit)-LO	XXX	XXX
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	(XXX)	XXX
Koreksi Nilai Persediaan	(XXX)	-
Perubahan Nilai Aset Tetap karena Revaluasi	XXX	-
Ekuitas Akhir	XXX	XXX

Sumber: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2019).

Prosedur penyusunan laporan perubahan ekuitas, penyusunan LPE melibatkan beberapa langkah terintegrasi: mengidentifikasi saldo ekuitas awal: saldo ini diambil dari neraca periode sebelumnya, mengidentifikasi surplus atau defisit-LO: saldo ini diambil dari Laporan Operasional yang telah disusun pada periode yang sama, mengidentifikasi koreksi: koreksi ini berasal dari jurnal koreksi yang dibuat selama periode berjalan untuk kesalahan periode sebelumnya atau dampak perubahan kebijakan akuntansi, menghitung ekuitas akhir: saldo ekuitas akhir dihitung dengan menjumlahkan ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dan koreksi, membandingkan saldo ekuitas

akhir dengan neraca: saldo ekuitas akhir yang dihitung dalam LPE harus sama dengan saldo ekuitas yang disajikan dalam Neraca akhir periode.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. (2011). *Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah*. Diakses dari sumsel.bpk.go.id.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. (2012). *Lampiran-12-Perwa-Nomor-10-Tahun-2011*. Diakses dari sumsel.bpk.go.id.
- BPKAD Kabupaten Badung. (2018). *Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan*. Diakses dari bpkad.badungkab.go.id.
- BPKK Banda Aceh. (2021). *Kebijakan Akuntansi Nomor 04 Laporan Operasional Dan Laporan Perubahan Ekuitas*. Diakses dari <https://bpkk.bandaacehkota.go.id/wp-content/uploads/2021/09/Lampiran-05-KA-04-LAPORAN-OPERASIONAL-DAN-LAPORAN-PERUBAHAN-EKUITAS.pdf>.
- DJPK Kemenkeu. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Diakses dari djpk.kemenkeu.go.id.
- DJPK Kemenkeu. (2014). *Akuntansi.pdf*. Diakses dari djpk.kemenkeu.go.id.
- DJPK Kemenkeu. (2014). *Modul Kerjasama Akuntansi.pdf*. Diakses dari djpk.kemenkeu.go.id.
- IAI Global. *Modul CGAA Daerah*. Diakses dari web.iaiglobal.or.id.
- JDIH Kementerian Keuangan. *Definisi Entitas Pelaporan*. Diakses dari jdih.kemenkeu.go.id.
- JDIH Kota Pasuruan. (2014). *lampiran-sistem-akuntansi-pemerintah-daerah.pdf*. Diakses dari jdih.pasuruankota.go.id.
- Jurnal Ilmiah: Berbagai jurnal seperti Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik, Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, atau publikasi dari universitas dapat menjadi sumber referensi terkait implementasi dan isu-isu akuntansi ekuitas dana.
- Jurnal Mahasiswa STIESIA. *Dampak Revaluasi Aset Tetap Terhadap Pajak....* Diakses dari jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id.
- Jurnal UNIVED. (2010). *Hubungan Penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 Dengan....* Diakses dari jurnal.unived.ac.id.
- Jurnal Universitas Islam Riau. *Prinsip Dasar PP 71 Tahun 2010*. Diakses dari repository.uir.ac.id.

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan: Dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), dokumen ini menjelaskan prinsip-prinsip dasar penyusunan laporan keuangan, termasuk konsep ekuitas dana.

KLC Kemenkeu. (2022). *KMS:: Standar Akuntansi Pemerintah, PP 71 Tahun 2010*. Diakses dari klc2.kemenkeu.go.id.

KLC Kemenkeu. (2023). *Konsolidasi Laporan Keuangan*. Diakses dari klc2.kemenkeu.go.id.

Klinik Akuntansi. (2025). *Akuntansi Pemerintah: Pengertian, Dasar Hukum, dan Aplikasinya*. Diakses dari www.klinikakuntansi.net.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). (2005). *Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan*. Diakses dari ksap.org.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). *Mengapa Harus Entitas Pelaporan*. Diakses dari ksap.org.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2019). *Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia*. Diakses dari <https://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2012/08/Buku-SAP-2019-edit.pdf>.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2024). *Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Pusat* Diakses dari <https://www.ksap.org/lampiran8.pdf>.

KSAP. (2005). *Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan*. Diakses dari ksap.org.

Modul Akuntansi Keuangan Daerah: Disusun oleh institusi seperti Kementerian Keuangan (DJPK) atau Lembaga Pelatihan Keuangan lainnya, modul ini memberikan panduan praktis dan contoh-contoh kasus.

PA Giri Menang. (2013). *Catatan Atas Laporan Keuangan*. Diakses dari pa-girimenang.go.id.

Penelitian dan Karya Tulis Ilmiah: Skripsi, tesis, atau disertasi mahasiswa di bidang akuntansi pemerintahan seringkali mengulas secara mendalam pentingnya akuntansi ekuitas dana dan dampaknya terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Peraturan BPK. (2014). *Sistem Akuntansi SKPKD*. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/27942>.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010: Dokumen ini merupakan landasan hukum utama yang mengatur Standar

- Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Indonesia, yang menjadi acuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah.
- Portal Kota Malang. (2017). *Catatan atas Laporan Keuangan*. Diakses dari malangkota.go.id.
- PPID Kota Sungai Penuh. (2020). *Catatan atas Laporan Keuangan*. Diakses dari ppid.sungaipeuhkota.go.id.
- PPID Lombok Tengah. (2021). *Catatan atas Laporan Keuangan*. Diakses dari ppid.lomboktengahkab.go.id.
- PubHTML5. (2023). *Modul Ekuitas Dana Pemerintah*. Diakses dari pubhtml5.com.
- Repository UIN Sumatera Utara. (2022). *Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*. Diakses dari repository.uinsu.ac.id.
- ResearchGate. (2025). (PDF) *Analisis Ekuitas Pemerintah Pusat*. Diakses dari www.researchgate.net.
- Scribd. (2015). *Akuntansi Ekuitas*. Diakses dari id.scribd.com.
- Scribd. (2015). *Penyusunan Saldo Awal Dan Jurnal*. Diakses dari de.scribd.com.
- Scribd. (2017). *Kewajiban Dan Ekuitas Dana*. Diakses dari id.scribd.com.
- Scribd. (2017). *Koreksi Kesalahan Akuntansi Pemerintah Daerah*. Diakses dari id.scribd.com.


PROFIL PENULIS



Warseno, S.E., M.Ak.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu akuntansi dimulai pada tahun 2019 silam.. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang pada tahun 2014. Dua tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di Prodi Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Esa Unggul. Penulis memiliki kepakaran dibidang Akuntansi dan Manajemen Retail. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: elninodesilva@gmail.com.



BAB 13

SISTEM AKUNTANSI

DAN PELAPORAN

KEUANGAN

Nurina Saffanah, S.E., M.Sc.
Universitas Muslim Indonesia



Pendahuluan

Akuntansi Sektor Publik (ASP) merupakan pilar esensial dalam kerangka *governance* modern. Pemisahan ASP dari Akuntansi Sektor Swasta terletak pada orientasi tujuannya. Sementara Sektor Swasta berfokus pada profitabilitas dan maksimalisasi *shareholder value*, Sektor Publik berorientasi pada akuntabilitas dan penyediaan pelayanan publik (Bastian, 2010).

Sumber daya yang dikelola oleh pemerintah, yang berasal dari pajak, retribusi, dan pinjaman masyarakat, menuntut tingkat pertanggungjawaban yang tertinggi. Akuntabilitas, dalam konteks ini, didefinisikan sebagai kewajiban manajerial untuk mempertanggungjawabkan perolehan dan penggunaan dana publik kepada masyarakat dan perwakilan legislatif, meliputi dimensi manajerial, politik, dan hukum.

Urgensi Akuntabilitas dan Transparansi menjadi krusial dalam siklus manajemen keuangan negara/daerah. Pemerintah harus dapat menunjukkan bahwa sumber daya telah digunakan secara efektif, efisien, dan ekonomis (3E), sekaligus sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sistem Akuntansi Sektor Publik (SASP) dan Pelaporan Keuangan (PKSP) adalah alat utama untuk mewujudkan prinsip transparansi fiskal, memungkinkan *stakeholder* untuk menilai kinerja pertanggungjawaban pemerintah. Kegagalan dalam akuntabilitas dapat merusak kepercayaan publik dan menghambat legitimasi pemerintahan.

Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan sektor publik merupakan komponen krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Mardiasmo, 2021). Melalui sistem akuntansi yang transparan, akuntabel, dan andal, pemerintah dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat, lembaga legislatif, serta lembaga pemeriksa seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Akuntansi sektor publik tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan transaksi, tetapi juga sebagai sarana pengendalian, perencanaan, evaluasi kinerja, pertanggungjawaban publik, dan pengambilan keputusan kebijakan ekonomi negara.

1. Interoperabilitas Sistem dan Integrasi Data

Tantangan terbesar dalam ekosistem digital adalah interoperabilitas antara berbagai sistem informasi pemerintah. SASP (misalnya SAKTI atau SIPD) harus terintegrasi secara mulus dengan sistem perencanaan (RPJMN/RKPD), penganggaran, dan pengawasan (BPK/APIP).

Seringkali, data masih tersimpan dalam 'silo' yang terpisah, menyebabkan redundansi dan inkonsistensi data. Kegagalan integrasi ini menghambat *real-time reporting* dan analisis lintas sektoral yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang cepat (Kieso *et al.*, 2019).

Sinkronisasi data antara pencatatan akuntansi dan sistem manajemen aset menjadi prasyarat krusial yang sering kali belum tercapai sepenuhnya.

2. Risiko Keamanan Siber (*Cybersecurity*) dan Keandalan Data

Seiring dengan semakin terpusatnya data keuangan publik dalam satu sistem berbasis teknologi (seperti *cloud-based* ERP pemerintah), risiko keamanan siber meningkat secara eksponensial. Data keuangan publik sangat sensitif, sehingga investasi pada infrastruktur keamanan, enkripsi, dan *Disaster Recovery Plan* (DRP) menjadi mandatori.

Keandalan PKSP tidak hanya bergantung pada akurasi data yang dicatat, tetapi juga pada kemampuan sistem untuk menahan serangan siber, memitigasi risiko integritas data, dan memastikan ketersediaan data secara kontinu (Romney & Steinbart, 2018). Perlindungan data dari ancaman internal dan eksternal menjadi komponen tak terpisahkan dari pengendalian internal.

3. Kesenjangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Meskipun sistem telah terotomasi, efektivitasnya tetap bergantung pada penguasaan teknologi oleh operator. Kesenjangan kompetensi digital di kalangan staf akuntansi, bendahara, dan auditor masih menjadi hambatan substansial.

Staf kini dituntut tidak hanya menguasai prinsip pencatatan berbasis akrual, tetapi juga analisis data, keamanan siber dasar,

dan pemahaman mendalam tentang alur proses bisnis yang terintegrasi (Halim, 2016). Diperlukan program *upskilling* dan sertifikasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa SDM mampu memanfaatkan potensi penuh dari SIA yang mahal dan kompleks.

4. Pemanfaatan *Big Data* dan Kecerdasan Buatan (AI)

Era digital membuka potensi untuk mengadopsi teknologi canggih seperti *Big Data Analytics* dan Kecerdasan Buatan (AI). Teknologi ini menjanjikan kemampuan untuk audit prediktif, mendeteksi anomali anggaran dan *fraud* secara *real-time*, serta meningkatkan efisiensi proses rekonsiliasi.

Namun, implementasinya memerlukan investasi teknologi yang besar, perubahan regulasi yang mendukung pemanfaatan data dalam jumlah masif, dan kesiapan organisasi untuk menerima dan menginterpretasikan hasil analisis otomatis (Mardiasmo, 2021).

Kesimpulan

Sistem Akuntansi Sektor Publik (SASP) dan Pelaporan Keuangan Sektor Publik (PKSP) merupakan dua komponen yang saling melengkapi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). SASP berfungsi sebagai sistem pengelolaan data keuangan yang memastikan seluruh transaksi publik dicatat, diklasifikasikan, dan dilaporkan secara akurat dan sistematis, sedangkan PKSP berperan dalam menyajikan hasil pengelolaan keuangan tersebut ke dalam bentuk laporan yang transparan, dapat dibandingkan, serta dapat diaudit oleh pihak independen seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Perkembangan penerapan sistem ini di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan sejak diberlakukannya paket regulasi keuangan negara dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual melalui PP No. 71 Tahun 2010. Regulasi tersebut menjadi fondasi dalam menciptakan keseragaman praktik akuntansi di seluruh entitas pemerintahan, baik pusat maupun daerah.

Penerapan SAP berbasis akrual telah meningkatkan kualitas informasi keuangan, memperkuat transparansi fiskal, serta memperbaiki pengambilan keputusan publik. Namun demikian, keberhasilan implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, ketidakterpaduan sistem informasi, dan inkonsistensi penerapan kebijakan akuntansi antarinstansi.

Dalam konteks global, konvergensi SAP terhadap *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS) mencerminkan komitmen Indonesia untuk menyesuaikan praktik akuntansi publik dengan standar internasional tanpa mengabaikan konteks lokal. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas pelaporan keuangan pemerintah, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam transparansi fiskal di tingkat global.

Ke depan, arah pengembangan SASP dan PKSP akan sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi tata kelola pemerintahan. Implementasi sistem digital seperti Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) diharapkan mampu meningkatkan integrasi data, efisiensi proses pelaporan, dan kecepatan penyediaan informasi keuangan secara *real-time*. Penggunaan teknologi berbasis *big data*, *blockchain*, dan *artificial intelligence* juga berpotensi memperkuat fungsi pengawasan serta analisis kinerja keuangan publik secara prediktif.

Dengan demikian, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan sektor publik tidak hanya berperan sebagai alat pertanggungjawaban administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam memperkuat kepercayaan publik, mengoptimalkan pengambilan keputusan, dan memastikan bahwa setiap rupiah dana publik digunakan secara efisien, efektif, dan transparan untuk kepentingan masyarakat luas.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Adhikari, P., & Mellemvik, F. (2011). The Rise And Fall of Accruals: A Case of Nepalese Central Government. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 1(2), 123-143. <https://doi.org/10.1108/204211611111138495>.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2023). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan. *In Badan Pemeriksa Keuangan RI (2023)* (Vol. 1).
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik (Ketiga)*. Erlangga. https://books.google.co.id/books?id=HKarXQgrf_oC.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: *Salemba Empat*.
- Hall, J. A. (2015). *Accounting Information Systems*. Cengage Learning. <https://books.google.co.id/books?id=MjRBBAAAQBAJ>.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2019). *Intermediate Accounting*. Wiley. <https://books.google.co.id/books?id=aaCqDwAAQBAJ>.
- KSAP, K. S. A. P. (2020). Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). *In Komite Standar Akuntansi Pemerintahan*. KSAP. <https://www.jurnal.id/id/blog/standar-akuntansi-pemerintahan-dalam-akuntansi-pemerintah-adalah/>.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). *Accounting Information Systems*. Pearson. <https://books.google.co.id/books?id=Y7cXvgAACAAJ>.

PROFIL PENULIS




Nurina Saffanah, S.E., M.Sc.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu ekonomi dimulai pada tahun 2006 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Akuntansi Universitas Pattimura pada tahun 2014. Kemudian, penulis melanjutkan studi S2 di prodi Sains Akuntansi Program Magister Sains Universitas Gadjah Mada.

Sebagai seorang pengajar dan peneliti, penulis telah mengabdikan diri kurang lebih 4 tahun di dunia Pendidikan Tinggi. Peneliti mengajar dengan fokus pada bidang akuntansi keuangan, audit, keuangan publik, dan akuntansi manajemen. Selain menjadi pengajar, Nurina juga aktif menulis artikel ilmiah yang membahas topik-topik yang terkait dengan akuntansi. Buku ajar ini merupakan hasil dari dedikasinya dalam menyampaikan konsep-konsep akuntansi khususnya di bidang akuntansi sektor public dengan cara yang mudah dipahami, sehingga dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dan praktisi yang ingin mendalami bidang ini. Melalui buku ini, penulis berharap dapat berkontribusi dalam membekali generasi penerus dengan pengetahuan yang relevan, sehingga mereka dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam dunia professional.

Email Penulis: nurina.saffanah@umi.ac.id.



BAB 14

LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH PUSAT

DAN DAERAH

Muhammad Husni, S.Pd., M.Ak. ACPA.
Politeknik Negeri Tanah Laut



Pendahuluan

Laporan keuangan pemerintah menjadi salah satu instrumen utama untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara maupun daerah (Sitepu, 2022). Dalam kerangka tata kelola pemerintahan modern, pengelolaan keuangan publik tidak hanya dituntut untuk efisien, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Baik pemerintah pusat maupun daerah, memiliki kewajiban hukum untuk menyusun laporan keuangan tahunan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang RI nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Regulasi tersebut menegaskan bahwa laporan keuangan harus disusun berdasarkan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual.

Di tingkat pusat, laporan keuangan mencerminkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara di tingkat daerah, laporan keuangan mencerminkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain, laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh DPR maupun DPRD.

Pentingnya laporan keuangan pemerintah tidak hanya terbatas pada aspek administratif, melainkan juga memiliki dimensi ekonomi, politik, dan sosial. Laporan keuangan dapat menjadi dasar penilaian kesehatan fiskal, kualitas belanja publik, serta keberlanjutan pembangunan. Selain itu, laporan keuangan juga merupakan sarana komunikasi antara pemerintah dengan rakyat, legislatif, lembaga pengawas, serta pihak internasional seperti donor dan lembaga pemeringkat.

Dengan demikian, pembahasan mengenai laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah tidak hanya mencakup teknis akuntansi, tetapi juga terkait erat dengan sistem tata kelola keuangan negara secara keseluruhan.

Aspek	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
Konsolidasi	LKPP oleh DJPb	LKPD oleh BPKD
Pendapatan Utama	Pajak nasional, PNBp, hibah luar negeri	PAD, Dana Transfer, Retribusi
Belanja	Subsidi, belanja K/L, transfer ke daerah	Belanja operasi, belanja modal daerah
Audit	BPK RI (pusat)	BPK Perwakilan di daerah
Fokus	Stabilitas fiskal, utang, pembangunan nasional	Layanan publik lokal, PAD, pembangunan daerah

Sumber: Diolah Penulis.

Analisis dan Tantangan

1. Kendala Teknis

Beberapa faktor yang menjadi hambatan teknis dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah:

- Keterbatasan SDM akuntansi di daerah, terutama yang belum memahami SAP berbasis akrual.
- Perbedaan sistem aplikasi keuangan antara pusat dan daerah.
- Keterlambatan pelaporan dan konsolidasi data.

2. Kendala Substantif

Beberapa kendala yang menjadi kendala substantif dalam penyusunan LKPP/ LKPD:

- Pengelolaan aset tetap, terutama tanah dan bangunan, sering tidak tertib pencatatannya.
- Piutang pajak pusat maupun retribusi daerah banyak yang macet.
- Belanja hibah dan bantuan sosial rentan salah saji.

3. Tantangan Masa Depan

Beberapa tantangan di masa yang akan datang dalam penyusunan LKPP/ LKPD:

- Integrasi sistem pusat-daerah dalam satu *platform digital*.
- Transparansi berbasis open data untuk masyarakat.
- Peningkatan opini WTP dengan memperbaiki kelemahan SPI.
- Penguatan kapasitas SDM akuntansi pemerintahan.

Daftar Pustaka

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan' (2010). Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>.
- PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (2019) *Laporan Realisassi Anggaran, Jurnal Akuntansi Keuangan Realisasi Anggaran*.
- Sitepu, A.P. (2022) *Transparansi pengelolaan keuangan daerah*. Cv. Azka Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (2004). Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

PROFIL PENULIS



Muhammad Husni, S.Pd., M.Ak., ACPA.

Ketertarikan penulis terhadap bidang akuntansi berawal sejak tahun 2016. Minat tersebut mendorong penulis untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Makassar pada Program Studi Pendidikan Akuntansi dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2020. Selanjutnya, penulis melanjutkan studi magister di Program Studi Magister

Akuntansi Universitas Hasanuddin dan selesai pada tahun 2023.

Penulis memiliki fokus riset pada Akuntansi Sektor Publik dan Audit Sektor Publik. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif melakukan penelitian dibidang akuntansi dan audit sektor publik serta telah menghasilkan beberapa karya ilmiah. Selain itu, penulis juga berkontribusi dalam penulisan buku dengan tujuan memberikan sumbangsih positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, masyarakat, dan bangsa. Di samping aktivitas akademik, penulis juga memperoleh pengalaman praktis dengan berkiprah di kantor akuntan publik. Pengalaman ini memperkaya pemahaman penulis dalam praktik audit dan akuntansi sehingga mampu mengintegrasikan teori dengan praktek nyata di lapangan.

Email Penulis: muhammadhusni@politala.ac.id.



BAB 15

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

Ade Elza Surachman, S.E., A.k., M.Ak.
Universitas Catur Insan Cendekia



Pendahuluan

Analisis terhadap laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk menilai sejauh mana pengelolaan keuangan publik dijalankan secara efisien, efektif, dan akuntabel (Mahmudi, 2016). Salah satu pendekatan yang kerap dipakai adalah analisis rasio keuangan. Dengan menggunakan rasio keuangan, tingkat kemandirian, efisiensi, efektivitas, serta pertumbuhan keuangan daerah dapat diidentifikasi (Pramono, 2014), sehingga informasi ini menjadi dasar yang penting untuk pengambilan keputusan dan perbaikan tata kelola keuangan pemerintah.

Laporan keuangan pemerintah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 (Pemerintah Republik Indonesia, 2010), dan digunakan untuk:

1. Menilai kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya publik,
2. Menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas belanja,
3. Menjadi dasar pengambilan keputusan kebijakan fiskal dan pembangunan (Tarigan & Nurtanzila, 2014).

Tujuan dan Komponen Laporan Keuangan Pemerintah

Analisis laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk:

1. Menilai kinerja pelaksanaan APBN atau APBD dalam satu periode anggaran (Irnawati *et al.*, 2023).
2. Mengukur tingkat efisiensi, efektivitas, dan kemandirian keuangan pemerintah.
3. Mengidentifikasi penyimpangan antara anggaran dan realisasi untuk perbaikan kebijakan keuangan.
4. Memberikan informasi yang relevan bagi DPR/DPRD dan masyarakat mengenai penggunaan dana publik.
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara/daerah (Herindraningrum & Yuhertiana, 2021).

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 terdiri dari:

Daftar Pustaka

- Azwar, A. (2023). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Dan Potensi Pertumbuhan Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 7(1), 1-25. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v7i1.2118>.
- Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. (2021). *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal Di Indonesia*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/buku/file/1661139200_buku_dua_dekade_desentralisasi_fiskal.pdf.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu pengantar* (Edisi 3). Erlangga.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *LAW REFORM*, 15(1), 149-163. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2019). *Struktur APBD Dalam PP Nomor 12 Tahun 2019*. Kementerian Keuangan RI. <https://sumsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/3.-TH-struktur-APBD-dlm-PP-12-Tahun-2019-edit-1.pdf>.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi 4). Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah* (Edisi 2). Salemba Empat.
- Herindraningrum, F. F., & Yuhertiana, I. (2021). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Literature Review. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 12(2), 157-174. <https://doi.org/10.18860/em.v12i2.12287>.
- Hoesada, J. (2019). *Analisis LRA berbasis LK pemerintahan*. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). <https://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2019/02/LRA.pdf>.
- Irnawati, I., D, S., & Abidin, Z. (2023). Analisis kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kota Makassar. *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia*, 4(3), 403-416. <https://ejournal.nobel.ac.id/index.php/JMMNI/article/view/3009>.

- Kartika, D., Setiawan, A. B., & Kusuma, I. C. (2016). Analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi PAD pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Sosial Humaniora*, 7(2), 143-151. <https://doi.org/10.30997/jsh.v7i2.493>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Surplus pertama kali sejak 2012, apa arti keseimbangan primer? *Media Keuangan*. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/keseimbangan-gan-primer-surplus-pertama-kali-sejak-2012-artinya>.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). (2015). *Modul pelatihan akuntansi pemerintahan*. https://www.ksap.org/Buletin/MODUL_PELATIHAN_AKUNTANSI_PEMERINTAHAN.pdf.
- Kusuma, A. F., & Anwar, A. (2024). Analisis ketergantungan fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 2(2), 223-233. <https://journal.uui.ac.id/JKEK/article/view/32984>.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Edisi 3). UPP STIM YKPN.
- Marinta. (2008). *Analisis Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Untuk Mengetahui Kemampuan Keuangan Pemerintah Kota Kediri Dalam Melakukan Pelunasan Pinjaman Daerah* [Skripsi sarjana, Universitas Brawijaya]. Brawijaya Knowledge Garden. <http://repository.ub.ac.id/113918/>.
- Marpuah, S. (2024). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Dengan Menggunakan Metode Vertikal Dan Horizontal Pada Tahun Anggaran 2019-2023 (Studi pada BPKAD Tanah Bumbu)* [Skripsi sarjana, Universitas NU Kalimantan Selatan]. Repository Unukase. <https://repository.unukase.ac.id/id/eprint/405/>.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi 2). Salemba Empat.
- Nursanti, E. (2021). *Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Dan Keresasian Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sebagai Variabel Intervening* [Skripsi sarjana, Universitas Gadjah Mada]. UGM Repository. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/201959>.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. <https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/PP71.pdf>.
- Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). *Among Makarti*, 7(13), 83-112. <https://doi.org/10.52353/ama.v7i1.97>.
- Riswati, R., & Fauzi, M. A. (2022). Analisis Rasio Keserasian Belanja Modal dan Operasional Serta Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Di Pemerintahan Kota Bandung. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 10(1), 1-15. <https://doi.org/10.33701/Jekp.V10i1.3200>.
- Sari, G. N. (2014). Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Pada Daerah Tertinggal Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 5(2). <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/146>.
- Sihite, M. (2017). Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Staf Akuntansi Dan Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 9(2), 133-148. <https://doi.org/10.17509/jaset.V9i2.9231>.
- Surgawati, I. (2022). Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia Menjelang 20 Tahun Otonomi Daerah. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(2). <https://doi.org/10.37058/wlfr.v2i2.3566>.
- Tarigan, E. P. A., & Nurtanzila, L. (2014). Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 18(1), 67-80. <https://doi.org/10.22146/jkap.6847>.
- World Bank. (2020). *Indonesia Public Expenditure Review: Spending For Better Results*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-public-expenditure-review>.

PROFIL PENULIS



Ade Elza Surachman, S.E., Ak., M.Ak.

Penulis bab 15 tentang "Analisis Laporan Keuangan Pemerintah" dalam sebuah buku Akuntansi Sektor Publik: Teori dan Praktik adalah akademisi di bidang akuntansi. Beliau telah mengabdikan diri sebagai dosen selama lebih dari 10 tahun sejak 2015, dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Garut pada tahun 2013, Lulus S2 Akuntansi di tahun 2015 dari Universitas Mercu Buana dan menyelesaikan pendidikan profesi akuntan tahun 2021 di Universitas Widyatama. Dalam perjalanan karirnya di dunia pendidikan, penulis tidak hanya fokus pada pengajaran tetapi juga secara aktif berkontribusi dalam penelitian dan penerbitan karya buku, sehingga menjadi sumber berharga dalam memberikan wawasan praktis kepada pembaca mengenai analisis laporan keuangan pemerintah.



BAB 16

***AUDITING* SEKTOR**

PUBLIK

Warka Syachbrani, S.E., M.Sc., Ak., CA.
Universitas Negeri Makassar



Pendahuluan

Audit sektor publik memegang peranan penting dalam memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara yang bersih dan efisien, fungsi audit menjadi instrumen utama dalam memberikan keyakinan atas keandalan laporan keuangan, efektivitas program, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Audit tidak hanya berperan sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai sarana peningkatan kinerja organisasi publik melalui rekomendasi perbaikan yang berbasis bukti. Berbeda dengan audit di sektor privat yang berfokus pada pencapaian laba dan kepentingan pemegang saham, audit di sektor publik menekankan pada pengelolaan sumber daya publik untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Auditor sektor publik harus memperhatikan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam menilai kinerja entitas pemerintah, sekaligus mempertimbangkan nilai-nilai integritas dan pelayanan publik. Fokus utama audit publik bukan sekadar pada kewajaran penyajian laporan keuangan, melainkan juga pada bagaimana anggaran digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan.

Dengan demikian, audit sektor publik berperan strategis dalam memperkuat tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara. Melalui hasil audit yang independen dan obyektif, publik memperoleh informasi yang andal mengenai pengelolaan dana publik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah dan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Konsep Dasar *Auditing* Sektor Publik

1. Pengertian *Auditing* Sektor Publik

Auditing sektor publik merupakan proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan kegiatan ekonomi dan keuangan suatu entitas publik, dengan tujuan menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan.

Kesimpulan

Audit sektor publik memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Melalui proses pemeriksaan yang sistematis, audit membantu memastikan bahwa setiap dana publik digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, mematuhi peraturan yang berlaku, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Audit sektor publik tidak hanya berfokus pada kewajaran laporan keuangan, tetapi juga mencakup aspek kinerja, kepatuhan, dan audit khusus yang menilai efektivitas serta efisiensi program pemerintah.

Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan audit dijalankan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan berbeda namun saling melengkapi, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal negara, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat sebagai auditor internal pemerintah. Seluruh kegiatan audit berpedoman pada standar profesional seperti Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang disusun berdasarkan *International Standards of Supreme Audit Institutions* (ISSAIs), guna menjamin kualitas dan integritas hasil audit.

Namun, praktik audit sektor publik masih menghadapi sejumlah tantangan seperti menjaga independensi auditor, menghindari konflik kepentingan, menegakkan etika profesi, serta beradaptasi dengan kemajuan teknologi digital dan tuntutan transparansi publik. Oleh karena itu, penguatan fungsi audit sektor publik perlu diarahkan pada beberapa hal penting. Pertama, memperkuat kapasitas dan kompetensi auditor melalui pelatihan berkelanjutan, khususnya dalam bidang teknologi audit modern seperti e-audit, data analytics, dan kecerdasan buatan. Kedua, mempertegas independensi lembaga audit dengan memastikan posisi kelembagaan yang bebas dari intervensi politik dan birokrasi. Ketiga, meningkatkan sinergi antara BPK, BPKP, dan Inspektorat agar pengawasan keuangan negara berjalan lebih terpadu dan efektif.

Selain itu, transparansi hasil audit dan keterlibatan masyarakat juga harus terus ditingkatkan. Publikasi hasil audit secara terbuka

dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sekaligus mendorong budaya akuntabilitas di seluruh lembaga negara. Dengan demikian, audit sektor publik tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol, tetapi juga sebagai instrumen pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas tinggi.

Daftar Pustaka

- Auditors, T. I. (2017). *Public Sector Internal Audit Standards*. Florida, United States: The Institute of Internal Auditors.
- BPK. (2021). *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)*. Jakarta: BPK RI.
- BPKP. (2020). *Pedoman Audit Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: BPKP.
- INTOSAI. (2019). *International Standards Of Supreme Audit Institutions (ISSAI)*. Vienna, Austria: International Organization of Supreme Audit Institutions.
- Mahmudi. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi terbaru)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nurkholis. (2021). Peran Audit Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Publik Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 10(2), 115–130.

PROFIL PENULIS



Warka Syachbrani, S.E., M.Sc., Ak., CA.

Sejak sekolah menengah atas, penulis telah menekuni Bidang Akuntansi sebagai pilihan keilmuan untuk didalami. Penulis bergabung dan kelompok belajar Akuntansi dan aktif mengikuti kompetisi-kompetisi keakuntansian antar pelajar. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan pada tingkat Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 Program Studi Akuntansi di Universitas Hasanuddin pada tahun 2011. Tahun 2014, penulis menyelesaikan studi S2 di Program Studi Akuntansi pada Program Magister dan Doktor, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Penulis memiliki kepakaran dibidang Akuntansi, terkhusus Auditing dan Pengendalian Internal Keuangan Pemerintah. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kementerian. Selain aktif sebagai pengajar dan peneliti Bidang Akuntansi, Penulis juga terlibat dalam aktivitas praktik audit laporan keuangan instansi privat maupun publik. Sehingga, menguatkan keilmuan penulis dari segi pemahaman atas implementasi hasil riset dan pengembangan teori.

Email Penulis: warka.syachbrani@unm.ac.id.



BAB 17

AKUNTANSI UNTUK

ENTITAS NIRLABA

Syahir Fadli, S.E., M.Acc., ACPA.
Universitas Negeri Makassar



Pendahuluan

Perubahan paradigma dalam akuntansi entitas nirlaba di Indonesia tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga filosofis. Sejak diterbitkannya Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 335 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2019, arah pelaporan keuangan lembaga sosial bergeser dari orientasi kinerja ekonomi menuju akuntabilitas sosial yang berorientasi pada nilai publik, transparansi, dan kepercayaan (*trust*).

Pergeseran ini menggantikan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 45, yang selama dua dekade menjadi pedoman utama bagi entitas nirlaba. Namun, PSAK 45 lebih menekankan aspek teknis pelaporan, bukan pada misi social Lembaga. ISAK 335 hadir untuk memperkuat esensi entitas nirlaba: bahwa akuntansi bukan hanya sarana pencatatan transaksi, tetapi juga mekanisme moral untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana public kepada masyarakat luas.

Di tingkat global, akuntansi entitas nirlaba mengalami perubahan serupa. Negara seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru telah mengintegrasikan *nonprofit financial reporting* dengan kerangka *social value* (Connolly & Hyndman, 2013). Indonesia melalui ISAK 335 berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut, sembari menjaga relevansi dengan konteks lokal yang masuk menekankan kepercayaan sosial dan budaya gotong royong sebagai basis legitimasi organisasi, dengan demikian, bukan hanya sebuah standar teknis tetapi juga simbol pergeseran nilai dalam akuntansi publik. Ia mendorong munculnya bentuk pelaporan yang tidak hanya menjawab pertanyaan “berapa besar dana digunakan”, tetapi juga “bagaimana dampak sosialnya terhadap masyarakat”.

Karakteristik dan Ekosistem Entitas Nirlaba Di Indonesia

Entitas nirlaba memiliki karakteristik fundamental yang membedakannya dari organisasi bisnis. Tujuan utama mereka bukanlah menghasilkan laba, melainkan menciptakan nilai sosial (*social value creation*).

Menurut Mahsun (2011), entitas nirlaba memperoleh sumber daya dari donatur tanpa imbalan ekonomi, tidak berorientasi laba, dan

ENTITAS XYZ Laporan Penghasilan Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2 (dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
TANPA PEMBatasan DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
<i>Pendapatan</i>		
Sumbangan	xxxx	xxxx
Jasa layanan	xxxx	xxxx
Penghasilan investasi jangka pendek (catatan D)	xxxx	xxxx
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan D)	xxxx	xxxx
Lain-lain	xxxx	xxxx
<i>Total Pendapatan</i>	xxxx	xxxx
<i>Beban</i>		
Gaji dan upah	(xxxx)	(xxxx)
Jasa dan profesional	(xxxx)	(xxxx)
Administratif	(xxxx)	(xxxx)
Depresiasi	(xxxx)	(xxxx)
Bunga	(xxxx)	(xxxx)
Lain-lain	(xxxx)	(xxxx)
<i>Total Beban (catatan E)</i>	(xxxx)	(xxxx)
Surplus (Defisit)	xxxx	xxxx
DENGAN PEMBatasan DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
<i>Pendapatan</i>		
Sumbangan	xxxx	xxxx
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan D)	xxxx	xxxx
<i>Total Pendapatan</i>	xxxx	xxxx
Surplus (Defisit)	xxxx	xxxx
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	xxxx	xxxx
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	xxxx	xxxx

Gambar 17.2: Bentuk Laporan Penghasilan Komprehensif
Sumber: Diolah Penulis.

Contoh Laporan Perubahan Aset Neto

ENTITAS XYZ		
Laporan Perubahan Aset Neto		
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2		
(dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
ASET NETO TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo awal	xxxx	xxxx
<i>Surplus tahun berjalan</i>	xxxx	xxxx
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan (catatan C)	xxxx	xxxx
Saldo akhir	xxxx	xxxx
<i>Penghasilan Komprehensif Lain</i>		
Saldo awal	xxxx	xxxx
Penghasilan komprehensif tahun berjalan***)	xxxx	xxxx
Saldo akhir	xxxx	xxxx
Total	xxxx	xxxx
ASET NETO DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo awal	xxxx	xxxx
Surplus tahun berjalan	xxxx	xxxx
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan (catatan C)	(xxxx)	(xxxx)
Saldo akhir	xxxx	xxxx
TOTAL ASET NETO	xxxx	xxxx

ⓑ
Ⓐ

***) entitas menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya (misalnya jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka disajikan dalam kelas aset neto dengan pembatasan).

- Ⓐ Lihat Laporan Posisi Keuangan (Format A).
 ⓑ Lihat Laporan Posisi Keuangan (Format B).

Gambar 17.3: Bentuk Perubahan Aset Neto

Sumber: Diolah Penulis.

Hubungan Dengan Akuntansi Sektor Publik dan *Governance*

Walaupun ISAK 335 dirancang untuk lembaga nirlaba, nilai-nilai yang dikandungnya juga relevan bagi entitas sektor publik. Kedua jenis organisasi sama-sama mengelola sumber daya publik dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip ISAK 335 dapat memperkuat implementasi *good governance* di lembaga pemerintah melalui tiga pilar utama:

Daftar Pustaka

- Bovens, M. (2007). *Analysing And Assessing Accountability: A Conceptual Framework*.
- Connolly, C., & Hyndman, N. (2013). Charity Accountability In The UK: Reforming The Narrative. *The British Accounting Review*, 45(1), 58-74.
- Cordery, C. J., & Sim, D. (2018). *Nonprofit Financial Reporting: The Case For Social Accountability*. *Accounting Forum*, 42(3), 283-296.
- Charities Aid Foundation. (2022). *World Giving Index 2022: Global Trends In Giving*. London: CAF Global.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Ebrahim, A. (2019). *Measuring Social Change: Performance And Accountability In A Complex World*. Stanford University Press.
- Hyndman, N., & McDonnell, P. (2009). *Governance And Charities: An Exploration of Key Themes And The Development of A Research Agenda*. *Financial Accountability & Management*, 25(1), 5-31.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2019). *Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 335: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Nirlaba*. Jakarta: DSAK IAI.
- Mahsun, Moh.dkk. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Rahman, A. (2020). *Akuntansi Entitas Nirlaba: Implementasi ISAK 335 di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yayasan Penabulu. (2020). *Laporan Tahunan dan Social Impact Report*. Jakarta.
- Yayasan Indonesia Mengabdi. (2021). *Annual Report and Accountability Summary*. Makassar.

PROFIL PENULIS



Syahir Fadli, S.E., M.Acc., ACPA.

merupakan dosen tetap PNS di Jurusan Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar sejak 2020. Aktif mengajar dan meneliti pada program studi Pendidikan Akuntansi FEB UNM dan penelitian pada akuntansi keuangan, auditing, dan akuntansi publik. Pendidikan tinggi yang ditempuh oleh penulis adalah Sarjana Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar (lulus 2014), Pendidikan Profesi Akuntan FEB Universitas Gadjah Mada (lulus, 2017), dan Master of Accounting FEB Universitas Gadjah Mada (lulus 2019). Selain menjadi dosen penulis juga aktif dalam pengelolaan anggaran dan keuangan *Non-Governmental Organization*. Penulis juga akan menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.


Email Penulis: syahirfadli@unm.ac.id.



BAB 18

AKUNTANSI BASIS KAS VS AKUNTANSI AKRUAL

Ricky Setiawan, S.Ak., M.Ak.
Universitas Negeri Makassar



Pendahuluan

Dalam dunia akuntansi terdapat dua basis akuntansi. Dua basis akuntansi tersebut adalah akuntansi basis kas dan akuntansi basis akrual (Praditha *et al.*, 2017). Kedua basis ini memiliki perbedaan dalam pengakuan akuntansi. Akuntansi basis kas mencatat transaksi pada saat kas masuk dan kas keluar, sedangkan akuntansi basis akrual mencatat transaksi pada saat kejadian ekonomi terjadi (Weygandt *et al.*, 2015).

Perbedaan kedua basis akuntansi tersebut sangat terlihat jelas. Yang satu hanya mencatat pada saat kas masuk dan/atau kas keluar, sedangkan satu lagi mencatat pada saat kejadian ekonomi terjadi, tanpa melihat apakah ada kas masuk maupun kas keluar. Dalam bab ini, pembahasan akan berfokus pada akuntansi basis kas dan akuntansi basis akrual, dari segi pengertian, penggunaan, kelebihan dan kekurangan dari kedua basis tersebut.

Akuntansi Basis Kas

Akuntansi basis kas merupakan basis akuntansi dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut Risal (2023) akuntansi basis kas merupakan proses pencatatan transaksi akuntansi pada saat terjadi penerimaan dan/atau pengeluaran kas. Akuntansi akan mengakui pendapatan pada saat kas diterima dan biaya pada saat kas keluar jika memakai akuntansi basis kas (Praditha *et al.*, 2017). Dari penjelasan sebelumnya, pencatatan akuntansi basis kas berfokus jika terjadi transaksi yang berhubungan langsung dengan kas, baik kas diterima maupun kas keluar.

Akuntansi basis kas merupakan akuntansi yang paling sederhana (Risal, 2023). Ini disebabkan pencatatan dilakukan hanya berhubungan dengan kas. Jika ada transaksi yang bersifat utang ataupun kredit, maka ini tidak mempengaruhi terhadap pencatatan akuntansi. Oleh karena itu, akuntansi basis kas cocok untuk perusahaan UMKM dan kecil (Weygandt *et al.*, 2015). Ini karena perusahaan UMKM belum memiliki transaksi yang banyak, sehingga

berhubungan dengan kas masuk atau keluar. Pencatatan ini menghasilkan akun utang dan piutang. Adanya kedua akun tersebut, akuntan harus melakukan banyak estimasi, aturan dan pedoman yang berlaku sehingga basis akrual ini membutuhkan pemahaman yang sangat tinggi.

4. Transparansi

Akuntansi basis kas hanya menampilkan informasi laporan keuangan yang hanya berhubungan dengan perubahan kas. Basis ini menghasilkan laporan keuangan yang kurang transparan karena informasi hanya berupa perubahan kas, tidak menampilkan transaksi yang bersifat kredit, seperti utang dan piutang. Berbeda dengan akuntansi basis akrual, basis akrual memberikan informasi yang lebih lengkap sehingga informasi lebih transparan dibandingkan dengan akuntansi basis kas.

5. Pengambilan Keputusan

Akuntansi basis kas lebih cocok untuk pengambilan keputusan jangka pendek. Ini cocok karena basis kas ini melakukan pencatatan berdasarkan perubahan kas. Perubahan kas ini biasanya berkaitan dengan operasional secara harian, mingguan dan bulanan dimana cocok untuk keputusan jangka pendek. Untuk keputusan jangka panjang, akuntansi basis akrual lebih cocok untuk keputusan tersebut. Akuntansi basis akrual mencatat utang jangka panjang dan piutang, sehingga harus ada estimasi perhitungan untuk kedua akun tersebut. Maka dari itu, basis ini lebih cocok untuk keputusan jangka panjang.

6. Pengguna Basis

Penggunaan akuntansi basis kas lebih cocok untuk pemerintahan, lembaga non profit, dan perusahaan kecil maupun UMKM. Ini karena kesederhanaan basis ini dalam pencatatan. Untuk akuntansi basis akrual, ini lebih cocok untuk perusahaan besar. Basis ini mendukung untuk transaksi yang jumlahnya banyak. Pemerintah pun sudah menggunakan akuntansi basis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pencatatan Akuntansi Basis Kas dan Akuntansi Basis Akrual

Pencatatan dalam kedua basis ini memiliki perbedaan. Perbedaan terjadi pada saat transaksi tersebut berhubungan dengan kas atau tidak. Seperti dijelaskan sebelumnya, akuntansi basis kas akan mencatat pada saat ada transaksi yang mempengaruhi perubahan kas.

Berbeda untuk akuntansi basis akrual, pencatatan dilakukan pada saat ada transaksi kejadian ekonomi pada saat transaksi terjadi, tanpa memperhatikan perubahan kas. Contoh pencatatan menggunakan kedua basis tersebut:

1. Pada Saat Ada Pendapatan

Akuntansi basis kas tidak mencatat pada saat ada pendapatan secara kredit, sedangkan akuntansi basis akrual akan melakukan pencatatan pendapatan tersebut. Jurnalnya adalah:

Piutang	XXX	
Pendapatan		XXX

Jika sudah ada kas masuk atas pendapatan sebelumnya maka untuk akuntansi basis akan mencatat sebagai:

Kas	XXX	
Pendapatan		XXX

Sedangkan jurnal untuk akuntansi basis akrual adalah:

Kas	XXX	
Piutang		XXX

2. Pada Saat Ada Beban

Akuntansi basis kas tidak mencatat pada saat ada beban secara kredit, sedangkan akuntansi basis akrual akan melakukan pencatatan beban tersebut. Jurnalnya adalah:

Beban	XXX	
Utang dagang		XXX

Jika sudah ada kas keluar atas beban sebelumnya maka untuk akuntansi basis akan mencatat sebagai:

Beban	XXX	
Kas		XXX

Sedangkan jurnal untuk akuntansi basis akrual adalah:

Utang dagang	XXX	
Kas		XXX

Daftar Pustaka

- Majid, J. (2019). *Akuntansi Sektor Publik* (1st ed.). Pusaka Almailda.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Pub. L. No. 64 (2013).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pub. L. No. 71 (2010).
- Praditha, R., Kartini, & Mande, H. (2017). REFORMASI AKUNTANSI : MENGAPA ACCRUAL BASIS LEBIH BAIK? *Jurnal AkMen*, 14(2), 221-225. <https://ejournal.nobel.ac.id/index.php/akmen/article/view/18>.
- Pramita, A. P., & Atmadja, S. S. (2021). Analisis Penerapan Metode Pencatatan Akuntansi Berbasis Cash pada Transaksi-transaksi CV. Tiga Permata (Agen BRILink). *Jurnal Ekomania*, 7(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.29062/ekomania.v10i2.10>.
- Risal, M. (2023). Cash Basis Vs Accrual Basis dalam Pengambilan Keputusan pada Entitas Syariah. *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(5), 419-425. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i5.734>.
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2015). *Financial Accounting: IFRS, 3rd Edition* (3rd ed.). Wiley.

PROFIL PENULIS




Ricky Setiawan, S.Ak., M.Ak.

Penulis lahir di Bandung, 9 November 1998, penulis merupakan dosen di Program Studi Akuntansi Sarjana Terapan, Jurusan Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Ketertarikan penulis terhadap akuntansi dimulai pada saat penulis duduk di bangku SMA sehingga penulis mengambil kelas Ilmu-Ilmu Sosial. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana dan Magister Akuntansi di Universitas Widyatama Bandung.

Sebelum berkarir sebagai dosen, penulis pernah bekerja di salah satu perusahaan akuntansi *Big 4* pada bagian *Risk Advisory*. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi asisten dosen di Universitas Widyatama. Mata kuliah yang pernah diajar oleh penulis selama menjadi asisten dosen yaitu Akuntansi Keuangan Lanjutan II dan *Enterprise Resource Planning (ERP)*. ERP yang diajar yaitu SAP Fundamental, SAP Financing dan SAP *Controlling*. Pengalaman tersebut membentuk keinginan penulis melakukan penelitian di bidang akuntansi. Penulis memiliki minat penelitian dalam bidang akuntansi meliputi aplikasi akuntansi, sistem informasi akuntansi, akuntansi manajemen dan akuntansi sektor publik. Penulis memiliki keinginan untuk melakukan penelitian demi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang akuntansi.

Email Penulis:

rickysetiawan091198@gmail.com, rickysetiawan@unm.ac.id



BAB 19

AKUNTANSI

ANGGARAN BERBASIS

KINERJA

Zulfadli Yusuf, S.Pd., Gr., M.Ak.
Universitas Negeri Makassar



Pendahuluan

Dokumen ini menyajikan modul komprehensif mengenai Akuntansi Anggaran Berbasis Kinerja (AABK), ditujukan bagi mahasiswa akuntansi, pegawai pemerintahan, dan praktisi keuangan. AABK merupakan pendekatan fundamental dalam pengelolaan keuangan publik yang bergeser dari fokus tradisional pada ketersediaan dana (input) menjadi fokus pada hasil (*output* dan *outcome*) dari penggunaan dana tersebut.

Pendekatan ini, menurut Mahmudi (2019), menjadi pilar penting dalam transformasi sektor publik, mendorong organisasi untuk lebih berorientasi pada pencapaian kinerja nyata. Evolusi ini sejalan dengan pandangan Halim (2020) mengenai perkembangan akuntansi keuangan daerah di Indonesia yang semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas.

Secara global, tren penganggaran berbasis kinerja juga terus menguat, sebagaimana disorot oleh James *et al.* (2019), sebagai respons terhadap tuntutan publik akan efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah. Di Indonesia, implementasi AABK merupakan bagian integral dari reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan tujuan utama untuk meningkatkan akuntabilitas sektor publik (Mardiasmo, 2018). Bab ini akan memandu anda secara sistematis melalui empat pembahasan utama: Konsep Dasar, Komponen dan Struktur, Mekanisme Penyusunan dan Pelaksanaan, serta peran spesifik Akuntansi dalam sistem AABK.

Transformasi paradigma ini, meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti resistensi terhadap perubahan, keterbatasan kapasitas SDM, serta kompleksitas pengukuran kinerja, menawarkan manfaat strategis signifikan bagi organisasi sektor publik. AABK dapat meningkatkan kualitas belanja, memperkuat sistem pengukuran kinerja, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih berbasis bukti.

Dalam era *digital* dan tuntutan *good governance* yang semakin mendesak, AABK menjadi semakin relevan dan urgensi untuk memahaminya tidak dapat diabaikan. Modul ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan aplikatif tentang AABK, didukung oleh referensi akademis dan regulasi yang relevan, guna

Sistem informasi manajemen kinerja dan keuangan yang terintegrasi memungkinkan pengumpulan, analisis, dan pelaporan data secara real-time, seperti yang dapat dilihat pada Sistem Informasi Kinerja Anggaran (SAKTI) atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SIPPN) di Indonesia.

Akuntansi Dalam Sistem AABK

Akuntansi memainkan peran transformatif dalam sistem AABK. Jika akuntansi tradisional berfokus pada pencatatan transaksi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan (seperti neraca dan laporan realisasi anggaran), maka akuntansi berbasis kinerja memperluas fokusnya pada pengukuran dan pelaporan kinerja non-keuangan.

Menurut Mahmudi (2019), transformasi akuntansi manajemen dalam sektor publik ini esensial untuk menggeser orientasi dari sekadar kepatuhan anggaran menjadi fokus pada pencapaian hasil dan nilai. Akuntansi dalam AABK tidak hanya menjadi pencatat transaksi, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk mendukung pengambilan keputusan yang berorientasi kinerja.

1. Pencatatan dan Pelaporan Berbasis Kinerja

Dalam AABK, sistem akuntansi harus mampu mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya ke setiap program, kegiatan, dan output. Ini membutuhkan sistem akuntansi biaya yang kuat untuk memverifikasi efisiensi biaya. Selain itu, pelaporan tidak lagi hanya melaporkan uang yang dihabiskan, tetapi juga kinerja yang dicapai.

Halim (2020) mengemukakan bahwa evolusi sistem akuntansi keuangan daerah merupakan kunci untuk mendukung AABK, di mana integrasi data keuangan dan kinerja menjadi imperatif. Sistem informasi akuntansi modern dirancang untuk mendukung AABK dengan menyediakan data yang komprehensif dan *real-time*, memungkinkan pelacakan biaya per program dan pengukuran indikator kinerja secara akurat.

Meskipun demikian, implementasi akuntansi berbasis kinerja tidak luput dari tantangan. Contoh konkret penerapan di Indonesia meliputi berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang secara bertahap mengadopsi sistem ini, meskipun dengan berbagai tingkat keberhasilan dan pembelajaran dalam

menyesuaikan kerangka kerja akuntansi mereka untuk mendukung pelaporan kinerja yang lebih transparan dan akuntabel.

2. Analisis Varian dan Integrasi Audit Kinerja

Analisis varian (*variance analysis*) adalah instrumen akuntansi manajemen yang vital dalam AABK. Analisis ini membantu manajemen mengidentifikasi area inefisiensi atau keberhasilan tak terduga. Varian dapat terjadi pada sisi biaya (realisasi lebih tinggi atau lebih rendah dari anggaran) dan sisi fisik (*output/outcome* lebih rendah atau lebih tinggi dari target).

Mahmudi (2019) menegaskan bahwa analisis varian tidak hanya sekadar alat akuntansi, melainkan fondasi penting bagi manajemen kinerja sektor publik untuk memahami akar penyebab penyimpangan antara target dan realisasi, mendorong perbaikan berkelanjutan. Halim (2020) menambahkan bahwa dalam akuntansi keuangan daerah, analisis varian berfungsi sebagai jembatan antara data keuangan dan kinerja, memungkinkan identifikasi dini masalah dan peluang. Varian dapat dikategorikan menjadi varian biaya (seperti varian harga dan varian kuantitas), varian efisiensi, dan varian volume, yang semuanya krusial untuk pemahaman yang komprehensif.

Penerapan analisis varian di Indonesia dapat dilihat pada berbagai kementerian dan pemerintah daerah yang mulai menggunakan metode ini untuk mengevaluasi efektivitas program. Misalnya, kementerian tertentu membandingkan anggaran perjalanan dinas dengan realisasi dan output yang dicapai, mengidentifikasi varian yang signifikan untuk penyesuaian kebijakan di masa depan.

3. Integrasi AABK dengan Audit Kinerja dan Pelaporan Keuangan

Integrasi AABK dengan pelaporan keuangan pemerintah, seperti yang diatur oleh standar akuntansi pemerintah, menciptakan siklus akuntabilitas yang lengkap. Laporan Keuangan (yang menunjukkan kepatuhan dan realisasi biaya) harus didukung oleh

Laporan Kinerja (yang menunjukkan nilai yang dihasilkan dari biaya tersebut).

Mardiasmo (2018) menyoroti bahwa integrasi audit kinerja ke dalam akuntansi sektor publik adalah kunci untuk memastikan pertanggungjawaban yang komprehensif, di mana auditor tidak hanya memeriksa kepatuhan keuangan, tetapi juga efisiensi dan efektivitas program pemerintah. Audit kinerja berperan krusial dalam memvalidasi keandalan informasi varian dan memastikan bahwa laporan kinerja mencerminkan realitas pencapaian program.

Peran teknologi modern sangat esensial dalam mendukung analisis varian dan audit kinerja. Sistem informasi akuntansi yang terintegrasi memungkinkan pengumpulan data keuangan dan non-keuangan secara real-time, memfasilitasi perhitungan varian otomatis, dan menyediakan dasbor kinerja yang interaktif. Dengan dukungan teknologi, proses audit kinerja juga menjadi lebih efisien, memungkinkan auditor untuk mengakses dan menganalisis data dalam skala besar, serta menghasilkan rekomendasi yang lebih cepat dan tepat.

Daftar Pustaka

- Halim, Abdul. (2020). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UII Press.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- OECD (2019). *Budgeting and Performance in the OECD: OECD Journal on Budgeting, Volume 2019/1*. Paris: OECD Publishing.
- Permenpan RB No. 53 Tahun 2014 Tentang *Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu*.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 249/PMK.02/2011 tentang *Pedoman Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Berbasis Kinerja*.

PROFIL PENULIS



Zulfadli Yusuf, S.Pd., Gr., M.Ak.

Penulis merupakan lulusan Sarjana Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Makassar, Program Profesi Guru (PPG) Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Makassar, dan Magister Akuntansi Universitas Muslim Indonesia. Ketertarikannya pada dunia kepenulisan bermula saat aktif sebagai salah satu Warga Kampung Seni Akuntansi (KASTA) Himpunan Mahasiswa Akuntansi, FEB UNM.


Ia pernah mengabdikan diri sebagai peserta program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM-3T) di Tanah Duan Lolat, Kepulauan Tanimbar, sebuah pengalaman yang memperkaya pandangannya dalam berkarya. Penulis telah menerbitkan beberapa karya, antara lain *Tabe Karaeng* (kumpulan puisi, 2018), *Jalur Ke Neraca* (antologi puisi, 2019), dan *Piutang Rindu: Sebuah Novel dengan Pendekatan Akuntansi* (2021). Selain itu, ia juga tercatat sebagai Alumni *Emerging Writers 2019 Makassar International Writers Festival* (MIWF) dalam kategori Novel.

Email Penulis: zulfadli.yusuf@unm.ac.id.



BAB 20
BIAYA DAN *COSTING*
DALAM LAYANAN
PUBLIK

Dr. Magda Siahaan, S.E., M.Pd., M.Ak, CA., Ak.
Trisakti School of Management



Pengantar Biaya dan *Costing* Dalam Layanan Publik

Biaya dan *costing* merupakan aspek penting dalam manajemen layanan publik yang berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan pemerintah atau instansi publik.

Dalam konteks sektor publik, biaya tidak hanya berfungsi sebagai ukuran pengeluaran, tetapi juga alat untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan sumber daya publik (Horngren *et al.*, 2014; Pradipta *et al.*, 2025).

1. Definisi dan Ruang Lingkup Biaya Dalam Sektor Publik

Biaya dalam layanan publik mengacu pada seluruh pengorbanan sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau menyediakan layanan tertentu kepada masyarakat.

Tidak seperti sektor swasta yang fokus pada laba, sektor publik lebih menekankan pada nilai penggunaan dan manfaat sosial, sehingga penghitungan biaya harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan tanggung jawab publik (Mardiasmo, 2016).

Ruang lingkup biaya mencakup biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya tetap, dan variabel yang terjadi selama proses penyediaan layanan (Drury, 2018).

2. Peran Biaya dan *Costing* Dalam Pengelolaan Layanan Publik

Costing atau penghitungan biaya adalah proses identifikasi, pengumpulan, pengelompokan, serta analisis biaya yang terkait dengan aktivitas layanan publik. Proses ini sangat vital dalam mendukung pengambilan keputusan manajerial, mulai dari pengalokasian anggaran, penentuan tarif layanan, hingga evaluasi program dan proyek (Bracci, 2020).

Selain itu, *accurate costing* membantu pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga publik dapat menilai efisiensi penggunaan dana publik (Berman & Wang, 2015). Dalam era desentralisasi dan tuntutan *good governance*, penguasaan terhadap teknik biaya dan *costing* menjadi salah satu kompetensi utama bagi pengelola layanan publik. Hal ini memungkinkan instansi menghasilkan layanan yang berkualitas dengan biaya yang terkendali dan sesuai dengan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif.

meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memberikan ruang untuk partisipasi publik dalam pengawasan. Akuntabilitas biaya memastikan bahwa sumber daya yang diterima benar-benar digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi publik.

Studi Kasus dan Praktik Terbaik

Pembelajaran dari studi kasus dan praktik terbaik dalam pengelolaan biaya dan *costing* di sektor publik sangat penting untuk meningkatkan kualitas manajemen keuangan dan layanan. Melalui contoh-contoh konkret, instansi pemerintah dapat mengadopsi strategi dan metode yang telah terbukti efektif serta menghindari kesalahan yang sama.

1. Contoh Penerapan *Costing* Di Berbagai Jenis Layanan Publik

Beberapa instansi pemerintah di Indonesia dan negara lain telah berhasil mengimplementasikan sistem *costing* yang mendukung efisiensi dan peningkatan kualitas layanan.

Misalnya, rumah sakit pemerintah menggunakan metode *Activity-Based Costing* untuk mengidentifikasi biaya perawatan pasien secara detail, sehingga mampu mengelola sumber daya medis dengan lebih optimal. Contoh lain adalah instansi pendidikan yang melakukan penghitungan biaya per siswa untuk menentukan alokasi dana berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.

2. Pembelajaran Dari Pengalaman Instansi Pemerintah Di Indonesia Dan Internasional

Pengalaman instansi pemerintah di berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *costing* sangat bergantung pada komitmen pimpinan, pelatihan sumber daya manusia, dan dukungan teknologi informasi.

Negara-negara seperti Australia, Kanada, dan Inggris telah mengembangkan sistem *costing* yang terintegrasi dengan akuntansi manajemen untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas. Di Indonesia, beberapa pemerintah daerah juga mulai menerapkan sistem *costing* dengan dukungan kebijakan reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas SDM.

Contoh dari berbagai instansi pemerintah di Indonesia dan internasional menunjukkan keberhasilan implementasi *costing* dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, yang didukung oleh pelatihan SDM, komitmen pimpinan, dan teknologi informasi (Mardiasmo, 2016; Pradipta *et al.*, 2025).

Daftar Pustaka

- Berman, E. M. and Wang, X. (2015). *Performance and Accountability in Public and Nonprofit Organizations*. Cq Press.
- Bracci, E. (2020). Public Sector Costing and Performance Measurement, *Public Money & Management*, 40(3), pp. 209–216.
- Drury, C. (2018). *Management and Cost Accounting*. 10th ed. Cengage Learning.
- Horngren, C. T., Sundem, G. L. and Stratton, W. O. (2014) *Introduction to Management Accounting*. 16th ed. Pearson.
- Mardiasmo (2016) *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.
- Newberry, S. and Peters, G. F. (2016). Cost Accounting in the Public Sector: Issues and Challenges, *Government Finance Review*, 32(2), pp. 18–25.
- Pradipta, A., Kanti, A. and Siahaan, M. (2025) *Akuntansi Untuk Perusahaan Jasa dan Dagang*. Litnus. Available at: <https://repository.stietrisakti.ac.id/handle/123456789/390>.

PROFIL PENULIS



Dr. Magda Siahaan, S.E., M.Pd., M.Ak., CA., Ak.

Doktor Ilmu Akuntansi dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2023, Magda Siahaan memulai pengalaman kerjanya sebagai praktisi pada perusahaan nasional di bidang akuntansi, keuangan, operasional, *quality assurance*, audit maupun *business development*. Berbagai pengalaman tersebut mendukung Magda Siahaan sebagai seorang Dosen yang dimulai tahun 2015 di Sekolah Tinggi Teknik Karawang, dan selanjutnya tahun 2019 hingga sekarang menjadi dosen dan peneliti di *Trisakti School of Management*. Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti ini melanjutkan dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 2012 di Universitas Negeri Jakarta jurusan Magister Pendidikan, dan Magister Akuntansi tahun 2019 di Universitas Trisakti. Adapun berbagai sertifikasi yang dimiliki seperti *Chartered Accountant*, *Certificate in Audit Committee Practices*, *Certificate in Data Analytics*, *Associate Certified Public Accountant* dan juga Register Negara Akuntan. Latar belakang pendidikan formal dan nonformal, serta pengalaman kerja tersebut sebagai dasar Magda Siahaan konsisten melakukan penelitian pada bidang audit, bisnis, dan akuntansi manajemen. Adapun selain peneliti, Magda Siahaan juga aktif sebagai *reviewer* di beberapa jurnal nasional maupun jurnal internasional bereputasi.

Email Penulis: mgd.ddm.z@gmail.com.



BAB 21
KEMITRAAN
PEMERINTAH-SWASTA
(PUBLIC *PRIVATE*
PARTNERSHIP/PPP

Rafie Akbar Sumarno, S.E., M.Ak.
Politeknik Negeri Tanah Laut



Definisi dan tujuan

Pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan fundamental bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan publik, baik berupa fasilitas transportasi, energi, air bersih, maupun kesehatan.

Namun, keterbatasan fiskal sering menjadi hambatan utama. Defisit anggaran, beban subsidi, dan kebutuhan belanja rutin membuat pemerintah sulit membiayai seluruh proyek infrastruktur hanya dari APBN maupun APBD.

Sebagai solusi, muncullah konsep Kemitraan Pemerintah-Swasta (*Public Private Partnership/PPP* atau dalam konteks Indonesia disebut Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPS). Skema ini memungkinkan keterlibatan sektor swasta dalam pembiayaan, pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan aset publik. Pemerintah tetap memegang peran sebagai regulator dan pengawas, sementara swasta terlibat sebagai penyedia modal, teknologi, maupun manajemen.

Dalam kerangka akuntansi sektor publik, PPP menjadi penting karena menimbulkan implikasi terhadap pencatatan aset, kewajiban, belanja, dan pendapatan pemerintah. Transparansi serta akuntabilitas laporan keuangan publik sangat bergantung pada bagaimana transaksi PPP dicatat sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Kemitraan Pemerintah-Swasta (PPP/KPS/KPBU) adalah kerangka kerjasama antara entitas publik (grantor) dan sektor swasta (operator/investor) untuk mendesain, membiayai, membangun, mengoperasikan, dan/atau memelihara infrastruktur dan/atau layanan publik. Tujuannya antara lain:

1. Mengatasi keterbatasan fiskal pemerintah,
2. Memanfaatkan efisiensi dan inovasi swasta,
3. Mempercepat penyediaan layanan publik,
4. Membagi risiko antara pihak yang paling mampu menanggungnya.

Kerangka hukum dan institusional: secara umum (khususnya pada konteks negara berkembang seperti Indonesia) terdapat:

- g. Bukti pemenuhan KPI (laporan teknis dan sanksi) apakah penerapan sanksi tercatat?.

7. Contoh temuan audit umum dan rekomendasi

- Temuan: Pembayaran availability dilakukan tanpa verifikasi kinerja, rekomendasi: perkuat mekanisme verifikasi (*3rd party performance certifier*).
- Temuan: Garansi pendapatan tidak diungkapkan, rekomendasi: catat sebagai kontinjensi/disklosur sesuai probabilitas.
- Temuan: Dokumen procurement tidak lengkap, rekomendasi: audit forensik dan perbaikan proses pengadaan.

8. Indikator Kinerja (KPI) Untuk *Monitoring* PPP

Contoh KPI yang relevan:

- Availability Rate* (%): persentase waktu layanan tersedia.
- Downtime* (jam) per periode.
- Collection Efficiency* (%): jumlah pendapatan yang tertagih dibanding potensi.
- DSCR Aktual: *actual debt service coverage ratio*.
- Cost per unit layanan: *operational cost* per pengguna atau per km.

9. Praktis Untuk Auditor: Langkah Ringkas Audit

- Pelajari kontrak & kebijakan akuntansi yang berlaku.
- Identifikasi area risiko tinggi.
- Lakukan prosedur substantif dan konfirmasi pihak ketiga.
- Uji sample transaksi besar (konstruksi, pembayaran).
- Inspeksi fisik dan uji kinerja.
- Evaluasi pengungkapan dan siapkan *management letter*.

Studi Kasus PPP di Indonesia

1. Jalan Tol Trans Jawa

Proyek jalan tol banyak dikembangkan melalui skema PPP, misalnya ruas Tol Semarang-Solo. Pemerintah menyediakan tanah (*land acquisition*), swasta membangun dan mengoperasikan.

Pencatatan pemerintah mencatat dukungan konstruksi sebagai belanja modal.

2. **Proyek SPAM Umbulan**

Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan di Jawa Timur merupakan proyek KPBU dengan dukungan pemerintah pusat. Pemerintah mencatat *availability payment* sebagai belanja dalam laporan keuangan.

3. **Bandara Kertajati**

Pengelolaan bandara dilakukan melalui kerjasama antara BUMN dan swasta. Laporan keuangan pemerintah mencatat porsi penyertaan modal negara.

4. **Pelajaran**

- a. Transparansi laporan keuangan menentukan keberhasilan PPP.
- b. Pengendalian risiko harus jelas sejak awal.
- c. Komitmen pemerintah penting untuk menjaga kepercayaan investor.

Tantangan dan Prospek PPP

1. **Tantangan**

- a. Birokrasi rumit: proses pengadaan panjang.
- b. Ketidakpastian regulasi: perubahan aturan mengurangi minat investor.
- c. Kurangnya kapasitas institusi: aparat pemerintah belum sepenuhnya memahami PPP.
- d. Resiko politik: proyek jangka panjang rentan terhadap perubahan kebijakan.

2. **Prospek**

- a. PPP masih sangat relevan untuk pembangunan infrastruktur.
- b. Pemerintah Indonesia menargetkan percepatan investasi melalui skema KPBU.
- c. Digitalisasi akuntansi dan *e-reporting* akan meningkatkan transparansi.
- d. Potensi penerapan di sektor baru: energi terbarukan, teknologi informasi, rumah sakit daerah.

Daftar Pustaka

- International Bank for Reconstruction and Development. (2014). Kemitraan Pemerintah Swasta Panduan Referensi Versi 2.0. *PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Guarantee Fund*.
- Sumarno, R. A. (2024). *Kemitraan Pemerintah-Swasta (Public Private Partnership/PPP)*. Dalam A. Rasyid & F. Hidayat (Eds.), *Akuntansi publik dan keuangan daerah* (hlm. 301–345). Media Nusa.

PROFIL PENULIS



Rafie Akbar Sumarno, S.E., M.Ak.

Dalam Mendalami Ilmu Akuntansi penulis memulai perjalanan tahun 2014 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Akuntansi Universitas RIAU pada tahun 2018. Sebelum melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, penulis sempat bekerja selama dua tahun sebagai auditor dan memutuskan melanjutkan studi S2 di prodi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.



BAB 22
AKUNTANSI UNTUK
ASET BERSEJARAH DAN
WARISAN BUDAYA

Dr. Ay Maryani, S.E., M.Si.
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



Pendahuluan

Aset bersejarah dan warisan budaya sangat berharga karena menjadi landasan identitas bangsa mempererat solidaritas, dan membangkitkan rasa bangga nasional. Sebagai aset publik, warisan ini tidak hanya membuka peluang ekonomi melalui pariwisata dan industri kreatif, tetapi juga menjadi sumber pengetahuan dan pembelajaran dari sejarah untuk membangun masa depan yang lebih baik (Stephenson L., 2023), (Clancy P, 2025). Aset bersejarah dan warisan budaya memiliki nilai sosial, budaya, dan historis yang melekat. Nilai tersebut berbeda dari aset ekonomi biasa yang diukur berdasarkan potensi menghasilkan arus kas atau manfaat finansial (Agustini & Putra, 2011), (Solikah & Achadiyah, 2017).

Oleh sebab itu beberapa kesulitan yang dihadapi dalam akuntansi asset bersejarah meliputi kesulitan dalam pengakuan dan pengukuran nilai non-moneter karena nilainya tidak hanya sebatas finansial tetapi juga historis dan budaya; keterbatasan standar dan praktik akuntansi yang berlaku untuk jenis aset ini; kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan pemahaman konsep akuntansi yang diperlukan; serta risiko kehilangan atau kerusakan, yang menuntut sistem pencatatan dan pengawasan yang kuat. (Agustini & Putra, 2011), (Solikah & Achadiyah, 2017). Tulisan ini akan membahas mengenai konsep, isu, dan praktik akuntansi terkait aset bersejarah.

Konsep dan Karakteristik Aset Bersejarah

Di Indonesia, konsep aset bersejarah biasanya dikaitkan dengan kekayaan negara yang masuk dalam kategori barang milik negara (BMN). Barang ini dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah, dan tidak dimaksudkan untuk dipindahtangankan, melainkan untuk dipelihara sebagai identitas bangsa. Misalnya, candi, monumen, bangunan bersejarah, serta arsip dan manuskrip kuno yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah.

1. Definisi Aset Bersejarah dan Warisan Budaya

Aset bersejarah memiliki definisi yang beragam sesuai dengan persepsi masing-masing negara, bangsa, atau komunitas. Indonesia mengatur asset bersejarah dalam Pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 Tahun 2010 yang menyebutkan

Studi Kasus dan Praktik

Dalam pembahasan ini akan disajikan tabel yang berisi praktik-praktik perlakuan akuntansi di Indonesia dan United Kingdom (UK).

Belum ada ISAK (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan) yang secara khusus membahas *heritage assets* di Indonesia. Namun lembaga pendidikan, museum, dan yayasan sering mengadopsi prinsip FRS 30 (UK) atau IPSAS 17 sebagai referensi tambahan non-mandatori untuk pelaporan internal.

Jenis Aset	Perlakuan Akuntansi	Catatan Laporan Keuangan
Candi Borobudur	Diungkapkan sebagai aset bersejarah tidak disusutkan	Diungkapkan nilai dan kebijakan pemeliharaan
Koleksi Museum Nasional	Tidak diakui nilainya jika tak dapat diukur	Diungkapkan deskripsi koleksi
Gedung bersejarah (mis. Istana Negara)	Diakui sebagai aset tetap – nilai perolehan historis	Tidak disusutkan, dijelaskan dalam catatan

Tabel 22.1: Praktik Akuntansi Aset Bersejarah di Indonesia

Sumber: PSAP No. 7 Tahun 2010.

FRS 30: *Heritage Assets* diterbitkan oleh UK *Accounting Standards Board* (ASB) pada Juni 2009. FRS 30 berlaku efektif untuk periode akuntansi yang dimulai 1 April 2010 atau setelahnya. FRS 30 melengkapi FRS 15 (*Tangible Fixed Assets*) dan berlaku di bawah UK GAAP lama. Walaupun kini digantikan oleh FRS 102 (sejak 2015), prinsip-prinsip FRS 30 tetap menjadi referensi utama praktik pelaporan *heritage assets* di Inggris dan diadopsi dalam pedoman sektor *publik & charity*.

Tabel 22.2: Praktik Akuntansi Aset Bersejarah di United Kingdom (UK)

<i>British Museum</i>	Koleksi artefak, patung, naskah	Sebagian besar tidak diukur nilainya karena sulit ditentukan; hanya diungkapkan secara deskriptif dengan jumlah koleksi
-----------------------	---------------------------------	---

		dan kebijakan konservasi.
<i>National Gallery</i>	Lukisan & karya Seni klasik	Diukur berdasarkan nilai asuransi (<i>insurance value</i>) dan diungkapkan nilai total koleksi. Tidak disusutkan.
<i>University of Oxford</i>	Koleksi ilmiah & arsip	Beberapa diakui pada biaya historis atau nilai wajar; sisanya hanya diungkapkan.
<i>The National Trust</i>	Bangunan bersejarah & taman nasional	Aset diakui sebagian besar pada nilai nominal; kebijakan pelestarian diungkapkan detail.

Sumber: FRS 30.

Kesimpulan

Konsep dan Karakteristik, aset bersejarah adalah aset yang memiliki nilai budaya, sejarah, lingkungan, atau pendidikan yang signifikan, bukan terutama karena manfaat ekonominya. Contohnya: museum, monumen, bangunan bersejarah, dan artefak. Karakteristik utamanya adalah unik, sulit diganti, jarang diperjualbelikan, dan nilainya sulit diukur secara andal.

Isu Akuntansi, tantangan utama dalam pelaporan aset bersejarah meliputi: Penilaian: sulit menentukan nilai wajar karena tidak ada pasar aktif. Depresiasi: banyak aset tidak mengalami penurunan nilai konvensional karena dirawat agar tetap lestari. Pengungkapan: perlu keseimbangan antara informasi keuangan dan nilai budaya/non-keuangan.

Praktik Akuntansi, internasional (FRS 30, IPSAS 17, IAS 16): memperbolehkan pengakuan aset bersejarah sebagai aset tetap, tetapi mengutamakan pengungkapan nilai budaya dan kebijakan pelestarian daripada pengukuran nilai moneterinya. Indonesia (PSAP No. 07/2010): mengakui aset bersejarah sebagai aset tetap pemerintah, namun menekankan pelestarian, pengamanan, dan pengungkapan deskriptif ketimbang penilaian finansial.

Secara umum, akuntansi aset bersejarah lebih menekankan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dibanding pengukuran nilai finansial, karena tujuan utamanya adalah pelestarian warisan budaya, bukan keuntungan ekonomi.

Daftar Pustaka

- Agustini, A.T & Putra, H.S. (2011). Aset Bersejarah Dalam Pelaporan Keuangan Entitas Pemerintah. *JEAM*, X (1).
- Colling, S. (2010). *FRS 30-Heritage Assets. FRS 30-Heritage assets / AccountingWEB*.
- Financial Reporting Standard (FRS.30) (January 2010). *Heritage Assets. Charity Commission/OSCR: Panduan Akuntansi Untuk Heritage Assets di Sektor Charity*.
- Feschiyan, D.M. (2025). Standardized Model for Accounting of Heritage Assets in the Public Sector of Bulgaria. *Economic Alternatives*, Issue 3, pp. 636-657. DOI: <https://doi.org/10.37075/EA.2025.3.02>.
- Giuseppe Grossi and Assoc. Prof. Ileana Steccolini P, Biondi L, Lapsley I (2014). Accounting, Transparency And Governance: The Heritage Assets Problem. *Qualitative Research in Accounting & Management*, Vol. 11 No. 2 pp. 146–164, doi: <https://doi.org/10.1108/QRAM-04-2014-0035>.
- Ellwood, S., & Greenwood, M. (2016). Accounting for Heritage Assets: Does Measuring Economic Value 'Kill The Cat'? *Critical Perspectives on Accounting*, 38, 1-13. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2015.05.00>
- Haldma T, Näsi S, Grossi G, Christiaens J, Rommel J, Barton A, Everaert P (2012). Should All Capital Goods Of Governments Be Recognised As Assets In Financial Accounting?. *Baltic Journal of Management*, Vol. 7 No. 4 pp. 429–443, doi: <https://doi.org/10.1108/17465261211272175>.
- Anggara Aulia Himokta. (2024). Penerapan Akuntansi Pada Aset Bersejarah (Studi Kasus Pada Kerajaan Istana Kuning, Pangkalan Bun Kalimantan Tengah). *Jurnal Ekonomi dan Sosial Pembangunan* Vol. 2 No. 2.
- International Public Sector Standard (IPSAS)-17. (Revised 2010). Property, Plant and Equipment. *International Federation of*

- Accountants* (IFAC) melalui IPSASB. Website: <https://www.ipsasb.org>.
- IAS 16: *Property, Plant and Equipment* (IFRS Foundation, revised 2021). Website resmi: <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/>.
- Muna Abd Al-Ally Musa & Haitham Ahmed Salman (2021). The Crime of Excavating Antiquities Without Consent. *AL-Mouhaqiq Al-Hilly Journal for Legal and Political Science*, vol. 13, no. 4. Pages: 2247-2279. [d59a3823719c70dacea1405449671dd8.pdf](https://doi.org/10.59a3823719c70dacea1405449671dd8.pdf).
- Ouda, Hassan A. G. (2014). Towards a Practical Accounting Approach for Heritage Assets: An Alternative Reporting Model for the NPM Practices. *Journal of Finance and Accounting* 2.2 (2014): 19-33. DOI: 10.12691/jfa-2-2-1.
- Paula Clancy (2025). Cultural Heritage and Sustainability as Intellectual Property Assets. *Gowling WLG. Lexologi*.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP -07)(2010). *Aset Bersejarah*.
- Retha Maya Masitta & Anis Chariri. (2015). Problematika Akuntansi Heritage Assets: Pengakuan, Penilaian dan Pengungkapannya dalam Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Pengelolaan Museum Jawa Tengah Ronggowarsito). *Diponegoro of Journal Accounting*. Volume 4, Nomor 3, Hal: 1-11 <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- Sholikah, M. and Achadiyah, B.N. (2017). Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah "Candi Rimbi" Jombang. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*. 6, 2 (Oct. 2017), 29-47. DOI:<https://doi.org/10.21831/nominal.v6i2.16644>.
- Stephenson L. (2023). Cultural Heritage: Its Significance and Preserving. *Anthropology*. 11(4), 1-2.
- Tapete, D., Cigna, F. (2020). Poorly known 2018 floods in Bosra UNESCO site and Sergiopolis in Syria unveiled from space using Sentinel-1/2 and COSMO-SkyMed. *Sci Rep* 10, 12307. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-69181-x>.


PROFIL PENULIS



Dr. Ay Maryani, S.E., M.Si.


Penulis lahir di Banyumas pada tanggal 19 Mei 1979. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Perbankan Syariah. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, S2 pada Jurusan Akuntansi, Universitas Trisakti Jakarta, serta S3 program Pengkajian Islam di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Selain menjadi dosen, penulis menekuni bidang penelitian. Penulis termotivasi untuk menulis tentang Auditing, untuk memenuhi tugas akademis, membantu pendidik dan mahasiswa memahami konsep auditing dan membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya auditing dalam bisnis dan organisasi. Adapun, sejumlah karya tulis yang sudah diterbitkan lima tahun terakhir di antaranya, Buku: Akuntabilitas Amil Di Era Transformasi (2024). Artikel: Penerapan *Balanced Scorecard* pada Pendidikan Tinggi Negeri (2023), Mengukur Kepuasan Mahasiswa terhadap Uang Kuliah Tunggal Menggunakan *Importance Performance Analysis and Customer Satisfaction Index* (2023), *Do Peer Banks Effects Islamic Bank Financial Leverage Decisions* (2022), *Religious Behavior of Students UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2020), *Celebrity Endorser in Supporting SMEs through Social Media in Pandemic Situation* (2020). Korespondensi melalui email ay.maryani@uinjkt.ac.id.



BAB 23
ISU *SUSTAINABILITY*
DAN PELAPORAN
BERKELANJUTAN

Azwani Aulia., S.E., M.Ak.
Universitas Adiwangsa Jambi



Peran Sektor Publik Dalam Pencapaian SDGs dan Pelaporan Keberlanjutan: Tantangan dan Pendekatan Terpadu

Sektor publik memiliki peran penting dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam mengelola risiko iklim dan sosial serta mengukur nilai publik. Manajemen yang baik terhadap risiko fiskal yang ditimbulkan oleh perubahan iklim menjadi krusial untuk keberlanjutan layanan publik (Aulia, Siregar and Aripin, 2024).

Di sisi lain, sistem pelaporan berkelanjutan yang efektif sangat diperlukan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip tata kelola yang transparan dalam siklus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan audit (Erin and Adegboye, 2021). Tata kelola yang mengutamakan akuntabilitas dan transparansi juga menjadi fondasi bagi laporan yang dapat dipertanggungjawabkan dan berorientasi pada nilai publik.

Pentingnya pemahaman terhadap pemangku kepentingan dalam pelaporan sektor publik juga harus diperhatikan, karena mereka memainkan peran kunci dalam menentukan isu-isu material yang harus dilaporkan (Freeman, 2015). Metodologi penilaian materialitas dan *public interest test* dapat membantu memastikan laporan yang disampaikan relevan dengan kepentingan masyarakat dan bukan hanya memenuhi kewajiban administratif (Zarzycka and Krasodomska, 2021).

Selain itu, pendekatan *Triple Bottom Line* (TBL+G) yang mengukur kinerja sektor publik dari aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola menjadi penting dalam pengukuran keberlanjutan (Elkington, 2013). Penggunaan indikator kinerja seperti pengurangan emisi gas rumah kaca dan akses terhadap layanan publik memungkinkan sektor publik untuk lebih terfokus pada pencapaian tujuan keberlanjutan (Aulia, Siahaan and Siregar, 2025).

Integrasi perencanaan, penganggaran, dan pengadaan sektor publik melalui metode seperti *Performance-based Budgeting* dan *Green Budgeting* menjadi kunci dalam menyelaraskan anggaran dengan tujuan keberlanjutan (Hellmeister and Richins, 2019).

berkelanjutan dan menganalisis dampak perubahan iklim terhadap anggaran sektor publik (Tak, Zulnaldi and Eu, 2024)

3. Pengadaan Berkelanjutan

Pengadaan berkelanjutan mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dalam pemilihan barang dan jasa oleh sektor publik. Pendekatan ini mendorong sektor publik untuk membeli produk yang ramah lingkungan, memberikan manfaat sosial, dan mendukung ekonomi yang inklusif.

Dengan mengintegrasikan pengadaan berkelanjutan dalam perencanaan dan penganggaran, pemerintah dapat memperkuat ketahanan masyarakat terhadap tantangan lingkungan serta memaksimalkan dampak positif dari kebijakan publik (OJK, 2023).

Integrasi Pendekatan Keberlanjutan Dalam Penganggaran dan Pengadaan Sektor Publik: PBB, *Green Budgeting*, dan Pengadaan Berkelanjutan

Pendekatan Pemanfaatan teknologi dan sistem data yang efisien dalam pelaporan sektor publik merupakan langkah penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Melalui penerapan data *governance* yang kuat, interoperabilitas antar sistem, penggunaan open data, serta alat-alat seperti *dashboard* kinerja, XBRL, dan otomasi, sektor publik dapat memastikan bahwa informasi yang disajikan kepada masyarakat adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, *assurance* yang diberikan oleh auditor eksternal dan lembaga pengawasan serta *monitoring* berkelanjutan memainkan peran krusial dalam menjamin kualitas laporan sektor publik.

1. *Data Governance*, Interoperabilitas, dan Open Data

Data governance mengatur pengelolaan data dalam sektor publik untuk memastikan bahwa data yang digunakan akurat, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Interoperabilitas antar sistem memungkinkan data dari berbagai sumber dapat saling berkomunikasi dan berbagi dengan aman. Open data, yang memberikan akses terbuka bagi publik terhadap data pemerintah, dapat meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (Lee, 2008).

2. **Dashboard Kinerja, (Inline) XBRL, dan Otomasi**

Dashboard kinerja memungkinkan pemantauan real-time terhadap indikator kinerja utama (KPI), meningkatkan transparansi dalam penilaian kinerja sektor publik. XBRL dan *Inline* XBRL memungkinkan pelaporan keuangan yang efisien dan transparan, memberikan akses mudah kepada pengguna non-teknis tanpa mengorbankan integritas data.

Otomasi dalam pelaporan sektor publik mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data (Chou, Chang and Peng, 2016).

3. **Assurance, Audit & Evaluasi Dampak**

Assurance merupakan proses untuk memastikan bahwa laporan keuangan dan non-keuangan sektor publik mencerminkan kinerja yang akurat dan dapat dipercaya.

Auditor eksternal dan lembaga pengawasan berperan penting dalam memberikan keyakinan atas kualitas laporan dan kinerja pemerintah (Alkebeese *et al.*, 2021). Evaluasi dampak bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan publik memberikan dampak yang diharapkan bagi masyarakat.

4. **Continuous Monitoring & Roadmap Implementasi**

Continuous monitoring atau pemantauan berkelanjutan memungkinkan deteksi dini terhadap masalah dalam program dan kebijakan sektor publik, memastikan bahwa penyimpangan dapat segera diperbaiki.

Roadmap implementasi adalah rencana yang jelas untuk mencapai sistem pelaporan yang lebih efisien dan transparan, termasuk penguatan kapasitas, pengembangan teknologi, dan pembaruan regulasi yang mendukung pelaporan sektor publik (Crittenden *et al.*, 2011).

Daftar Pustaka

- Alkebsee, R.H. *et al.* (2021). Gender Diversity In Audit Committees And Audit Fees: Evidence From China. *Managerial Auditing Journal*, 36(1), pp. 72–104. Available at: <https://doi.org/10.1108/MAJ-06-2019-2326>.
- Aulia, A. *et al.* (2025). Achieving SDGs: Exploring Financial Slack, Board Gender Diversity, Multiple Large Shareholders, and ESG Disclosure in Asia-Pacific Manufacturing Sector, *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5(2), p. e04507. Available at: <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n02.pe04507>.
- Aulia, A., Siahaan, M. and Siregar, J.K. (2025). Green Accounting and Environmental Performance on Financial Performance: Strategic Insights from the Mining Industry in Indonesia, *Asian Journal of Environmental Research*, 2(1), pp. 16–28. Available at: <https://doi.org/10.69930/ajer.v2i1.272>.
- Aulia, A., Siregar, J.K. and Aripin, F.A.R. (2024). The Role Of Green Culture In Generating Sustainable Economic Performance And Increasing Post-Pandemic Stock Prices Healthcare Sector In Indonesia And Singapore, *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 11(2), pp. 408–426. Available at: <https://doi.org/10.30656/jak.v11i2.7315>.
- Chou, C.-C., Chang, C.J. and Peng, J. (2016). Integrating XBRL Data With Textual Information In Chinese: A Semantic Web Approach, *International Journal Of Accounting Information Systems*, 21, pp. 32–46. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.accinf.2016.04.002>.
- Christensen, H.B., Hail, L. and Leuz, C. (2021). Mandatory CSR And Sustainability Reporting: Economic Analysis And Literature Review, *Review of Accounting Studies*, 26(3), pp. 1176–1248. Available at: <https://doi.org/10.1007/s11142-021-09609-5>.
- Crittenden, V.L. *et al.* (2011). Market-Oriented Sustainability: A Conceptual Framework And Propositions, *Journal of The Academy ...* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1007/s11747-010->

0217-2.

Elkington, J. (2013). Enter the triple bottom line, *The Triple Bottom Line: Does it All Add Up*, 1(1986), pp. 1–16. Available at: <https://doi.org/10.4324/9781849773348>.

Erin, O. and Adegboye, A. (2021). Do Corporate Attributes Impact Integrated Reporting Quality? An Empirical Evidence, *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 20(3/4), pp. 416–445. Available at: <https://doi.org/10.1108/JFRA-04-2020-0117>.

Freeman, R.E. (2015). Stakeholder theory, *A Guide to Key Theories for Human Resource Management Research*, pp. 294–300. Available at: <https://doi.org/10.5840/iabsproc20011251>.

Gunarsih, T. and Ismawati, Y. (2018). Sustainability Report And Firm Performance: Study In Mining And Metal And Food Processing industry Indonesia Stock Exchange 2014-2017, *Journal of Governance and Integrity* [Preprint]. Available at: <https://journal.ump.edu.my/jgi/article/view/5533>.

Hellmeister, A. and Richins, H. (2019). Green To Gold: Beneficial Impacts of Sustainability Certification And Practice on Tour Enterprise Performance, *Sustainability (Switzerland)*, 11(3), p. 709. Available at: <https://doi.org/10.3390/su11030709>.

Karmani, M. *et al.* (2024). Are CSR And Advertising Complements or Substitutes In Spurring Firm Visibility? Moderating Effect Of Board Diversity, CSR Committees, And Financial Slack, *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 31(2), pp. 755–775. Available at: <https://doi.org/10.1002/csr.2601>.

Kloviené, L. and Speziale, M.T. (2015). Sustainability Reporting as a Challenge for Performance Measurement: Literature Review, *Economics and Business*, 26, p. 44. Available at: <https://doi.org/10.7250/eb.2014.019>.

Laskar, N. and Maji, S.G. (2017). Corporate Sustainability Performance And Firm Performance: Evidence From India and South Korea, *International Journal of Corporate ...* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1504/IJCSSR.2017.084289>.

- Lee, M.D.P. (2008). A Review Of The Theories Of Corporate Social Responsibility: Its Evolutionary Path And The Road Ahead, *International Journal of Management Reviews*, 10(1), pp. 53–73. Available at: <https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2007.00226.x>.
- Lubinger, M., Frei, J. and Greiling, D. (2019). Assessing The Materiality of University G4-Sustainability Reports, *Journal of Public Budgeting ...* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-10-2018-0117>.
- Luque-Vilchez, M. and Larrinaga, C. (2016). Reporting Models Do Not Translate Well: Failing To Regulate CSR Reporting In Spain, *Social and Environmental ...* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1080/0969160X.2016.1149301>.
- Mertzanis, C., Garas, S. and Abdel-Maksoud, A. (2020). Integrity Of Financial Information And Firms Access To Energy In Developing Countries, *Energy Economics*, 92, p. 105005. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.eneco.2020.105005>.
- Nunes, M.F. (2018). Supply Chain Contamination: An Exploratory Approach on The Collateral Effects of Negative Corporate Events, *European Management Journal*, 36(4), pp. 573–587. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.emj.2017.09.003>.
- OJK, O.J.K. (2023). Kontribusi Sektor Perbankan Terhadap PDB Indonesia, 11(1), pp. 1–14. Available at: http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RE_D2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_S TRATEGI_MELESTARI.
- Saha, A.K. *et al.* (2019). Quality Versus Volume of Carbon Disclosures And Carbon Reduction Targets, *Pacific Accounting Review*, 31(3), pp. 413–437. Available at: <https://doi.org/10.1108/PAR-11-2018-0092>.
- Sipiczki, A. (2022). A Critical Look At The ESG Market. Available at: <https://doi.org/10.4324/9781315706863-18>.

- Tak, C.C., Zulnaidi, H. and Eu, L.K. (2024). Factors Influencing The Attitude Of Undergraduate Students Towards Mathematical Reasoning: An Approach Using AMOS-Structural Equation Modelling, *Infinity Journal*, 14(1), pp. 109–124. Available at: <https://doi.org/10.22460/infinity.v14i1.p109-124>.
- Vinet, L. and Zhedanov, A. (2011) A 'Missing' Family Of Classical Orthogonal Polynomials, *Journal Of Physics A: Mathematical And Theoretical*. Available at: <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.
- Waddock, S. A., & Graves, S.B. (1997). The Corporate Social Performance–Financial Performance Link, *Strategic Management Journal*, 18(4), pp. 303–319. Available at: [https://doi.org/https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-0266\(199704\)18:4<303::AID-SMJ869>3.0.CO;2-G](https://doi.org/https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199704)18:4<303::AID-SMJ869>3.0.CO;2-G).
- Zarzycka, E. and Krasodomska, J. (2021). Non-Financial Key Performance Indicators: What Determines The Differences In The Quality And Quantity Of The Disclosures?, *Journal of Applied Accounting Research*, Ahead-of-P(Ahead-Of-Print). Available at: <https://doi.org/10.1108/JAAR-02-2021-0036>.

PROFIL PENULIS




Azwani Aulia, S.E., M.Ak.

Penulis lahir di Bandung pada 2 Juli 1993 dan menempuh pendidikan Sarjana di Universitas Kristen Maranatha serta Magister di Universitas Padjadjaran. Karir akademiknya dimulai sebagai dosen di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, dan kini penulis beralih ke Universitas Adiwangsa Jambi, tempat ia melanjutkan dedikasinya dalam dunia pendidikan.


Sebagai seorang pengajar, penulis sangat meyakini bahwa berbagi pengetahuan adalah amal jariyah yang akan terus mengalirkan pahala, dan itulah yang memotivasi untuk terus menyebarkan ilmu kepada siapa pun yang ingin belajar. Selain sebagai pengajar, penulis juga tengah menempuh studi Doktorat di bidang Akuntansi di Universitas Padjadjaran. Penulis berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif dalam dunia pendidikan dengan menyusun bahan ajar yang praktis dan mudah dipahami. Dengan berbagai pengalaman di dunia akademik, penulis berhasil mendapatkan hibah LLDikti IV setiap tahunnya, baik sebagai dosen maupun mahasiswa doktorat. Kecintaannya dalam menyederhanakan konsep-konsep akuntansi yang rumit menjadi dorongan utama bagi penulis untuk menulis buku ini. Penulis percaya bahwa pemahaman yang kuat terhadap analisis akuntansi akan sangat membantu pembaca untuk siap menghadapi tantangan profesional. Dengan semangat terus belajar, penulis berharap dapat menginspirasi banyak orang untuk meraih sukses melalui usaha dan dedikasi.

Email Penulis: azwaniaulia@gmail.com.



BAB 24
AKUNTANSI
KEBERLANJUTAN DAN
HIJAU UNTUK SEKTOR
PUBLIK

Dr. Lisna Lisnawati, S.E., M.Ak.
Universitas Muhammadiyah Bandung



Isu & Kerangka Konseptual

Meluasnya konsep keberlanjutan di seluruh dunia berdampak pada perubahan kepedulian terhadap lingkungan. Gagasan *triple bottom line* diperkenalkan oleh John Elkington merupakan lompatan awal menuju keberlanjutan.

Perusahaan sebagai pengguna sumber daya alam seringkali hanya mementingkan laba sebesar-besarnya, sehingga lupa akan kewajibannya terhadap lingkungannya. Konsep tersebut membuka pandangan perusahaan untuk ikut berperan aktif dalam pelestarian lingkungan. Makna keberlanjutan makin mengemuka dalam perjanjian Paris, sehingga John Elkington sangat layak di sebut sebagai bapak keberlanjutan.

Konsep tersebut meluas tidak hanya dalam sektor private tetapi masuk dalam sektor publik. Pemerintah mulai aktif dalam mempromosikan konsep keberlanjutan, hijau dan *carbon disclosure*. Namun, praktiknya di sektor publik keberlanjutan ini hanya sebatas slogan, belum menyentuh pada ranah praktik lebih lanjut. Ranah praktik yang dimaksud adalah dalam tataran akuntansi. SDGs pemerintah pusat maupun daerah udah diperkenankan, namun hanya sekedar memenuhi aspek-aspek yang ada dalam SDGs tidak dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Praktik *Sustainability Development Goals* (SDGs) akan menimbulkan pengeluaran keberlanjutan yang tentunya perlu dikelola dengan baik. SDGs sendiri merupakan tujuan pembangun berkelanjutan yang memiliki 17 tujuan utama dan bisa dikembangkan sesuai dengan entitas yang menggunakannya.

Tujuh belas (17) tujuan tersebut di antaranya penghapusan kemiskinan dan kelaparan, mencapai kehidupan sehat dan sejahtera, memperoleh pendidikan berkualitas, terdapat kesetaraan *gender*, didapatnya air bersih dan sanitasi layak, akses terhadap energi bersih dan terjangkau, memperoleh pekerjaan layak dan mencapai pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, pengurangan kesenjangan, pembangunan kota dan komunitas berkelanjutan, pola konsumsi dan pola produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, pelestarian ekosistem daratan, tercapainya perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, adanya kemitraan untuk mencapai tujuan.

Saat ini upaya pencapaian ke 17 SDGs tersebut masih di permukaan dan belum mengarah pada upaya komprehensif. Adopsi SDGs di sektor publik bisa diterapkan dari pemerintahan daerah terkecil, SKPD, pemerintah desa, kecamatan, pemerintah daerah (Kota, Kabupaten, Provinsi), Badan usaha milik pemerintah maupun daerah.

Atau sebaliknya bergerak dari level terbesar ke level terkecil. Nyatanya saat ini masih tidak terstruktur, dan diberikan kebebasan secara sukarela untuk melaporkannya. Adapun secara teori, empiris dan konsep akuntansi keberlanjutan atau akuntansi hijau mulai berkembang dan banyak diadopsi oleh sektor *private* (Lisnawati & Mulyati, 2021; Lisnawati & Gunawan, 2024). Sementara itu, di sektor publik sangat lambat dan seolah-olah tidak menunjukkan ke arah perubahan yang berarti. Untuk itu dalam buku ini, penulis mencoba memberikan perspektif untuk menjadi bahan rujukan secara teori.



Gambar 24.1: 17 Goals to Transforms Our World SDGs

Sumber: LocaliseSDGs.

Akuntansi keberlanjutan merupakan konsep pencatatan, pengukuran dan pelaporan transaksi yang melibatkan upaya-upaya mencapai keberlanjutan (lingkungan, sosial dan ekonomi). Akuntansi keberlanjutan bisa dipecah jadi 2 yaitu konsep akuntansi hijau dan konsep akuntansi sosial. Di sektor *private* konsep akuntansi hijau lebih dahulu menemukan jalannya, sudah banyak praktik yang menerapkan akuntansi hijau baik secara *full disclosure* atau semi *full disclosure*.

usaha atau kegiatan-kegiatan pemerintah dan atau badan usaha milik pemerintah yang berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat.

Liabilitas konvergensi merupakan utang apabila semua akibat yang timbul dari aktivitas usaha tidak langsung ditindaklanjuti dan bisa menimbulkan gugatan hukum yang serius. Pengakuan liabilitas konvergensi lingkungan/sosial dilakukan pada saat perusahaan memiliki kewajiban kini yang nilainya dapat diestimasi.

Pengukuran liabilitas konvergensi lingkungan/sosial sebesar estimasi terbaik dari biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Sementara itu, pelaporan liabilitas konvergensi lingkungan/sosial dilakukan pada neraca di bagian liabilitas.

4. Biaya-Biaya Keberlanjutan/Hijau

Biaya mencerminkan pengorbanan yang dilakukan entitas untuk mendapatkan hasil atau manfaat yang diharapkan. Biaya keberlanjutan/hijau merupakan pengorbanan yang timbul akibat aktivitas yang memberikan dampak pada lingkungan dan sosial (mencegah, mengurangi, memulihkan dan memperbaiki).

Biaya keberlanjutan/hijau diakui ketika terjadinya atau besar kemungkinan akan terjadi pengeluaran dari aktivitas yang berdampak pada lingkungan dan sosial. Pengukurannya dilakukan menggunakan biaya historis. Pelaporan biaya keberlanjutan/ hijau dilakukan pada Laporan Laba/Rugi. Biaya-biaya lingkungan dapat diidentifikasi sebagai berikut; 1). Biaya regulasi, 2) biaya entitas keberlanjutan/hijau, 3). Biaya kontijen.

5. Donasi *Corporate Sosial Responsibility* (CSR)

Donasi merupakan pemberian secara sukarela baik berupa uang, barang maupun aset lainnya tanpa mengharap imbalan apapun. Donasi CSR diakui pada saat arus kas masuk dan diukur menggunakan biaya perolehan. Adapun pelaporannya dilakukan pada neraca.

Donasi CSR yang dilakukan sektor publik lebih umum digunakan untuk tanggung jawab sosial instansi pemerintah maupun program kemitraan dan bisa lingkungan di BUMN/BUMD. Donasi CSR yang dikeluarkan pemerintah akan diakui sebagai hibah oleh lawan transaksinya.

Hal tersebut karena CSR diberikan secara sukarela. Misalnya, BUMN memberikan donasi CSR berupa alat pengolahan limbah kepada dinas lingkungan hidup. Dari sisi BUMN akan diakui sebagai donasi CSR sedangkan di sisi dinas lingkungan hidup akan diakui sebagai hibah BUMN.

Daftar Pustaka

- Lako, Andreas. (2018). Conceptual Framework of Green Accounting. Accounting (May).
- Lisnawati, Lisna, Titik Aryati, and Juniati Gunawan. (2024). Implementation of Digital Innovation on Sustainability Performance: The Moderating Role of Green Accounting in the Industrial Sector. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies* 1(13(127)).
- Lisnawati, Lisna, and Yati Mulyati. (2021). Environment Management Reporting Disclosure Before And After Sustainability Development Goals. *JAF- Journal of Accounting and Finance* 5(2): 57.
- Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). (2012). Jakarta. Salemba Empat.

PROFIL PENULIS



Dr. Lisna Lisnawati, S.E., M.Ak.

Penulis merupakan dosen yang bergelar Doktor Akuntansi dengan kepakaran Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Lingkungan dari Universitas Trisakti Jakarta. Bidang ilmu akuntansi lingkungan masih terbilang baru dan masih jarang di pelajari di perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Inilah yang memotivasi penulis untuk fokus mengembangkan akuntansi lingkungan di berbagai sektor baik privat maupun sektor publik. Karya-karya tulisannya lebih banyak dituangkan dalam hasil penelitian yang terbit di berbagai jurnal baik nasional maupun internasional bereputasi. Berbagai kebaruan dalam penelitiannya sudah masuk di jurnal internasional bereputasi baik dalam pengembangan alat ukur akuntansi hijau maupun metodologi penelitian. Kontribusi kepakaran akuntansi hijau di sektor publik terutama pengembangan akuntansi hijau di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) mendapatkan hibah dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2025. Dengan semakin berkembangnya akuntansi hijau, tulisan ini mudah mudahan mampu membuka perspektif baru terkait pengembangan akuntansi keberlanjutan dan hijau di sektor publik.

Email Penulis: lisna.lisnawati@umbandung.ac.id.

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Buku ini hadir sebagai respons terhadap semakin kompleksnya tuntutan akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di berbagai entitas publik. Di era modern ini, peran sektor publik mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga lembaga non-profit yang didanai publik menjadi semakin vital dalam mengelola sumber daya negara demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penguasaan prinsip dan teknik akuntansi sektor publik bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan fundamental bagi para praktisi, akademisi, dan calon pemimpin masa depan. Buku ini dirancang secara komprehensif untuk menjembatani kesenjangan antara landasan teoritis yang kuat dengan implementasi praktis di lapangan, pembahasan pada buku ini meliputi:

1. Esensi dan Ruang Lingkup Sektor Publik
2. Teori Akuntansi Sektor Publik
3. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
4. Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik
5. Lingkungan dan Akuntabilitas Sektor Publik
6. Perencanaan Keuangan Publik: APBN dan APBD
7. Akuntansi Anggaran
8. Akuntansi untuk Pendapatan
9. Akuntansi untuk Belanja
10. Akuntansi untuk Aset
11. Akuntansi untuk Kewajiban
12. Akuntansi untuk Ekuitas Dana
13. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
14. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
15. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah
16. Auditing Sektor Publik
17. Akuntansi untuk Entitas Nirlaba
18. Akuntansi Basis Kas vs. Akuntansi Akrual
19. Akuntansi Anggaran Berbasis Kinerja
20. Biaya dan Costing dalam Layanan Publik
21. Kemitraan Pemerintah-Swasta (PPP/KPS)
22. Akuntansi untuk Aset Bersejarah dan Warisan Budaya
23. Isu Sustainability dan Pelaporan Berkelanjutan
24. Akuntansi Keberlanjutan dan Hijau untuk Sektor Publik